

**PEMBERITAAN POLITIK PRESIDEN JOKO WIDODO  
TURUT INTERVENSI BAKAL CALON PRESIDEN 2024  
DI MEDCOM.ID DAN KOMPAS.COM  
(Analisis Framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

**IRMA RIZQI YANI SOLIHAH**

**NIM : 1917102142**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
JURUSAN MANAJEMEN DAN KOMUNIKASI ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Irma Rizqi Yani Solihah

NIM : 1917102142

Jenjang : S1

Fakultas : Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa skripsi berjudul **Pemberitaan Politik Presiden Joko Widodo Turut Intervensi Bakal Calon Presiden 2024 Di Medcom.id dan Kompas.com (Analisis Framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki)** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau hasil karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dalam kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 11 Januari 2024

Menyatakan,



**Irma Rizqi Yani Solihah**

**NIM. 1917102142**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553,  
www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

“PEMBERITAAN POLITIK PRESIDEN JOKO WIDODO TURUT  
INTERVENSI BAKAL CALON PRESIDEN 2024 DI MEDCOM.ID DAN  
KOMPAS.COM (ANALISIS FRAMING ZHONGDANG PAN & GERALD M.  
KOSICKI)”

Yang disusun oleh Irma Rizqi Yani Solihah NIM. 1917102142 Program Studi komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saiffudin Zuhri, telah diujikan pada hari tanggal 16 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Komunikasi** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Muridan, M.Ag.  
NIP. 19740718 2005011006

Sekretaris Sidang/Penguji II

Siti Nurmahyati, S. Sos. I., M.S.I.

Penguji Utama

Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.  
NIP. 19691219 1998031 001

Mengesahkan,  
Purwokerto, 24-1-2024.....

Dekan,

Dr. Muskinul Fuad, M.Ag.  
NIP. 19741226 200003 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah  
Di Purwokerto

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, koreksi dan perbaikan terhadap naskah skripsi:

Nama : Irma Rizqi Yani Solihah

NIM : 1917102142

Jenjang : S1

Fakultas : Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

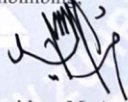
Judul : **Pemberitaan Politik Presiden Joko Widodo Turut Intervensi  
Bakal Calon Presiden 2024 di Medcom.id dan kompas.com (Analisis Framing  
Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki)**

Dengan ini dinyatakan bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosyah.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 11 Januari 2024

Pembimbing



Muridan, M. Ag.

**PEMBERITAAN POLITIK PRESIDEN JOKO WIDODO  
TURUT INTERVENSI BAKAL CALON PRESIDEN 2024  
DI MEDCOM.ID DAN KOMPAS.COM  
(Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki)**

**Irma Rizqi Yani Solihah  
1917102142**

**Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam  
1917102142@mhs.uinsaizu.ac.id**

**ABSTRAK**

Pada awal mei tahun ini, media menghebohkan publik dengan pemberitaan politik presiden yang dianggap kurang netral mengurus bakal calon presiden yang akan melengang dalam pemilihan umum 2024. Kabar ini mencuat usai diskusi presiden Joko Widodo dengan 6 ketua partai politik di Istana Merdeka menjadi tanda awal munculnya intervensi kepala negara dalam mengurus pemimpin Indonesia selanjutnya. Media sebagai pilar ke 4 demokrasi yang mengontrol 3 pilar sebelumnya yakni eksekutif, yudikatif serta legislatif memiliki peranan strategis dalam menginformasikan permasalahan itu untuk kepentingan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media dapat membingkai berita politik intervensi Jokowi dalam pemilihan bakal calon presiden 2024 khususnya dalam portal Medcom.id dan Kompas.com. Adapun metode dari penelitian ini ialah metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk kualitatif deskriptif. Metode ini pun dipergunakan dalam proses analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerlad M. Kosicki yang memiliki 4 elemen penting diantaranya sintaksis, skrip, tematik dan retorik mengenai isu ikutcampurnya presiden Joko Widodo mengurus bakal calon presiden 2024.

Hasil penelitian ini ditemukan penekanan isu yang didapat dari judul, narasumber, kutipan berita dan foto. Dimana pemberitaan dari Medcom.id lebih condong dalam menyuarakan kepentingan medianya yang terafiliasi dengan partai politik yaitu Nasdem. Sedangkan pada Kompas.com cenderung bebas dibuktikan dengan pembubuhan fakta serta naraumber yang lebih berimbang tidak hanya menyudutkan satu narasumber menjadi topik utama.

**Kata Kunci:** Berita Politik, Presiden, Medcom.id, Kompas.com, Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

**PRESIDENT JOKO WIDODO'S POLITICAL REPORT  
ON THE INTERVENTION OF THE PRESIDENTIAL CANDIDATE 2024  
IN MEDCOM.ID AND KOMPAS.COM  
(Framing Analysis Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki)**

**Irma Rizqi Yani Solihah  
1917102142**

**Islamic Communication and Broadcasting Study Program  
1917102142@mhs.uinsaizu.ac.id**

**ABSTRACT**

At the beginning of May this year, the media haunted the public with political announcements of the president who was considered less neutral about the future presidential candidate who would stand in the 2024 general election. The news of the end of President Joko Widodo's discussions with six political party leaders at Merdeka Palace was a preliminary sign of the emergence of the head of state's intervention in dealing with the next Indonesian leader. The media, as the fourth pillar of democracy that controlled the previous three pillars of executive, judicial and legislative, has a strategic role in informing the issue for the public interest.

The research aims to find out how the media can frame Jokowi's political intervention in the 2024 presidential election, in Medcom.id and Kompas.com portals. As for the method of this research, it is a derivative method presented in a qualitative descriptive form. This method also uses the nature of the analysis process framing model Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki which has four important elements including syntax, script, thematic and rhetorical on the mixed issues of President Joko Widodo dealing with future presidential candidate 2024.

The results of this research found emphasis on issues obtained from titles, sources, news quotes and photos. Where the news from Medcom.id is more inclined in expressing its media interests affiliated with the political party of Nasdem. Whereas on Kompas.com tends to be freely proved by the establishment of facts as well as more balanced numbers not only involve one source as the main topic.

**Keywords:** Politics news, President, Medcom.id, Kompas.com, Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki.

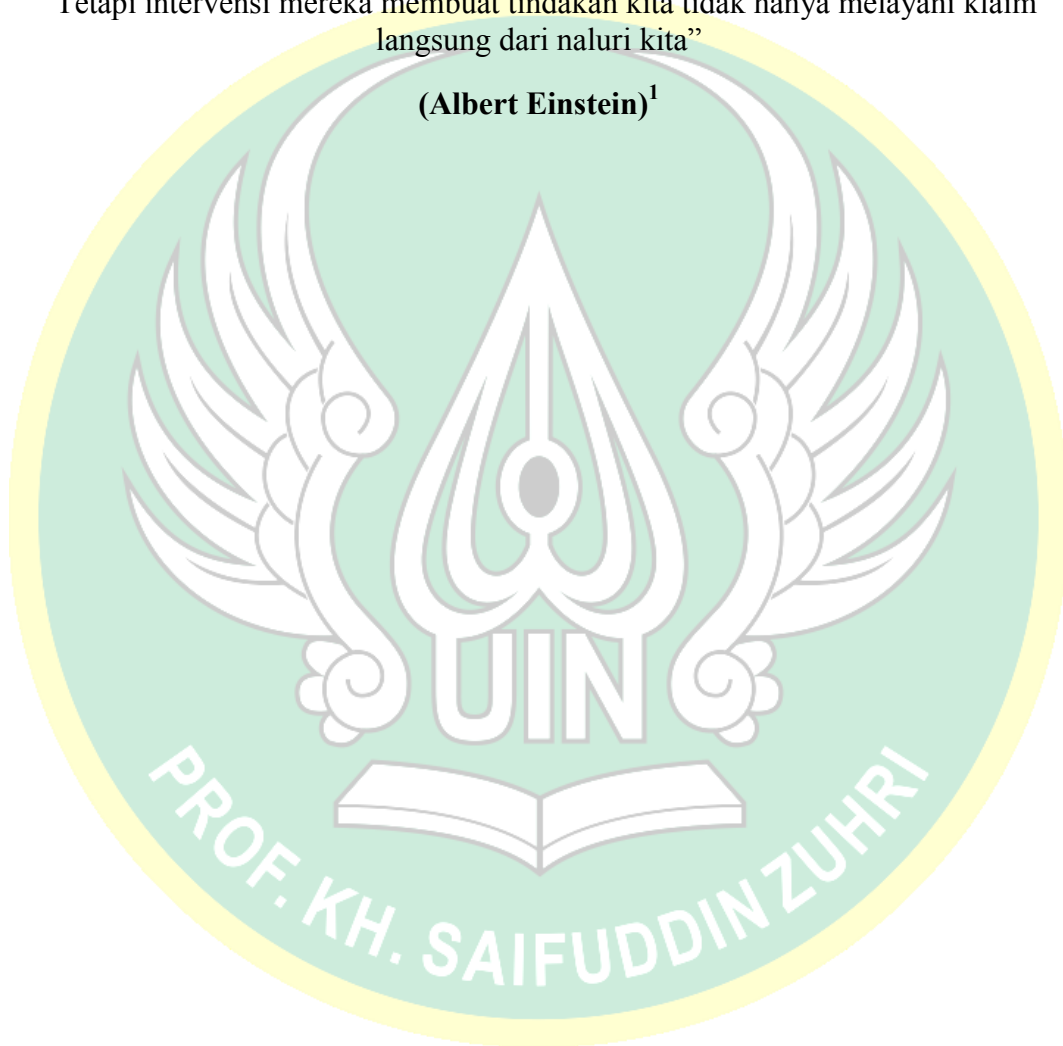
## MOTTO

“Suka atau tidak suka, intervensi pemerintah dalam menghadapi surplus akan tetap ada”

**(Benjamin Graham)**

“Tetapi intervensi mereka membuat tindakan kita tidak hanya melayani klaim langsung dari naluri kita”

**(Albert Einstein)<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Kata – Kata bijak tentang intervensi <https://jagokata.com/kata-bijak/kata-intervensi.html> diakses pada 30 November pukul 10:00 WIB.

## PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Susunan Skripsi ini Penulis dedikasikan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ahmad Musalim dan Ibu Kusniyah yang selalu ada dalam suka dan duka, senantiasa memberikan ketulusan cinta, kasih sayang, dukungan serta iringan doa yang tiada henti.
2. Almamater kebanggaan Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak / Ibu Guruku serta semua pihak yang telah dengan tulus memberi ilmu pengetahuan, bimbingan, pengalaman dengan penuh kesabaran dan keihlasan.



## KATA PENGANTAR

Untaian kata syukur yang indah terliskan kepada Sang Maha Kasih Ilahi Robbi, Allah SWT yang memberikan kekuatan kepada hambanya untuk beribadah dan melakukan segala amaliyah di dunia. Tanpa pertolongannya tentu kami tidak sanggup menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan baik.

Shalawat bersahutan dengan salam tak lupa tercurahkan keharibaan semesta alam Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan risalah Islamiyah kepada umatnya sampai yaumul akhir. Berkat perjuangannya dahulu, saat ini umatnya dapat menikmati indahnya dunia dengan pancaran ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi serta memberikan dedikasinya untuk memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Muskinul Fuad, M. Ag., Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Uus Uswatusolihah, M. A., Ketua Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dedy Riyadin Saputro, M.I.Kom, Kepala Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Muridan, M. Ag, Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan semangat, masukan, arahan, dan kesabaran dalam memberikan bimbingan demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga beliau beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT;

6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Kedua orangtua Bapak Ahmad Musalim dan Ibu Kusniyah yang telah menjadi halaman kehidupan terbaik dengan mencurahkan kasih sayangnya tiada henti selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
8. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Basit, M. Ag dan Ibu Reni selaku Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Husna yang telah mendidik dan membimbing selama mendalami ilmu agama;
9. Keluarga Bani Munadir dan Astra Diwirya yang telah memberi dukungan serta do'a tulusnya;
10. Kepada media Kompas.com dan Medcom.id yang telah menerbitkan pemberitaan sebagai bahan data penelitian dari skripsi ini;
11. Mukhammad Khoiru Tamam, Faridatul Labibah, Bagus Budi Sadjiwo, Muh. Iqbal Nurfikri, Novia Wiwit Nur Alfizah, Pandika Adi Putra, Maha Alfi Rizqiana, Resti Ananda dan Muhammad Fatih Nurhidayat yang menemani penulis sampai akhir penulisan;
12. Teman – teman Pejuang Skripsi Dwi Setyo Arini, Fatma Ariffina, dan Muhammad Abdur Rauf N. yang selalu memberikan motivasi serta energi semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
13. Teman-teman organisasi LPM Obsesi yang telah memberikan pengalaman dan ilmu dalam kejournalistikan dan mengajarkan penulis untuk berani melakukan reportase serta berpikir kritis;
14. Zahro, Ulfi, Aoul, Mpit, Melly, Sindy, Subhan, Mutia, Faza, Kunni, PW yang telah menemani penulis serta telah memberikan warna dalam menjalani dunia perkuliahan;
15. Teman-teman angkatan 2019 khususnya jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI C, Fordiskopic) terima kasih atas kebersamaannya untuk selama ini;
16. Teman-teman organisasi HMJ KPI yang telah memberikan warna dalam perkuliahan penulis di kampus;
17. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Peneliti merendahkan diri dengan memohon ampun atas setiap huruf, kata, kalimat yang salah. Itikat baik penulis agar semua huruf, kata dan kalimat dalam skripsi ini dapat bermanfaat untuk pihak yang sangat luas. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik serta keberkahan. Aamiin.

Purwokerto, 11 Januari 2024

**Irma Rizqi Yani Solihah**

**NIM. 1917102142**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Telaah Pustaka .....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Komunikasi .....	14
1. Pengertian Komunikasi .....	14
2. Komunikasi Politik .....	14
B. Berita.....	15
1. Pengertian Berita.....	15
2. Jenis-Jenis Berita di Media .....	16
3. Jenis-Jenis Berita Berdasarkan Permasalahannya.....	18
4. Media Daring .....	23

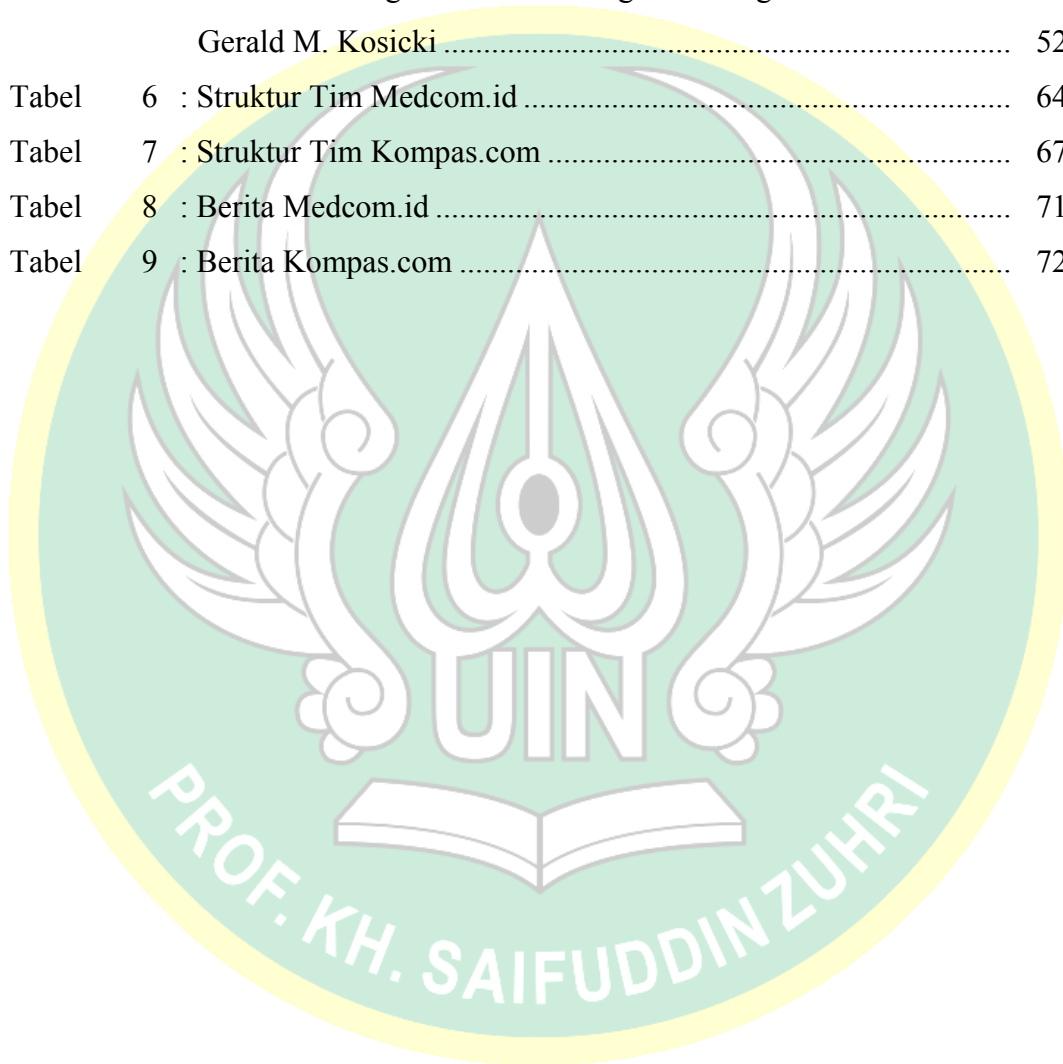
C. Politik .....	26
1. Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal.....	28
2. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal.....	35
D. Intervensi Politik .....	36
E. Analisis Framing .....	40
1. Definisi .....	40
2. Ciri Khas Penelitian Framing : Paham Konstruksionis.....	42
3. Bingkai dan Ideologi Media.....	43
4. Konstruksi Realitas dan Peta Ideologi .....	44
5. Efek Framing.....	48
6. Analisis Framing Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki .....	50
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
A. Model dan Pendekatan Penelitian .....	54
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	54
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	55
D. Sumber Data.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data .....	56
F. Analisis Data .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Medcom.id.....	58
B. Gambaran Umum Kompas.com.....	65
C. Framing Berita Politik Presiden Politik .....	70
1. Gambaran Umum Berita Politik Presiden Jokowi Turut Intervensi Bakal Calon Presiden 2024 .....	70
2. Penyajian Data Berita.....	70
3. Analisis Hasil Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.....	72
4. Pembahasan Berita Politik Jokowi turut Intervensi Bakal Calon Presiden 2024 di Medcom.id dan Kompas.com .....	104
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107

B. Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>117</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>143</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel	1	: Jenis Intervensi .....	37
Tabel	2	: Gambaran 2 Sisi dalam Berita .....	45
Tabel	3	: Gambaran 2 Sisi Bingkai Cara Pandang 1 .....	46
Tabel	4	: Gambaran 2 Sisi Bingkai Cara Pandang 2 .....	47
Tabel	5	: Susunan Perangkat Teori Framing Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki .....	52
Tabel	6	: Struktur Tim Medcom.id .....	64
Tabel	7	: Struktur Tim Kompas.com .....	67
Tabel	8	: Berita Medcom.id .....	71
Tabel	9	: Berita Kompas.com .....	72



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	1. Logo Medcom.id .....	59
Gambar	2. Format Konten OSC.....	60
Gambar	3. Format Konten Cek Fakta .....	60
Gambar	4. Format Konten Pilar .....	61
Gambar	5. Format Konten <i>Lifestyle</i> .....	61
Gambar	6. Format Konten <i>News</i> .....	62
Gambar	7. Format Konten <i>Hype &amp; Viral</i> .....	62
Gambar	8. Format Konten Pemilu 2024 .....	62
Gambar	9. Format Konten Video.....	63
Gambar	10. Format Konten Foto .....	63
Gambar	11. Format Konten <i>Streaming</i> .....	64
Gambar	12. Format Konten Index .....	64
Gambar	13. Logo Kompas.com .....	66



The logo of UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri is a circular emblem. It features a central white stylized symbol resembling a flame or a calligraphic element, with the letters 'UIN' in a bold, white, sans-serif font below it. Underneath the letters is an open book. The entire emblem is set against a light green background and is enclosed within a yellow circular border. The text 'PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI' is written in white, uppercase letters along the bottom inner edge of the yellow border.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan ajang pesta demokrasi yang diadakan tiap 5 tahun sekali untuk memilih para pemimpin bangsa. Mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat turut mensukseskan terpilihnya pemimpin baru. Perhelatan ini pun diikuti oleh partai politik nasional yang telah memenuhi syarat untuk dapat melenggang dipanggung pemilihan umum (pemilu). Seperti contoh partai Golongan karya (Golkar), partai PDI Perjuangan, Partai Demokrat, partai Nasdem, Pan, PPP, PKB, PKS dan partai lainnya yang telah lolos administrasi menurut KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Apalagi saat ini telah memasuki tahun – tahun politik dimana para parpol (partai politik) berlomba – lomba mengusungkan kadidat kuat mereka untuk maju dalam pencalonan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024. Sehingga mulai bermunculan kerjasama politik antar partai untuk mendapat suara terbanyak dalam pemilihan. Saat ini yang telah resmi mengumumkan koalisinya ialah partai Nasdem, PKB serta Pks dengan nama koalisi perubahan. Selain itu, terdapat penggabungan koliasi yang semestinya berkompetisi tetapi memilih untuk membentuk tim solid yaitu koalisi besar yang terdiri dari partai Golkar, Gerindra, dan PPP.

Pembentukan koalisi besar pun tak lepas dari andil Presiden Jokowi melalui pertemuan rahasia di Istana Negara pada Selasa 2 Mei 2023. Dimana dalam pertemuan tersebut turut mengundang para ketua partai politik besar yang mendukung pemerintah, diantaranya Megawati Soekarnoputri dari PDI Perjuangan, Gerindra dengan Prabowo Subianto, Golkar dengan Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar untuk PKB, Zulkifli Hasan untuk partai amanat nasional (PAN), serta Mardiono untuk PPP. Diskusi tersebut terjalin selama 3 jam yang anehnya minus partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang dulunya ikut tergabung dalam partai pembentuk pemerintah di era Joko Widodo.

Hal ini menimbulkan tanda tanya dikalng masyarakat dan khususnya untuk partai yang tidak diajak dalam pertemuan tersebut. Peristiwa itu juga melatarbelakangi munculnya istilah cawe – cawe capres yang dilakukan Jokowi. Cawe – cawe ini dapat dimaknai sebagai intervensi presiden dalam pengusungan bakal calon presiden 2024. Dengan kekuatan media yang dimiliki partai Nasdem mulai menyuarkan aspirasinya sendiri dalam portal media online Medcom.id.

Pers sebagai pilar ke 4 demokrasi memiliki andil besar dalam penyebaran informasi yang berlandaskan kepentingan publik. Bahkan terdapat peraturan yang mengatur kebebasan para wartawan dalam melaksanakan tugasnya dengan profesional yang tertuang dalam UU Pers No. 40 tahun 1999. Pers dapat berperan dalam menggiring opini maupun mengajak masyarakat untuk menaruh perhatian terhadap peristiwa yang terjadi baik dalam negeri, daerah, maupun dunia internasional. Informasi tersebut disebarluaskan melalui media massa baik radio, cetak, televisi, dan juga media baru (internet).

Pertumbuhan teknologi yang makin pesat menyebabkan semakin memperkecil jarak serta waktu untuk mendapatkan informasi dari suatu kejadian. Pembaruan fakta secara visual, audio dan tulisan kedalam realita dapat diperoleh khalayak untuk dibaca, didengarkan maupun ditonton dengan hitungan *second*. Perluasan informasi tersebut dapat berpengaruh pada argumentasi publik (*public opinion*).<sup>2</sup> Keluarnya internet membuka peluang anyar dalam industri pemberitaan dengan munculnya gerakan *new media* (media baru) yang penyebarannya dilakukan melalui kanal digital. Hal ini, mengakibatkan informasi menjadi semakin masif ke berbagai tempat tanpa mengenal jarak dan waktu. Dengan dunia maya segala info yang diperoleh publik dapat langsung memperoleh *feedback* (timbang balik) dari khalayak.

Firman Allah SWT menyebutkan bahwa apabila datang suatu kabar atau berita kita sebagai konsumen harus lebih selektif, kritis dan juga cerdas karena zaman sekarang banyak peredaran berita yang menyesatkan maupun berita

---

<sup>2</sup> Waspada, “*Profesi Jurnalistik Perspektif Hukum Islam*”, Makassar : Al-Zikra, 2017, 2.

bohong dalam QS. Al – Hujurat ayat 6<sup>3</sup> dengan nomor surat 49 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا  
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۖ

Artinya : “Hai orang – orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu.”

Dalam ayat lain pun diperintahkan agar manusia memberi kabar atau memberitakan info yang bijaksana dan memberikan edukasi kepada masyarakat karena hanya Tuhanlah yang Maha mengetahui serta pemberi petunjuk. Sehingga berilah informasi yang baik sesuai fakta dan memberi manfaat bagi khalayak. Terkadang dilapangan masih terdapat pemberitaan yang mengedepankan *clickbait* demi menarik konsumen yang berlimpah, yaitu antara isi serta judul tidak sinkron dan mengakibatkan munculnya *miss* informasi. Hal tersebut tertuang dalam surat nomor 16 QS. An – Nahl : 125

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ  
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۙ ١٢٥

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan – Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang – orang yang mendapat petunjuk.”

Perusahaan media pasti memiliki ideologi atau cara pandang dalam pembentukan berita yang akan dipublikasikan. Sehingga dari satu informasi dapat dikemas secara berbeda oleh berbagai perusahaan media. Karena dalam

<sup>3</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi tahun 2002*. (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2015), hlm. 517.

sebuah kantor media pasti terdapat struktur pengurus yang berperan dalam konstruksi pemberitaan. pada praktiknya, pembentukan informasi pasti terdapat bingkai yang digunakan oleh media untuk mengarahkan informasi yang akan diberitakan. Termasuk didalamnya media Medcom.id dan Kompas.com dari segi penyebaran fakta yang diperoleh pasti memiliki *angel* (sudut pandang) tersendiri untuk suatu isu yang sedang berkembang.

Berita portal media daring dalam informasinya tidak lepas akan adanya perspektif pro dan kontra. Peristiwa yang terlihat biasa saja dapat menjadi bermakna apabila terdapat unsur penonjol maupun pokok yang membantunya,<sup>4</sup> contoh dalam sebuah kejadian perlu adanya proses pemilihan informasi yang layak dan penting untuk dijadikan pemberitaan. saluan yang dipilih menjadi bahan analisa framing umumnya memiliki cara serta proses dalam mengkonstruksi informasi yang akan dijadikan berita. Media Medcom.id dan Kompas.com menjadi salah satu contoh yang dipilih dalam proses framing yang dipergunakan peneliti.

Sehingga pemilihan metode analisis framing akan sangat pas dilakukan dalam penelitian ini karena analisis bingkai dapat mempengaruhi cara khalayak melihat, memahami dan menafsirkan informasi. Pemilihan framing yang tepat dapat membantu mengarahkan perhatian audiens pada aspek tertentu dari masalah yang diteliti. Framing juga dapat mempengaruhi opini dan perilaku khayakak. Dalam konteks penelitian, pemilihan bingkai yang tepat dapat mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat terhadap isu yang diteliti. Penelitian dengan menggunakan metode framing juga dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan daya tarik pesan dimana dapat membantu menyampaikan pesan secara lebih menarik, relevan serta mudah dipahami oleh audiens yang beragam.

Sebagai media yang partainya tidak diturutsertakan dalam diskusi di Istana, Medcom.id mempublikasikan pemberitaan yang lebih memfokuskan Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang kurang netral. Contoh saja dalam

---

<sup>4</sup> Ashadi Siregar, dkk, *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*, (Yogyakarta : Kanisius, 1998), hlm. 27.

berita yang dirilis pada tanggal 4 Mei 2023 dengan Judul Kumpulkan Ketum Parpol di Istana, Jokowi Ogah Disebut Cawe – Cawe Urusan Capres oleh wartawan Indriyani Astuti. Dalam berita itu berisikan narasi mengundang 6 parpol ke istana serta pernyataan presiden mengenai acara tersebut serta bantahan tuduhan intervensi.

Pada laman Kompas.com yang menerbitkan pemberitaan dengan tajuk Panggil 6 Ketum Parpol ke Istana, Jokowi: Saya Bukan "Cawe-cawe" oleh wartawan Dian Erika Nugraheny 4 mei 2023. Lebih menyudutkan informasi penolakan presiden tentang ajang ikut campur urusan capres 2024 karena itu merupakan wewenang parpol serta ditambahkan pernyataan narasumber, dari ketum partai yang diundang yaitu Prabowo Subianto yang menyatakan dalam acara tersebut terdapat arahan dari presiden agar partai politik senantiasa rukun dan kompak.

Merujuk pada permasalahan tersebut, peneliti merasa perlu dilaksanakannya penelitian lebih lanjut untuk dapat memberi gambaran bagaimana media Medcom.id dan Kompas.com dalam memframe pemberitaan mengenai keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam pengurusan bakal calon presiden 2024.

## **B. Penegasan Istilah**

### **1. Berita**

Kata berita dalam bahasa asing (inggris) adalah *news* yang bersumber dari “*new*” memiliki arti pada hal – hal yang bersifat anyar atau baru. Menurut Willard G. Bleyer mendefinisikan berita sebagai segala sesuatu yang hangat dan menarik perhatian sejumlah pembaca, dan berita yang terbaik ialah berita yang paling menarik perhatian bagi jumlah pembaca yang paling besar<sup>5</sup>. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa berita merupakan pemberitahuan informasi yang terjadi pada sebuah peristiwa yang berifat baru dan menyedot banyak perhatian khalayak.

---

<sup>5</sup> Kustadi Suhandang, “*Pengantar Jurnalistik : Seputar organisasi, Produk, & Kode Etik*”, (Bandung : Penerbit Nuansa, 2004), 103.

## 2. Presiden Jokowi

Presiden merupakan pemimpin negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Di Indonesia presiden akan bertugas sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)<sup>6</sup> dengan masa jabatan 5 tahun. Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, presiden akan dibantu oleh wakil presiden serta para menteri kabinet untuk mengurus permasalahan negara. Saat ini, Indonesia dipimpin oleh Presiden ke-7 Joko Widodo yang identik dengan politik blusukan serta kesederhanaanya.

## 3. Intervensi

Ialah kata yang biasanya muncul dalam bidang sosial, politik, ekonomi, kesehatan, militer dan lain sebagainya. Intervensi juga dimaknasi sebagai suatu tindakan ikut campur dalam suatu negara ataupun hubungan tertentu.<sup>7</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) intervensi ditafsirkan menjadi campur tangan dalam permasalahan dua pihak ( negara, orang, golongan dan lain – lain).

## 4. Bakal Calon Presiden 2024

Berdasarkan KBBI kata bakal berarti yang akan dibuat ( dijadikan) atau dapat disebut juga sebagai calon<sup>8</sup>. Capres adalah singkatan kata Calon presiden yang akan diusung oleh para partai politik. Untuk saat ini bakal calon presiden 2024 yang resmi diumumkan ialah Anies Baswedan yang berasal dari koalisi Perubahan, koalisi Indonesia Maju dengan Prabowo Subianto serta Ganjar Pranowo dari partai PDI – Perjuangan.

---

<sup>6</sup> Hasan Supriyadi, “Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia”, *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Dekomrasi* 6 : 2(2018).

<sup>7</sup> Andaru Satnyoto,” Justifikasi Intervensi Internasional Dalam Konflik Suatu Negara”, *Jurnal Asia Pasific Studies* Vol. 1, 2017, 211-212.

<sup>8</sup> Arti kata bakal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bakal> diakses pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 09:00 WIB.

5. Medcom.id

Merupakan portal media online dibawah naungan Media *Group* yang populer dengan saluran Metro Tv, Media Indonesia, Lampung *Post* dan lain sebagainya. Medcom.id mulai terbentuk dan mempublikasikan karya sejak 25 November 2017 serta berupaya menyajikan pemberitaan terkini, terpercaya, dan jurnalisme yang berkualitas. Masyarakat dapat mengakses melalui alamat situs [www.medcom.id](http://www.medcom.id).<sup>9</sup>

6. Kompas.com

ialah media pemberitaan daring pertama yang mulai memperkenalkan hasil jurnalistik semenjak 14 September 1995. Pendirian ini bertujuan untuk masyarakat yang sulit menjangkau pendistribusian fisik dari surat kabar Harian Kompas, sehingga disediakan layanan *online* Kompas.com.<sup>10</sup> bahkan sampai saat ini penyebarannya pun meluas hingga pembaca internasional berkat adanya internet yang tidak mengenal waktu dan tempat.

7. Analisis Framing

Analisis *framing* umumnya digunakan sebagai menguraikan opini maupun informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan media. Teori bingkai ini termasuk dalam kategori pendekatan *discourse analysis* (analysis wacana) yaitu untuk menelusuri teks media. Menurut pakar teori Analisis framing Zhongdang dan Gerald M. Kosicki memaknai framing sebagai rangkaian menjadikan sebuah pesan akan lebih terlihat menonjol, serta meletakkan informasi yang diperoleh menjadi pusat perhatian sehingga akan menjadikan audien lebih terfokus pada laporan peristiwa tersebut<sup>11</sup>. Dapat ditarik kesimpulan bahwa teori framing merupakan cara

---

<sup>9</sup> Tentang kami Medcom.id <https://www.medcom.id/tentangkami> diakses pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 10:00 WIB.

<sup>10</sup> About Us Kompas.com <https://inside.kompas.com/about-us> diakses pada 30 Mei 2023 pada pukul 11:00 WIB.

<sup>11</sup> Eriyanto, “*Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*”, (Yogyakarta : LKiS), 2002, 253.

bagaimana wartawan bercerita kepada khalayak dan memilih bagian utama mana yang akan menjadi poin utama pembahasan.

### **C. Batasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka akan dijelaskan batasan dalam riset ini adalah peneliti akan menganalisa penulisan berita yang telah dipublikasikan oleh media Medcom.id dan Kompas.com. Dimana tema yang akan dijadikan pembahasan ialah pemberitaan politik mengenai Presiden Joko Widodo turut serta dalam pengurusan bakal calon presiden 2024. Pada penelitian ini penulis akan memilih masing – masing 5 berita yang akan dianalisa.

Adapun rumusan masalah yang digali dalam penelitian ini : Bagaimana media *online* medcom.id serta kompas.com dalam membingkai pemberitaan politik keikutsertaan Presiden Jokowi mengurusi bakal calon presiden 2024?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bingkai pemberitaan politik tentang intervensi Presiden Jokowi dalam pemilihan bakal calon presiden 2024 pada media Medcom.id dan Kompas.com.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini :

#### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta khasanah keilmuan bagi perkembangan akademis khususnya dalam penelitian dakwah, kajian komunikasi penyiaran islam.

#### b. Secara Akademik

Dapat menjadi media referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pemberitaan yang disajikan oleh Medcom.id dan Kompas.com. Serta dapat dijadikan sumber acuan dalam peningkatan ilmu Kejournalistikan.

#### c. Bagi Peneliti

Sebagai syarat menyelesaikan program studi sarjana (S1) jurusan komunikasi penyiaran islam di Fakultas Dakwah Universitas Islam Negri



Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi peneliti agar dapat mengamalkannya.

#### F. Telaah Pustaka

Sebelum dilakukan penelitian ini, penulis melakukan observasi atau penelusuran terhadap skripsi terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu antara lain :

1. Skripsi Ida Fadilah yang berjudul *Analisis Framing Berita Debat Pemilihan Presiden 2019 Pada Surat Kabar Jawa Pos*,<sup>12</sup> terbitan tahun 2019. Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan teknik analisa yang digunakan menggunakan model analisis framing milik Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. Dan terdapat perbedaan dalam topik pembahasan dimana dalam penulisan ini akan meneliti tentang komparasi pemberitaan yang dipublikasikan oleh media medcom.id dan kompas.com. Sedangkan dalam skripsi terdahulu membahas tentang pemberitaan pertukaran pendapat pemilihan presiden 2019 serta dari satu media yaitu Jawa Pos.
2. Skripsi dengan judul *Analisis Framing Model Pan dan Kosicki Berita Kampanye Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia 2019 Pada Media Cetak Harian Duta Masyarakat Rentang waktu 23 September – 30 November 2018*<sup>13</sup>. Telaah pustaka tersebut disusun oleh Hepi Fauzi, Strata satu Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2019. Penelitian tersebut terfokus untuk membahas bagaimana media cetak Harian Duta Masyarakat dalam memframing berita pilpres (pemilihan presiden) 2019. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan menelusuri pembingkai berita mengenai keikutsertaan Presiden Joko Widodo dalam pemilihan bakal calon presiden 2024 pada medcom.id serta kompas.com

---

<sup>12</sup> Ida Fadilah, “*Analisis Framing Berita Debat Pemilihan Presiden 2019 Pada Surat Kabar Jawa Pos*”, Skripsi, Salatiga : 2019.

<sup>13</sup> Hepi Fauzi, “*Analisis Framing Model Pan dan Kosicki Berita Kampanye Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia 2019 Pada Media Cetak Harian Duta Masyarakat Rentang waktu 23 September – 30 November 2018*”, Skripsi, Surabaya, 2019.

yang berbasis daring. Persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada metode analisa framing milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

3. Skripsi Sakarini Ashri Fitria mahasiswa strata satu Universitas Islam Negri Suanan Ampel Surabaya, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam pada tahun 2019. Penelitian tersebut berjudul *Analisis Framing Pemberitaan Deklarasi Kampanye Damai pemilihan Presiden 2019 di Liputan6.com dan Tempo.co*<sup>14</sup>. Persamaan dari kedua penelitian ini terdapat pada teknik analisa yang digunakan serta obyek yang diteliti yaitu portal media online namun berlainaan perusahaan. Penelitian ini akan meneliti *website* medcom.id dan kompas.com sedangkan peneliti dahulu pada situs Tempo.co serta Liputan6.com.
4. Telaah pustaka yang berjudul *Analisis Framing Harian Sarambinews.com Indonesia terkait Pengumuman Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019*<sup>15</sup> milik Ferdi Yunaldi. Terdapat kesamaan pada media yang ditelusuri yaitu pemberitaan *online*, tetapi dari sumber yang berbeda dimana pada penulisan ini akan menganalisa 2 media, Kompas.com dan Medcom.id. Meski memiliki tujuan penelitian yang sama yaitu ingin mengetahui bagaimana media membingkai berita yang dipublikasikan, pada penelelitian terdahulu memilih fokus pada pemberitaan pengumuman hasil pemilihan presiden 2019, sedangkan dalam skripsi ini akan menjabarkan turut sertanya presiden dalam persoalan bakal capres 2024.
5. Penelitian dengan judul *Citra K.H. Ma'ruf Amin Dalam Pilpres 2019 (Studi Analisis Framing Media Daring Kumparan.com)*<sup>16</sup> yang ditulis oleh Moh Faiz Ubaidi Rahman, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2019. Pada penelitian

---

<sup>14</sup> Sakarini Ashri Fitria “*Analisis Framing Pemberitaan Deklarasi Kampanye Damai pemilihan Presiden 2019 di Liputan6.com dan Tempo.co*”. Skripsi, Surabaya, 2019.

<sup>15</sup> Ferdi Yunaldi, “*Analisis Framing Harian Sarambinews.com Indonesia terkait Pengumuman Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019*”, Skripsi, Banda Aceh, 2019.

<sup>16</sup> Moh Faiz Ubaidi Rahman, “*Citra K.H. Ma'ruf Amin Dalam Pilpres 2019 (Studi Analisis Framing Media Daring Kumparan.com)*”, Skripsi, Yogyakarta : 2019.

tersebut menyoroti pemberitaan sosok Ma'ruf Amin yang diterbitkan dalam media online Kumparan.com. sedangkan dalam penelitian ini akan terfokus pada media Medcom.id dan Kompas.com mengenai ikut campur Presiden Jokowi mengurus bakal calon presiden 2024. Persamaan terletak pada teori analisa yang digunakan yaitu model bingkai Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

6. Jurnal *online* berjudul *Pemberitaan Kampanye Pemilihan Presiden 2019 di Media Siber dan Penerapan Elemen Jurnalisme (Analisis Framing Pada Okezone.com dan Suara.com)*<sup>17</sup>. Karya tersebut ditulis oleh Esti Sri Handayani dan Ahmad Junaidi mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara. Persamaan dari kedua penelitian ini ialah dari model analisa yang digunakan serta bersumber dari media daring. Perbedaan sangat terlihat jelas dari situs web pemberitaan, dimana dalam penelitian ini akan menelusuri laman Kompas.com dan Medcom.id. Selain itu, perbedaan juga terlihat jelas pada topik bahasan penelitian terdahulu menyoroti pemberitaan pemilu 2019 sedangkan di skripsi ini penulis mengambil tema tentang keikutsertaan Presiden Jokowi dalam mengukung bakal calon presiden 2024.
7. Jurnal *online* dengan judul *Analisis Framing Media Daring Tempo.co dan Kompas.com Terhadap Kecurangan Pilpres 2019*<sup>18</sup>. Karya tersebut ditulis oleh Fitriingsih dan Catur Nugroho mahasiswa Universitas Telkom Bandung pada 2021. Pada penelitian ini lebih memfokuskan berita yang diunggah dalam *website* Medcom.id serta Kompas.com yang bertemakan turut andilnya presiden dalam pemilihan bakal capres 2024. Sedangkan pada jurnal terdahulu meneliti media mainstream yaitu Tempo.co dan juga kompas.com. Meski memiliki persamaan dalam model analisa tetapi topik

---

<sup>17</sup> Esti Sri Handayani, Ahmad Junaidi, "Pemberitaan kampanye Pemilihan Presiden 2019 Di Media Siber dan penerapan Elemen Jurnalisme ( Analisis Framing pada Okezone.com dan Suara.com)", *Koneksi* Vol 2, No. 2 (2018) : 321-328.

<sup>18</sup> Fitriingsih, Catur Nugroho, "Analisis Framing Media Daring Tempo.co dan Kompas.com Terhadap Kecurangan Pilpres 2019, *e-proceeding of management* : Vol. 8, No.5 (2021):6902.

yang dipaparkan berbeda, dalam karya tersebut membahas berita ketidakjujuran pemilu presiden 2019.

8. Zahra Febriyanti dan N.R Nadya Karina mahasiswa magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina menerbitkan jurnal dengan judul *Konstruksi Berita CNN Indonesia Tentang Gibran Rakabuming Raka Pasca Pilkada Serentak Kota Solo 2020 : Analisis Framing Perspektif Zhongdang Pan – Gerald M. Kosicki*<sup>19</sup>. Perbedaan sudah jelas terlihat pada ide bahasan dan juga portal media yang dipilih. Persamaan terletak pada model analisis yang digunakan. Namun, dalam jurnal hanya membahas 2 berita dan dalam penelitian ini penulis akan mengambil masing – masing 5 dari saluran Kompas.com dan Medcom.id.

Menurut telaah pustaka yang telah dijabarkan diatas, terdapat perasamaan pusat pembahasan mengenai bagaimanakan konstruksi media mbingkai pemberitaanya dengan menggunakan metode analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Namun berlainan dari sudut media yang diteliti serta belum ada yang menelusuri tentang berita Presiden Jokowi intervensi bakal calon presiden 2024 di Kompas.com dan Medcom.id. Sehingga, dapat dimaknai bahwa penelitian ini bersifat kebaruan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini akan disusun dengan mengikuti sistematika pembahasan bab – perbab yang terdiri dari 5 bagian bab diantaranya :

**BAB I** : Memuat tentang pendahuluan dari sebuah penelitian yang mengantarkan pembahasan secara keseluruhan, berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, batasan dan rumusan permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitan, telaah pustaka, serta sistematika pembahasan.

---

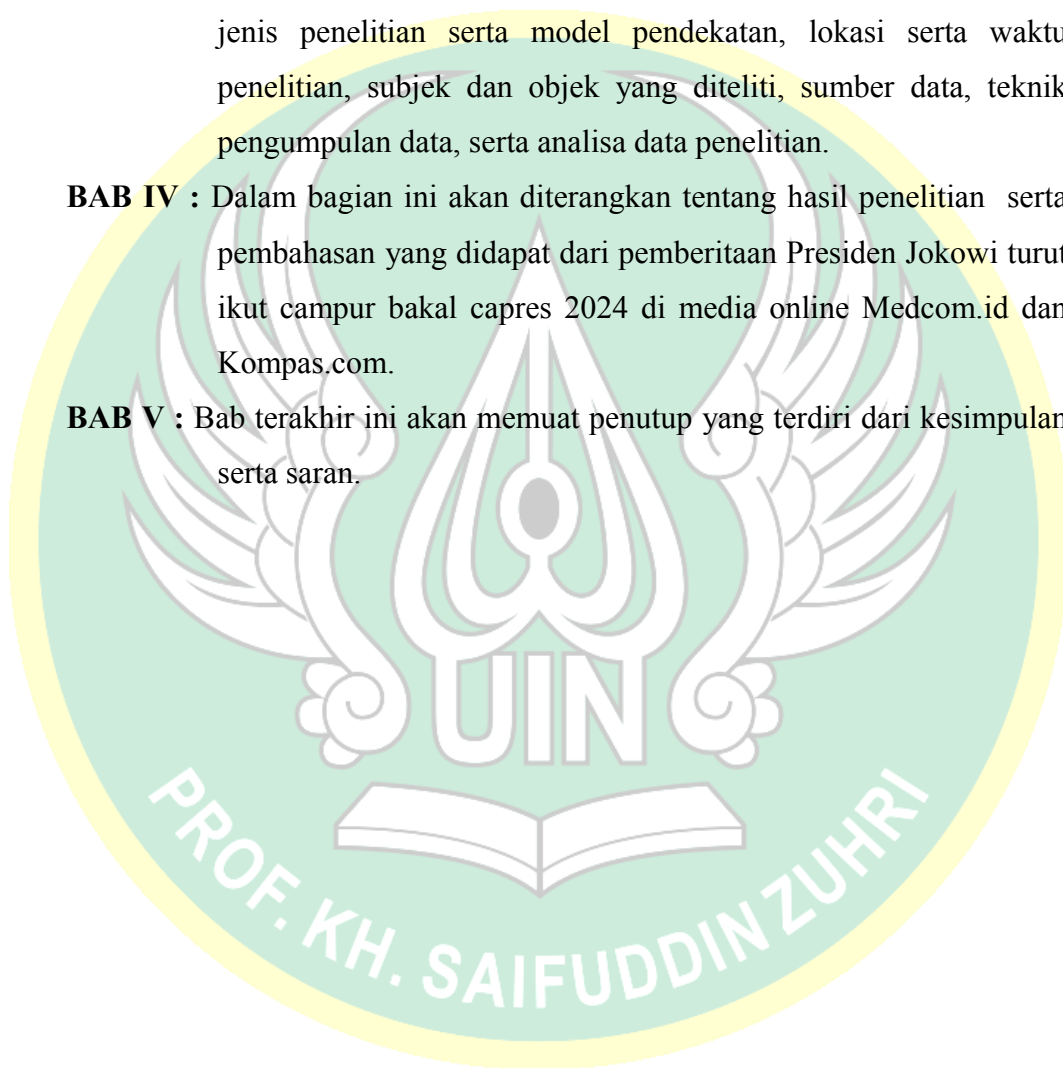
<sup>19</sup> Zahra Febriyanti, N.R Nadya, “Konstruksi Berita CNN Indonesia Tentang Gibran Rakabuming Raka Pasca Pilkada Serentak Kota Solo 2020 : Analisis Framing Perspektif Zhongdang Pan – Gerald M. Kosicki”, *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora* Vol. 2 (2021):146.

**BAB II** : Akan membahas mengenai landasan teori. Disini akan menjelaskan tentang berita, jenis berita, media daring, politik kekuasaan, intervensi politik, dan analisis framing baik dari definisi, paham konstruksionis, ideologi media serta analisis bingkai model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

**BAB III** : Bab ini membahas mengenai Metode Penelitian. Akan dijelaskan jenis penelitian serta model pendekatan, lokasi serta waktu penelitian, subjek dan objek yang diteliti, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisa data penelitian.

**BAB IV** : Dalam bagian ini akan diterangkan tentang hasil penelitian serta pembahasan yang didapat dari pemberitaan Presiden Jokowi turut ikut campur bakal capres 2024 di media online Medcom.id dan Kompas.com.

**BAB V** : Bab terakhir ini akan memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan serta saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Komunikasi

##### 1. Pengertian Komunikasi

Komunikasi jika dimaknai secara sederhana merupakan proses transmisi pesan dari komunikator (pengirim pesan) kepada penerima (komunikan). Menurut ahli politik Harold Lasswell (1948) menyatakan cara termudah untuk mendefinisikan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan seperti siapa? berkata apa? melalui media apa? teruntuk siapa? serta menimbulkan efek apa?.<sup>20</sup>

Menurut Jamaluddin Rakhmat dalam karyanya yang bertajuk *Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan dan Media)*<sup>21</sup> menyatakan pengertian komunikasi ialah proses interaksi sosial yang digunakan masyarakat untuk membentuk makna yang merupakan penggambaran mereka untuk dapat mengenal dunia dan bertukar citra melalui simbol maupun tanda.

##### 2. Komunikasi Politik

Politik seperti komunikasi dimana politik melibatkan pembicaraan. Dialog ini bukan dalam tafsiran sempit seperti kata yang diucapkan, melainkan pembicaraan dalam arti lebih khusus yang bermakna segala upaya untuk bertukar simbol, kalimat baik secara tertulis maupun diucapkan langsung, gambar, gerak tubuh, sikap dan busana. Hal ini senada dengan pandangan pakar politik Mark Roeloffs yang beranggapan bahwa politik ialah aktivitas politik merupakan berbicara.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Massa Jilid 1 Edisi 5 : Melek Media & Budaya*, Jakarta : Erlangga, 2012, hlm. 5.

<sup>21</sup> Jamaluddin Rakhmat, *Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan dan Media)*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 8.

<sup>22</sup> Jamaluddin Rakhmat, *Komunikasi Politik (Komunikator ...*

Dari berbagai kajian yang membahas tentang komunikasi politik biasanya memiliki keterkaitan dengan media massa dalam proses komunikasi yang dilaluinya. Hal ini direpresentasikan dengan banyaknya karya tulis maupun makalah yang didominasi oleh isu kampanye politik untuk menarik suara maupun membangun kekuatan politik. Meskipun berbagai studi tidak sepakat tentang bagaimana eratnya asosiasi antara penggunaan media massa dan tingkat pengetahuan politik yang menjadi kesepakatan adalah penggunaan terpaan surat kabar, televisi mempunyai relevansi yang positif dengan jumlah informasi tentang politik yang dimiliki oleh kalangan muda.<sup>23</sup> Pemanfaatan media massa dapat menambah informasi mengenai objek politik seperti tentang partai politik hanya dengan menonton maupun mendengarkan tentang persoalan politik. Dari koran dapat membantu dalam mengembangkan konsep pemikiran anak muda bahwa pemerintah merupakan sebuah kelembagaan dan tidak hanya berupa aktor – aktor politik yang dipersonalkan.

## **B. Berita**

### **1. Pengertian Berita**

Berdasarkan buku dengan judul Pengantar ilmu Jurnalistik karya Asep Saeful Muhtadi menjelaskan bahwa ada pepatah lama mengatakan bahwa anjing menggigit manusia itu bukanlah berita, namun bila manusia yang menggigit anjing itu yang dinamakan berita karena memenuhi persyaratan dalam pemberitaan yaitu keunikannya. Dari peristiwa tersebut dapat dimaknai bahwa unsur lingkungan dan manusia dapat dijadikan faktor sebuah kejadian disebut sebagai berita maupun tidak. Berita juga dapat dimaknai sebagai sebuah informasi baru yang diterbitkan pada media massa baik cetak maupun *new media* (media online). Menurut Sedia Willing Barus dalam buku yang berjudul Jurnalistik Petunjuk Teknis dan

---

<sup>23</sup> Jamaluddin Rakhmat, “*Komunikasi Politik (Khalayak dan Efek)*”, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 119.

Menulis Berita<sup>24</sup> (2010:25) mendefinisikan berita merupakan segala informasi tentang fakta, gagasan, kejadian, fenomena, yang bermanfaat serta menarik khalayak dan dipublikasikan pada media untuk menimbulkan kesadaran publik.

Peristiwa yang belum didengar ataupun menjadi suatu kejadian langka dan baru ada dapat didefinisikan sebagai berita. Dan apabila kita menyerahkan pendapat kepada seorang wartawan mengenai apa itu berita, mungkin akan ada yang menjawab berita ialah apa yang dikatakan seorang reporter dan editor itulah sebuah berita (*what editors and reporters say it is*)<sup>25</sup>.

## 2. Jenis – jenis berita di media

Dalam pemberitaan baik yang tersedia di media daring, majalah maupun koran memiliki macam yang berbeda – beda. Apalagi memiliki fungsi sebagai pemberi informasi kepada umum, berita memiliki karakteristik tersendiri seperti bersifat aktual, berimbang, objektif, lengkap dan jelas. Berikut jenis – jenis berita yang ada di media :

### a. *Straight News*

Merupakan berita yang menyajikan informasi penting pada bagian awal pemberitaan serta biasanya berwujud berita langsung yang menarik perhatian serta bersifat baru. Dalam sebuah koran atau berita di televisi *straight news* selalu ditambihkan pada bagian depan maupun permulaan tayangan. *Straight news* dihadirkan untuk orang sibuk atau yang tidak memiliki waktu untuk sekedar menonton, mendengar maupun membaca koran, sehingga dihadirkan berita yang meletakkan

---

<sup>24</sup> Sedia Willing Barus, “*Jurnalistik Petunjuk Teknis dan Menulis Berita*”, Jakarta ; Erlangga, 2010, 25.

<sup>25</sup> Asep Saeful Muhtadi, “*Pengantar Ilmu Jurnalistik*”, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2016, 88.



garis besar fakta pada teras berita atau lead. Adapun jenis produk *straight news*, yaitu :<sup>26</sup>

1. Pemberitaan yang hanya memaparkan fakta penting yang terjadi dalam kejadian itu saja (*matter of fact news*)
2. *Action news*, yaitu pemberitaan yang menunjukkan tindakan, perbuatan yang ada dalam peristiwa yang terjadi. Dalam kata lain menceritakan kronologi kejadian.
3. *Quote news*, adalah memaparkan komentar tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi.

#### **b. Feature News**

Mempunyai nama lain berita tidak langsung, berita feature merupakan pemberitaan yang disajikan dengan gaya penyampaian diplomatis, tidak *to the point* pada topik yang dibahas sehingga dapat menarik khalayak untuk menonton, membaca maupun mendengar berita. Menurut George Fox Mott penulisan *feature* dapat menelusuri sebuah kejadian minor menjadi sebuah berita major.<sup>27</sup> Dimana pemanfaatan elemen *human interest* sangat diperlukan dalam narasinya. Berbeda dengan *straight news* yang hanya melaporkan fakta yang ada, dan terkadang dibumbui pemaknaan penulis untuk memperjelas gambaran peristiwa. *Feature* lebih memberikan kebebasan kepada penulis untuk mengeksplorasi tema yang dibawakan jadi maknanya lebih subjektif, namun tetap mengedepankan aktualitas pemberitaan.<sup>28</sup>

#### **c. Indept News**

Ialah pelaporan secara mendalam tentang sebuah peristiwa aktual yang ditampilkan lebih tajam, lengkap dan utuh<sup>29</sup>. Hal ini dilakukan

<sup>26</sup> Kustadi Suhandang, "Pengantar jurnalistik : Seputar Organisasi, Produk, & Kode Etik", Bandung : Penerbit Nuansa, 2004, 104-109.

<sup>27</sup> Septiawan Santana K, "Jurnalisme Kontemporer", Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. 35-36.

<sup>28</sup> Kustadi Suhandang, "Pengantar jurnalistik : Seputar Organisasi, Produk, & Kode Etik", Bandung : Penerbit Nuansa, 2004, 104-109.

agar khalayak dapat memahami sebuah informasi dari berbagai sudut pandang secara lengkap serta mendalam. Berita ini biasa hadir dalam wujud liputan utama, dimana memerlukan gaya bahasa yang menarik, waktu yang lebih lama dalam penulisan serta *crew* lebih dari biasanya.

#### **d. *Investigasi News***

Berita investigasi adalah pemberitaan yang didapat dari penyelidikan dari pihak kepolisian maupun wartawan terhadap suatu peristiwa yang kontroversial. Biasanya digunakan untuk mengungkap berita kriminal seperti pembunuhan, perampokan, korupsi dan tindak kejahatan lainnya. Pencarian tersebut dilakukan secara matang sehingga akan muncul fakta – fakta baru dalam penyelidikan. Dalam penyajiannya *investigasi news* akan menampilkan reka ulang peristiwa untuk memperjelas gambaran lokasi kejadian.

#### **e. *Editorial***

Editorial merupakan rubrik utama yang diangkat oleh divisi redaksi media pemberitaan yang akan menjadi topik pembahasannya dalam pemberitaannya.<sup>30</sup> Dalam surat kabar akan tersedia dalam tajuk rencana, sedangkan dalam pemberitaan di televisi akan ada segmen khusus untuk memaparkan tema yang diinginkan. Umumnya melaporkan peristiwa yang sedang banyak diperbincangkan khalayak ramai. *Editorial* tetap mengedepankan fakta, pandangan para ahli serta data yang diperoleh dari berbagai sumber. Contoh tanyangan *editorial* adalah program *editorial* Metro tv, Indonesia *lews club* di TvOne dan juga Mata Najwa.

### **3. Jenis – Jenis Berita berdasarkan Permasalahannya :**

#### **1. Berita Agama**

Laporan keagamaan sering menjadi suatu topik yang menarik banyak khalayak. Apalagi di Indonesia yang memiliki 6 kepercayaan yang diakui oleh negara diantaranya Budha, Islam, Kristen, Hindu,

<sup>29</sup> Syarifudin Yunus, " *Jurnalsitik Terapan*", Bogor : Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 48)

<sup>30</sup> Syarifudin Yunus, " *Jurnalsitik Terapan* ...

Katholik, dan Konghucu menjadikan informasi tersebut sangat diminati oleh para penganutnya. Dalam konteks ini, berita yang disajikan bukan mengenai tata cara dan upacaranya saja namun juga mengenai peristiwa yang terkait seperti toleransi, moderasi beragama, Islamofobia, dan lain – lain.<sup>31</sup>

Berita agama sering dihubungkan dengan permasalahan politik. Oleh karena itu, agama kerap kali digunakan untuk alat perilaku politik maupun sebagai kendaraan dalam ranah perpolitikan. Sehingga muncul istilah politik identitas dimana para politisi menggunakan aspek kepercayaan untuk menarik perhatian maupun suara dari masyarakat.

## **2. Berita Pendidikan**

Pendidikan adalah bagian terpenting bagi kehidupan manusia. Masyarakat yang tidak mampu mengenyam pendidikan dibangku sekolah pun bukan berarti tidak berminat dengan pembahasan pendidikan. Laporan yang disajikan pun tidak hanya *problem* mengenai lembaga kependidikan baik formal maupun non-formal tetapi juga media ingin menambah intensitas minat baca masyarakat Indonesia yang saat ini masuk ke peringkat paling bawah. Berita pendidikan ini pun memberitakan mulai dari pendidikan tingkat kanak – kanak hingga universitas.

## **3. Berita Ilmiah**

Informasi ilmiah atau yang biasa kita sebut sebagai pemberitaan mengenai ilmu pengetahuan adalah laporan yang memberitahukan tentang perkembangan dunia pengetahuan. Mulai dari penelitian baru, penemuan teori – teori anyar, pertemuan pakar ilmu pengetahuan hingga hasil eksperimen turut diberitakan. Meski pemberitaan ini memiliki segmentasi pasar tersendiri, tetapi masyarakat masih menyukai informasi tentang edukasi karena sifat keingintahuan yang tinggi. Sehingga pemberitaan ilmiah akan memiliki tempat khusus

---

<sup>31</sup> Asep Saeful Muhtadi, “*Pengantar Ilmu Jurnalistik*”, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2016.

tersendiri pada media massa sebagai penambah informasi serta memberi pengaruh pada audien.

#### **4. Berita politik**

Setiap aktivitas yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pasti akan memiliki keterkaitan dengan politik baik dirasakan langsung maupun tidak langsung.<sup>32</sup> Seperti contoh perbuatan yang dilakukan oleh rakyat diatur oleh undang – undang serta harus tunduk terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sehingga tertarik atau tidaknya terhadap permasalahan yang sedang berlangsung antara elit politik pun, masyarakat setidaknya tetap memperhatikan dan kritis terhadap pemberitaan tentang perpolitikan demi kesejahteraan dan terhindar dari peraturan yang menyeleweng.

Apalagi menjelang tahun – tahun pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 pasti media akan memberikan tayangan khusus tentang panasnya persaingan dan saling sindir para aktor politik. Pemberitaan seperti pembentukan kerjasama antar partai politik untuk menentukan bakal calon presiden mulai digaungkan, hingga informasi tentang prosentase elektabilitas kadidat calon pun disiarkan. Bahkan akhir- akhir ini sedang berkembang informasi mengenai pernyataan sikap kurang netral dari Presiden Joko Widodo pasti akan menjadi bahan menarik bagi pemberitaan politik.

#### **5. Berita Ekonomi**

Pada masa reformasi di akhir tahun 1997 hingga awal 1998 pemberitaan ekonomi mungkin menjadi informasi yang paling dinanti oleh rakyat Indonesia. Lantaran, krisis moneter yang tengah melanda pada masa itu menjadi perhatian tidak hanya oleh para pemilik modal namun juga oleh masyarakat biasa. Menaiknya harga bahan pokok serta turunnya nilai mata uang rupiah atas dollar Amerika menjadi berita yang laris dipublikasikan di televisi dan koran daerah serta

---

<sup>32</sup> Asep Saeful Muhtadi, *Pengantar Ilmu Jurnalistik...*

nasional. <sup>33</sup>Persoalan tersebut membuat meningkatnya permintaan tentang pemberitaan ekonomi yang merupakan berita sentral yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup terkhusus mengenai usaha mencari penghasilan. Akibat membludaknya informasi tentang ekonomi membuat perusahaan media menyediakan kolom khusus seperti warta ekonomi, bisnis Indonesia, Neraca dan lain sebagainya.

#### **f. Berita Hukum dan Pengadilan**

Pemberitaan tentang hukum dan pengadilan menjadi topik menarik yang selalu dibahas selain persoalan mengenai politik, ekonomi dan agama. Ketertarikan itulah yang membuat informasi tersebut memiliki tempat tersendiri dalam pemberitaan. Bahkan permasalahan – permasalahan yang muncul dipermukaan dapat menjadi berita hukum dan pengadilan jika telah memasuki meja hijau persidangan. Contoh berita politik tentang anggota dewan yang melakukan korupsi hingga merugikan keuangan negara mencapai miliaran rupiah pasti akan masuk dalam informasi pengadilan. Permasalahan agama mengenai terorisme, penyebaran paham radikalisme atau ibadah yang menyimpang dengan ketentuan undang – undang dapat berubah menjadi pemberitaan hukum. Sehingga, informasi hukum dan pengadilan memberikan magnet tersendiri bagi saluran media dan masyarakat.

#### **g. Berita Kejahatan**

Kejahatan dapat terjadi dimana – mana dan kapan saja, sehingga informasi tentang perbuatan jahat tersebut sangat banyak dan menjadi bahan pemberitaan. Akibatnya pemberitahuan tentang kejahatan sangat marak dalam tayangan berita maupun menjadi topik utama di surat kabar. <sup>34</sup>Khalayak pun menggemari laporan tentang tindak kejahatan bukan karena menyetujui pelaku namun karena erat dengan persoalan kehidupan sehari – hari. Selain itu, dapat pula sebagai upaya pencegahan dan penyelamatan diri sehingga dapat terhindar dari tindak

---

<sup>33</sup> Asep Saeful Muhtadi, “*Pengantar Ilmu Jurnalistik*”, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2016.

<sup>34</sup> Asep Saeful Muhtadi, “*Pengantar Ilmu...*”

kriminalitas. Terdapat efek negatif dengan adanya berita kejahatan yang dipaparkan secara detail karena dapat membuka oknum – oknum nakal untuk melakukan kejadian yang serupa dan perlu adanya kehati – hatian dalam pelaporan berita. Adapun bentuk informasi kejahatan diataranya perampokan, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, hipnotis dan lain – lain.

#### **h. Berita olahraga**

Berita olahraga memiliki segmen tersendiri dalam pemberitaan, baik di media cetak maupun elektronik. Dalam surat kabar terdapat rubrik *sport* yang peletakannya berada dalam halaman – halaman akhir dan pada media elektronik televisi bahkan terdapat acara khusus yang menyiarkan berita olahraga. Hal yang menarik dalam informasi olahraga adalah adanya aspek konflik (pertentangan) yang terjadi didalamnya. Seperti panasnya pertandingan yang terjadi antar pemain ataupun persoalan yang terjadi antar pendukung pun dapat dijadikan pemberitaan yang menarik pembaca. Contoh pemberitaan tentang terjadinya aksi kericuhan antara penggemar distadion, berita kemenangan tim nasional dalam ajang olahraga internasional dan lain sebagainya.

#### **i. Berita Perempuan**

Kehidupan perempuan memiliki daya tarik yang khas dan menjadi perhatian banyak orang. Di negara Indonesia diskusi mengenai isu wanita menjadi topik yang hampir tiada hentinya. Perbincangan seperti wanita tuna asusila, tenaga kerja wanita, emansipasi hingga perlombaan kecantikan cukup menjadi perhatian baik masyarakat umum maupun para pemerhati perempuan. Dampak dari informasi tentang wanita memunculkan banyaknya cetakan buku, majalah dan juga pemberitanaan wanita.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Asep Saeful Muhtadi, “*Pengantar Ilmu Jurnalistik*”, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2016.

#### 4. Media Daring

Jurnalistik dalam jaringan atau biasa dikenal dengan jurnalis *online* dikemukakan pertama kali oleh Jeniffer Musser pada tahun 1993 yang memuat artikel milik Mark Bowden. Kala itu, Bowden berkeinginan karyanya dapat disebarluaskan dalam bentuk audio, foto, dokumen dan juga video sekaligus disatu saluran. Jeniffer dan para timnya pun bekerja sama dan dapat mempublikasikan karya tersebut dalam laman *www.philly.com* di edisi *online inquirer*.<sup>36</sup>

Berdasarkan pengertian media daring juga kerap kali disebut dengan nama media siber (*cybermedia*), media internet (*internet media*), maupun media baru (*new media*) yang apabila ditafsirkan dapat bermakna sebagai saluran yang tersedia dalam jaringan pada situs website di internet. Menurut Dewan Pers media siber merupakan seluruh media yang menggunakan sarana internet dalam melakukan aktivitas jurnalistik dan memenuhi kriteria menurut perundang – undangan pers serta ketentuan perusahaan pers yang telah diterbitkan oleh Dewan pers<sup>37</sup>.

Dalam pandangan studi media dan komunikasi massa, media daring dijadikan bahan kajian bagi teori media baru (*new media*). Kata *new media* digunakan untuk mempermudah penamaan selain media massa konvensional seperti radio, televisi, koran film dan juga majalah. Sebagai saluran yang baru pasti memiliki ciri khas yang dimiliki, dibawah ini merupakan kelebihan, kekurangan dan macam dari media daring :

##### a. Kelebihan Media Daring<sup>38</sup>:

- 1) Cepat : setelah diunggah dapat langsung dinikmati oleh khalayak.
- 2) Aktualitas : berisikan informasi terkini karena kecepatan serta kemudahan dalam penyajiannya.

<sup>36</sup> Asep Syamsul M. Romli, “*Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online*”, Bandung : Nuansa Cendikia, 2020, hlm. 32-33.

<sup>37</sup> Asep Syamsul M. Romli, “*Jurnalistik Online : ...*”

<sup>38</sup> Asep Syamsul M. Romli, “*Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online*”, Bandung : Nuansa Cendikia, 2020, hlm. 36-38.

- 3) Multimedia : dapat menyediakan informasi berupa foto, video, audio, grafik dan lain sebagainya dalam satu pemberitaan.
- 4) Update : berifat pembaruan (*updating*). Informasi dapat diperoleh secara pesat baik dari bagian konten maupun redaksinya.
- 5) Daya tampung luas : sehingga dapat menampung lebih panjang maupun banyak teks.
- 6) Fleksible : dapat dilakukan secara luwes kapan dan dimana saja.
- 7) Daya jangkau yang luas ; dapat diakses oleh seluruh kalangan dan dunia internasional.
- 8) Interaktif : dapat saling mengirim *feedback* (timbang balik) dalam kolom *chat* maupun komentar.
- 9) Terdokumentasi : informasi dapat tersimpan dalam bank data serta dapat ditemukan dengan fitur *search* maupun melalui *link*.
- 10) *Hyperlinked* : terkoneksi dengan sumber lain (*links*) yang masih relevan dengan informasi yang diberikan.

#### **b. Kekurangan Media Daring** .<sup>39</sup>

- a) Adiksi terhadap koneksi internet dan perangkat elektronik yang memadai. Apabila perangkat tidak tersedia layanan internet atau tidak adanya data koneksi maka tidak dapat terhubung dengan *browser*.
- b) Dapat disalin dan dioprasikan oleh orang lain. Dengan kemudahan akses maka informasi yang telah dipublikasikan dapat pula disalahgunakan oleh sembarang orang untuk dijadikan konten dalam medianya.
- c) Ketelitian kurang diperhatikan. Karena memperdulikan kecepatan terkadang ditemukan adanya salah dalam pengetikan.
- d) Dapat menyebabkan mata mudah lelah, karena membaca terlalu panjang.

#### **c. Macam – Macam Media Daring** .<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Asep Syamsul M. Romli, “*Jurnalistik Online ...*



**(1) Media daring berbentuk Situs pemberitaan :**

- (a) situs dari pemberitaan yang mengeluarkan majalah maupun surat kabar versi daring contohnya *pikiran-rakyat.com*, *harian Kompas*, *media-indonesia.com*, *seputar-indonesia.com*, *republika online* dan lain sebagainya.
- (b) situs berita daring dalam format radio seperti *rnw.nl* (radio Nederlan). *Radioaustralia.net.au* (radio milik Australia).
- (c) situs berita dari media penyiaran televisi diantaranya *kompasTv*, *metrotvnews.com*, *CNN.com* dan *Liputan6.com*.
- (d) situs media daring yang tidak terkait dengan media cetak maupun elektronik adalah *Kompas.com*, *medcom.id*, *antaranews.com*, *VIVA News*, dan *Detik.com*.
- (e) situs yang menyediakan tautan dari pemberitaan seperti *Google News*, *Yahoo! News*, *NewsNow* dan lain sebagainya.

**(2) Media daring berdasarkan website pemiliknya :**

- (a) website organisasai pemberitaan (*News Organization Website*) : laman lembaga pers atau versi daring dari surat kabar, radio, agen berita maupun televisi.
- (b) situs web organisasi komersial (*Comercial Organization Website*) : situs lembaga bisnis atau perusahaan seperti toko online, retailer, manufaktur dan lain – lain.
- (c) website milik pemerintah : pemerintah Indonesia memiliki ciri khas alamat situs beruta [dot] go.id. contoh *dpr.go.id*, *setneg.go.id* dan *indonesia.go.id*.
- (d) website kelompok seperti contoh situs ormas, lembaga swadaya masyarakat dan partai politik.
- (e) website orgaisasi non-profit : website komunitas atau lembaga amal.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Asep Syamsul M. Romli, “*Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online*”, Bandung : Nuansa Cendikia, 2020, hlm. 36-38.

<sup>41</sup> Asep Syamsul M. Romli, “*Jurnalistik Online ...*

(f) website pribadi (blog).

### C. Politik

Politik selalu ada disekitar kita dan hadir melekat pada kehidupan di lingkungan masyarakat. Baik sadar maupun tidak politik berpengaruh pada aktivitas kita secara kelompok ataupun pribadi masing – masing individu. Ahli filusf Yunani Aristoteles memberikan pengertian bahwa politik merupakan pengetahuan praktis yang memiliki tujuan pada aksi dibandingkan pada ilmu<sup>42</sup>. Dalam artian mengatur kegiatan yang seharusnya dilaksanakan dan dihindari dalam kehidupan. Manusia dimaknai sebagai makhluk politik (*Zoon Politicon*) yang dalam hakikatnya merupakan partisipan politik.

Politik erat kaitanya dengan kekuasaan, baik dalam penguasaan sebuah keluarga, kepercayaan maupun pada negara. Kekuasaan dapat dimaknai sebagai kemahiran untuk dapat mempengaruhi dan memimpin orang lain. Dalam keagaaman kekuasaan juga diartikan sebuah amanah yang terbagi menjadi 2 aspek,<sup>43</sup> yaitu 1) bertumpu pada kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan benar sesuai koridor dalam norma agama karena merupakan titipan. 2) bersandar pada beban tugas yang merupakan dampak dari amanah. Pertanggung jawaban ini tidak hanya di dunia saja melainkan diakhirat juga sehingga dalam bertugas selalu berperilaku lurus serta berhati – hati dalam pengambilan keputusan.

Penguasaan dalam sebuah negara dijabarkan dalam teori pemikiran terkenal yaitu Trias politika karya *Charles Louis de Scondant Baron de Montesquiue* atau yang biasa dikenal dengan *Montesquiue* mendistribusikan *separation of power* (pemisahan kekuasaan) dari sebuah negara<sup>44</sup>. Model kekuasaan macam ini tercetus dari sebuah prinsip bahwa kekuasaan sebaiknya

<sup>42</sup> Raimundus Bulet Namang, “ Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol. 4 No. 2 , (2020), 254.

<sup>43</sup> Samsul Wahidin, “*Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, 2.

<sup>44</sup> Samsul Wahidin, “*Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, 14-15.

tidak diserahkan pada orang yang sama atau satu orang saja, selain itu pembagian kekuasaan ini berfungsi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta agar pemusatan kekuasaan yang berpotensi korup, persis seperti apa yang diungkapkan oleh *Lord Acton* : manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalah-gunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*).<sup>45</sup>

Dalam bukunya yang berjudul *L'esprit des lois* (The Spirit of Laws), Montequieu mengemukakan bahwa pemisahan kekuasaan dalam kehidupan bernegara diharapkan akan menciptakan kesetaraan, bukan hanya di lingkup penduduk atau warga negara, melainkan dalam zona kuasa atau pemerintahan. Selain itu, pemisahan ini juga berfungsi untuk saling mengimbangi satu sama lain, serta pembatasan sehingga meminimalisir potensi kekuasaan yang sewenang-wenang. Indonesia juga menerapkan konsep kekuasaan macam ini. Pemilihan *trias politica* dalam model pemerintahan Indonesia bukan tanpa alasan, sebab pada dasarnya konsep ini merupakan representasi dari alinea ke empat UUD 1945 yang kurang lebih berbunyi : *melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*.

Modelnya pun sama, yakni membagi kekuasaan dalam tiga bidang, yakni *Legislatif* atau pencipta undang-undang, *Eksekutif* atau pelaksana undang-undang dan *Yudikatif* atau pengawas jalannya pelaksanaan undang-undang. Sisi *Legislatif* dalam pemerintahan Indonesia terdapat dalam diri DPR dan MPR, sementara sisi *Eksekutif*-nya ada di Presiden yang sekaligus kepala negara dan pemerintahan, terakhir *Yudikatif* yang dipegang oleh MA.

---

<sup>45</sup> Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 18 Nomor 2 (2016), 330.

Dalam pembagian kekuasaan tadi, tentu adanya pembagian tugas berdasarkan sisi kuasa tiap lembaga pemerintahan, hal tersebut terangkum dibawah ini :

### **1. Pembagian Kekuasaan secara Horizontal**

Pembagian kekuasaan secara horizontal merujuk menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Dalam UUD 1945, pembagian kekuasaan dalam model horizontal ini terlihat di pemerintahan pusat dan daerah. Dalam tingkat pemerintahan pusat, pembagian kekuasaannya berlangsung antar lembaga-lembaga negara sederajat, namun hal ini mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD 1945. Perubahan tersebut berupa pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang tadinya tiga jenis (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam, yaitu <sup>46</sup>:

#### **a. Kekuasaan Konstituf**

Yakni kekuasaan yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Sisi kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggotanya merupakan 100 orang yang diambil dari 460 anggota DPR, dengan penegasannya di Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya menyatakan bahwa MPR memiliki wewenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Lembaga konstituf sendiri adalah lembaga yang berwenang untuk mengganti, menambah, mengurangi, membuat dan menghapus sebagian atau seluruh perundang-undangan dalam konstitusi negara. Dalam hal ini hanya terdapat tiga negara yang memiliki serta menerapkan model kekuasaan macam ini secara permanen, yakni Indonesia, Iran dan Perancis. Sedangkan negara lain eksistensi lembaga ini kebanyakan masih bersifat sementara.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2018), hal. 175.

<sup>47</sup> Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2018), hal. 176.

Selain berwenang dalam mengatak-atik undang-undang, lembaga konstitutif di Indonesia (MPR) juga bertugas :

- 1) Melantik presiden dan wakilnya, yang terpilih berdasarkan hasil pemilu.
- 2) Memilih presiden dan wakilnya apabila terjadi kekosongan di dua jabatan tadi.
- 3) Memutuskan usulan DPR berdasarkan Mahkamah Konstitusi dalam memberhentikan presiden/wakil presiden di masa jabatan.

#### **b. Legislatif**

Legislatif ialah lembaga yang memiliki peranan sebagai pembuat peraturan (undang – undang). Dimana konsep legislatif muncul dari kata latin yaitu *Latum* yang dimaknai sebagai penerbit atau yang menghasilkan serta *Leges* jika diterjemahkan menjadi undang – undang. Dalam berbagai prakteknya di semua negara yang menerapkan, kekuasaan legislatif juga dikenal sebagai lembaga parlemen, yakni lembaga perwakilan rakyat. Didalamnya ada berbagai unsur kekuatan politik yang berdiri mewakili rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam model demokrasi untuk membuat suatu keputusan. Di Indonesia sendiri, kekuasaan ini berwenang membentuk undang-undang. Didalam kekuasaan ini terdapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang anggotanya terpilih melalui pemilu. Penegasan tentang kuasa DPR ini ada dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945, dimana DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Badan legislatif atau yang biasa disebut dewan perwakilan rakyat (DPR) ini merupakan orang – orang yang ditunjuk oleh rakyat untuk dapat melaksanakan tugas pemerintahan. Dalam hal ini timbullah sistem perwakilan sebagai pernyataan yang sah dari rakyat. Karena kedaulatan negara demokrasi kekuasaan tertinggi tetap dipegang oleh rakyat dan secara nyata seluruh rakyat tidak mungkin melakukan fungsi pemerintahan sendiri sehingga membutuhkan orang yang dapat

mewakilinya. Substansi dari wakil ini ialah menampung dan melaksanakan aspirasi yang diminta oleh masyarakat. Apabila seorang wakil tidak dapat menjalankan tugas atau sedikit keinginan rakyat yang dikehendaki maka tugasnya telah dianggap lalai atau gagal.<sup>48</sup>

### c. Yudikatif

Disebut juga sebagai kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang memiliki wewenang mengadili dan menyelenggarakan peradilan, penegakan hukum, keadilan serta mengadili pihak yang melanggar perundang-undangan. Dipegang oleh Mahkamah Agung dengan penegasannya ada di Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalamnya memuat pernyataan bahwa kekuasaan kehakiman berada ditangan Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya dalam lingkupan peradilan umum lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>49</sup>

### d. Eksekutif

Tahta eksekutif dipegang penuh oleh pemimpin negara dan wakilnya yang populer disebut presiden serta wakil presiden. Istilah presiden bersumber dari bahasa latin serta bahasa Perancis lama yaitu *praesidere, praesidens* bila diterjemahkan berarti memimpin<sup>50</sup>. Konsep memimpin ini bermakna, membimbing atau menuntun seseorang untuk mencapai tujuan bersama. Joseph C. Rost mengungkapkan pemikirannya tentang kepemimpinan<sup>51</sup> yang tertuang dalam buku Kepemimpinan

---

<sup>48</sup> Samsul Wahidin, “*Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, 33.

<sup>49</sup> Rika Marlina, “Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2018), hal. 175.

<sup>50</sup> Dody Nur Andriyan, “*Hukum Tata Negara dan Sistem Politik (Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia)*”, Yogyakarta : Deepublish, 2016, 63.

<sup>51</sup> Hasan Supriyadi, “Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia”, *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Dekomrasi* 6 : 2(2018),140.

Profesional : Pendekatan *Leadership Game* adalah sebuah relasi yang terhubung antara seorang pemimpin dan bawahannya untuk saling memengaruhi dan membuat perubahan secara nyata demi tujuan tertentu.

Presiden biasa dipergunakan sebagai nama jabatan kepada kepala pemerintahan atau kepala negara yang memiliki bentuk pemerintahan republik. Penegasan Presiden sebagai pemegang kekuasaan ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, didalamnya menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD.

Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945, Presiden memiliki kewenangan diantaranya :

- 1) Dalam pasal 10 undang – undang menyebutkan bahwa Presiden adalah pemimpin pasukan tertinggi dalam armada pertempuran. Dalam artian presiden mempunyai kuasa paling tinggi baik di satuan darat, laut maupun udara.
- 2) Pasal 11 disebutkan Presiden dapat memberikan perintah pernyataan perang, menciptakan perdamaian serta melakukan perjanjian dengan pihak lain atas kesepakatan dengan badan legislatif.
- 3) Presiden berwenang menjelaskan status negara dalam kondisi berbahaya.
- 4) Dapat memilih seseorang untuk menjadi konsul dan duta negara.
- 5) Dapat memberi tanda kehormatan, gelar maupun pemberian tanda jasa yang telah diatur oleh konstitusi.

Adapun hak dan kewajiban Presiden bertugas sebagai kepala pemerintahan adalah sebagai berikut <sup>52</sup>:

- a) Sesuai dengan undang – undang dasar 1945 presiden memegang kekuasaan dalam pemerintah.

---

<sup>52</sup> Septiana Rizco Nurfaizi, “Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasa Islam”, *Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18 No. 2 Desember 2020,236-237.

- b) Presiden mempunyai hak untuk mengemukakan RUU (rancangan undang – undang) kepada parlemen.
- c) Membuat PP (peraturan pemerintah).
- d) Menaati peraturan undang – undang serta melaksanakan segala konstitusi dan ketentuannya dengan baik berbakti pada bangsa dan negara.
- e) Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan mengacu pada keputusan mahkamah agung. Rehabilitasi ialah pengembalian kehormatan maupun nama baik seseorang yang telah dituduh secara tidak sah melakukan pelanggaran. Grasi merupakan pengampunan yang diberikan oleh kepala pemerintahan kepada seseorang yang melanggar hukum.
- f) Memberikan pembatalan tututan (abolisi) dan amnesi (pengurangan hukuman pidana) pada narapidana dengan pertimbangan dewan perwakilan rakyat (DPR).

#### **Syarat Menjadi Calon presiden**

Untuk menjadi pemimpin pasti akan ditentukan kapabilitas yang harus dimiliki oleh seorang calon pendaftar. Apalagi menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, sudah tentu telah dimasukkan kriteria khusus dalam undang – undang. Berikut kualifikasi yang harus dimiliki oleh kadidat calon presiden dan wakil presiden yang dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 mengenai pemilu (pemilihan umum) dalam pasal 169<sup>53</sup> :

- (1) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Definisi bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa disini ialah patuh mengerjakan kewajiban agama dan tumbuh dalam perlindungan serta anugerah berdasarkan keyakinan.
- (2) Merupakan warga negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) sejak lahir dan tidak pernah memilih kewarganegaraan lain atas

---

<sup>53</sup> Icha Ardiono, "Syarat Calon presiden dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Menurut Fiqih Siyasa", Skripsi, Banda Aceh : 2022, 33-36.



dorongan hati sendiri. Bakal presiden dan wakil presiden memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara yang sudah mengalami akulturasi adat istiadat, sifat – sifat budaya, serta kemurnian bangsa Indonesia dan juga mempunyai semangat cinta tanah air (patriotisme) serta berjiwa kebangsaan Indonesia.

- (3) Suami atau istri calon presiden dan wakil presiden ialah warga negara Indonesia.
- (4) Tidak pernah berkhianat terhadap negara dan tidak melakukan tindak pidana korupsi serta tidak kejahatan berat lainnya. Dalam artian tidak melanggar UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak bergabung dalam gerakan sparatisme, serta bersikeras mengubah dasar negara.
- (5) Berkemampuan secara jasmani dan rohani untuk mengerjakan kewajiban serta tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Sehat secara jasmani dan rohani dimaknai sebagai sehat dari segi spiritual, fisik, sosial dan juga mental sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- (6) Berkediaman di wilayah bangsa Indonesia.
- (7) Telah memberitahukan laporan harta kekayaan pada lembaga berwenang yang melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat negara. Disini calon presiden dan wakil presiden diwajibkan melaporkan seluruh harta benda yang dimiliki pada instansi terkait pengawasan kepemilikan harta.
- (8) Tidak dalam kondisi berhutang baik secara individu maupun yayasan yang merupakan tanggung jawabnya dan dapat merugikan keuangan negara.<sup>54</sup>
- (9) Menurut keputusan pengadilan tidak dalam kondisi mengalami kebangkrutan.

---

<sup>54</sup> Icha Ardiono, "Syarat Calon presiden dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 ...

- (10) Tidak pernah melakukan perbuatan yang bertolak belakang dengan norma dimasyarakat, adat, dan agama. Perbuatan tercela tersebut diantaranya seperti zina pemabuk, judi serta kecanduan narkotika.
- (11) Tidak dalam proses dicalonkan sebagai anggota dewan baik ditingkat pusat seperti DPR maupun di daerah (DPRD, DPD).
- (12) Telah tercatat sebagai pemilih dalam pemilihan umum.
- (13) Mempunyai NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan telah melakukan kewajiban membayar pajak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dibuktikan dengan surat laporan tahunan pajak penghasilan diri pribadi.
- (14) Belum pernah menjadi Presiden dan Wakil Presiden lebih dari 2 periode kekuasaan dengan jabatan yang sama. Ini berarti pasangan calon tidak diperkenankan menjabat sebagai kepala negara melebihi 2 kali masa jabatan baik secara beruntun atau dalam pemerintahan sebelumnya kurang dari 5 tahun berkuasa.
- (15) Bersifat setia kepada Undang – Undang Dasar tahun 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan juga Negara Republik Indonesia.
- (16) Berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang sah, pasangan calon tidak pernah dipidana penjara dengan masa hukuman 5 tahun maupun lebih.
- (17) Berumur sedrendah – rendahnya empat puluh (40) tahun.<sup>55</sup>
- (18) Memiliki riwayat pendidikan terendah ialah tamatan sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madsah aliyah (MA) maupun tingkat pendidikan lain yang sederajat yang telah ditentukan oleh peraturan undang – undang.
- (19) Bukan merupakan mantan anggota kelompok terlarang PKI (partai komunis Indonesia) maupun masih bergabung dan tidak berperan

---

<sup>55</sup> Icha Ardiono, "Syarat Calon presiden dan Wakil Presiden ...

secara langsung dalam pembantaian gerakan 30 September tahun 1965.

(20) Mempunyai visi dan misi serta program kerja dalam menjalankan pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

**e. Kekuasaan eksaminatif/inspektif**, yakni kekuasaan yang berkaitan dengan pemeriksaan dari pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara<sup>56</sup>. Dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>57</sup>

**f. Kekuasaan moneter**, yakni kekuasaan dalam penetapan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran serta memelihara kestabilan mata uang. Dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral sesuai dalam teks yang tercantum di Pasal 23 D UUD NKRI 1945, dimana negara memiliki sebuah bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.<sup>58</sup>

## 2. Pembagian Kekuasaan secara Vertikal

Dalam pasal 18 ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945, memuat pernyataan bahwa NKRI terbagi atas berbagai daerah provinsi. Provinsi-provinsi tadi kemudian terbagi atas kabupaten dan kota, dan tiap-tiap wilayah barusan memiliki pemerintahan yang disebut pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang. Menurut ketentuan, secara vertikal pembagian kekuasaan dalam negara Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara

<sup>56</sup> Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan..."

<sup>57</sup> Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2018), hal. 175

<sup>58</sup> Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam ..."

provinsi dan kabupaten/kota ini terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pusat dalam administrasi serta kewilayahan.

Adanya pembagian kekuasaan model vertikal ini adalah imbas diterapkannya asas desentralisasi. Asas tersebut membuat pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada daerah yang memiliki hak otonom (provinsi dan kabupaten/kota) atau kemampuan untuk mengurus dapur pemerintahan daerahnya kecuali sesuatu yang berhubungan langsung dengan pusat, yakni wewenang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal.<sup>59</sup>

Penegasan tentang hal ini ada di pasal 18 ayat (5) UUD NKRI Tahun 1945, didalamnya menyatakan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemberian hak otonomi pada daerah memiliki tujuan meningkatkan daya dan hasil guna, terutama dalam pelaksanaannya pada masyarakat maupun meningkatkan politik dan kesatuan bangsa yang stabil.<sup>60</sup>

#### **D. Intervensi Politik**

Berdasarkan buku dengan tajuk *Intervensi Negara Terhadap Agama (Studi Konvergensi Atas politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Agama Di Indonesia)*<sup>61</sup> menjelaskan bahwa intervensi merupakan tindakan campur tangan. Dalam karya tersebut menyinggung perkara ikut campur negara terhadap agama. Negara hanya berperan mencampuri persoalan terkait administrasi seperti alat, fasilitas serta barang maupun segala pendukung terselenggaranya kegiatan keagamaan. Pemerintah tidak berhak mengurus tentang tata cara maupun aturan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah. Hal ini sepadan

---

<sup>59</sup> Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2018), hal. 177.

<sup>60</sup> HAW Widjaja, "Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia", Jakarta : Rineka Cipta, 1998, hal. 147.

<sup>61</sup> Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, "Intervensi Negara Terhadap Agama (Studi Konvergensi Atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama Di Indonesia)", (Yogyakarta : UII Press), 2021, 10-13.

dengan peraturan undang – undang dan sila pancasila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dimaknai dengan membebaskan setiap rakyat untuk menganut kepercayaan masing – masing serta toleran dan rukun antar pemeluk agama.

Kata intervensi kerap kali diterapkan dalam persoalan politik luar negeri<sup>62</sup>. Dimana memiliki arti sebagai tindakan campur tangan suatu bangsa terhadap bangsa lain yang bukan termasuk kewenangnya. Usaha ini dapat masuk dalam ranah budaya, sosial, politik, kesehatan serta ekonomi dari negara lain. Sebagai contoh perlakuan intrvensi ialah melakukan pelarangan, melakukan penutupan jalur akses ke negara lain dan juga mengirimkan pasukan bersenjata (militer).

Selain itu, intervensi juga dapat ditafsirkan positif bilamana berbentuk seperti bantuan ekonomi, bantuan militer, bantuan pada saat bencana dan juga pernyataan himbuan maupun saran dari pemerintahan ke pihak lain. Contoh seperti yang dilakukan negara Amerika Serikat ketika menginvasi Vietnam, proses dimulai dengan *low intervention* (intervensi ringan) berbentuk pertolongan dalam lini ekonomi, alusista, kemudian propaganda, yang berujung pada tindakan kekerasan yaitu perang. Dalam perpolitikan intervensi dapat dijadikan upaya turut andil dalam aktivitas terkait kebijakan seperti misalnya ikut – ikutan mengurus proses penerimaan anggota, kenaikan jabatan,<sup>63</sup> usulan suatu peraturan dan lain sebagainya.

Bila dijabarkan dalam tabel bentuk intervensi dapat dibagi dalam 2 jenis yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Jenis intervensi

Intervensi Ringan	Intervensi Tinggi
-------------------	-------------------

<sup>62</sup> Andaru Satnyoto,” Justifikasi Intervensi Internasional Dalam Konflik Suatu Negara”, *Jurnal Asia Pasific Studies* Vol. 1, 2017, 211-212.

<sup>63</sup> Atika Verina, Nursyiwani Efendi, dan Aidinil Zetra,”Proses Intervensi Politik Pada Pengangkatan Sekertaris KPU Kota Padang”, *NUSANTRA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 6 No. 2, 2019, 273.

<i>(Low intervention)</i>	<i>(High intervention)</i>
1. Pernyataan / pidato <i>(speeches)</i>	1. Tindakan / perang terbatas <i>(limited military action)</i>
2. Siaran / propaganda <i>(broadcast)</i>	2. Perang / invasi militer <i>(military invasion)</i> <sup>64</sup>
3. Bantuan ekonomi <i>(economic aid)</i>	
4. Bantuan penasehat militer <i>(military advisors)</i>	
5. Bantuan terhadap oposisi <i>(support opposition)</i>	
6. Blockade territorial <i>(blockade)</i>	

Menurut penjelasan diatas dapat ditarik benang merah bahwa tindakan intervensi ialah perilaku ikut mencampuri, turut serta maupun turut berperan dalam kepentingan dari pihak lain yang seyogianya bukan merupakan tanggung jawab pribadinya.

Adapun contoh intervensi dalam pemberitaan yang diteliti antara lain pada judul Ini Alasan Jokowi Tak Undang NasDem ke Istana pada 4 Mei 2023 oleh reporter Indriyani Astuti. Dalam informasi tersebut terdapat pernyataan langsung dari Presiden Joko Widodo yang tidak mengikutsertakan partai yang diketuai Surya Paloh karena telah memiliki kerja sama politik sendiri sedangkan partai yang berdiskusi di Istana ingin membentuk koalisi politik yang baik.

*“Ya memang tidak diundang. NasDem itu ya, kita bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang*

<sup>64</sup> Andaru Satnyoto, ” Justifikasi Intervensi Internasional...

*baik,*”<sup>65</sup>ungkap Jokowi pada wartawan sesuai mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Kamis, 4 Mei 2023.

Dalam berita bertajuk Tak Cuma Cawe – Cawe, Heboh Jokowi Jadi Pembisik Nama Capres dan Cawapres yang dipublikasikan oleh Medcom.id pada 16 Mei 2023 oleh wartawan Adri Prima. Dalam teras berita berisikan isu ketidaknetralan presiden Jokowi menjadi perbincangan hangat dimasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya presiden dalam acara yang diprakarsai relawan Jokowi yakni Musyawarah rakyat (Musra).

Dalam kesempatan tersebut, presiden Jokowi menyatakan dirinya akan membrisiki partai – partai soal capres – cawapres usulan musra. Tidak cukup itu saja, Presiden Jokowi juga berniat kembali mengumpulkan ketua umum partai politik dalam waktu dekat usai menghadiri musra.<sup>66</sup>(Paragraf 2 berita).

Pada laman Kompas.com inervensi Jokowi terlihat pada berita dengan *headline* Panggil 6 Ketum Parpol ke Istana, Jokowi: Saya Bukan “Cawecawe” oleh wartawan Dian Erika Nugraheny, 04 Mei 2023. Berita tersebut menginformasikan adanya pertemuan presiden dengan 6 ketua umum partai pendukung pemerintah yakni PDI-P, Golkar, Gerindra, PAN, PPP serta PKB di Istana Merdeka. Hal ini menjadi pemicu munculnya isu turut andilnya presiden dalam mengurus bakal calon pemimpin selanjutnya. Dibuktikan dalam wawancara langsung dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

---

<sup>65</sup> Indriyani Astuti, “Ini Alasan Jokowi Tak Undang Nasdem Ke Istana” [ Berita Online Medcom.id 04 Mei 2023 19:42 WIB], tersedia di situs : <https://www.medcom.id/nasional/politik/MkMQDqyk-ini-alasan-jokowi-tak-undang-nasdem-ke-istana> diakses pada 14 September 2023, pukul 09:15 WIB.

<sup>66</sup> Adri Prima, “Tak Cuma Cawe – Cawe, Heboh Jokowi Jadi Pembisik Nama Capres dan Cawapres” [Berita Online Medcom.id 16 Mei 2023 00:21 WIB], tersedia di situs : <https://www.medcom.id/nasional/politik/yNL3349K-tak-cuma-cawe-cawe-heboh-jokowi-jadi-pembisik-nama-capres-dan-cawapres> diakses pada 14 September 2023, pukul 13:15 WIB.

*“Bukan cawe – cawe. Wong itu diskusi saja kok (disebut) cawe – cawe. Diskusi. Saya tadi sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Saya bukan cawe – cawe,”* Ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).<sup>67</sup>

*“Urusan capres, cawapres itu urusannya partai dan gabungan partai. Sudah bolak – balik saya sampaikan kan. Tapi, kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh – boleh saja,”* Kata Jokowi.

Berita dengan judul Soal Hasil Musra, PDI-P yakin Jokowi Dukung Ganjar Capres pada media Kompas.com diterbitkan pada 17 Mei 2023, reporter Nicholas Ryan Aditya. Teks berita memaparkan pernyataan dari ketua dewan pemenangan parai (DPP) partai PDI-P Said Abdullah dimana presiden turut hadir dalam pendeklarasian calon presiden Ganjar Pranowo yang diusung oleh partai dengan ciri khas kepala banteng tersebut.

*“Saya tidak mengerti kalau Pak Jokowi tidak mendukung Pak Ganjar. Pak Jokowi hadir di batu Tulis,”* kata Said Abdullah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/05/2023).<sup>68</sup>

## **E. Analisis Framing**

### **1. Definisi**

Berdasarkan buku karya Alex Sobur bertajuk Analisis Teks Media : Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing mendeskripsikan pembingkaiian (framing) ialah sebuah rancangan untuk menelusuri bagaimana seorang pers atau wartawan dalam meletakkan angel atau sudut pandang dari suatu peristiwa dituliskan dalam

<sup>67</sup> Dian Erika Nugraheny, “Panggil 6 Ketum Parpol Ke Istana, Jokowi Saya Bukan “Cawe-Cawe” [ Berita Online Kompas.com 04 Mei 2023 18:48 WIB], tersedia di situs : <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/04/18484061/panggil-6-ketum-parpol-ke-istana-jokowi-saya-bukan-cawe-cawe> diakses pada 15 September 2023, pukul 10:15 WIB.

<sup>68</sup> Nicholas Ryan Aditya, “Soal Hasil Musra PDI-P Yakin Jokowi Dukung Ganjar Capres” [Berita Online Kompas.com 16 Mei 2023 16:15 WIB], tersedia di situs : <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/17/16155281/soal-hasil-musra-pdi-p-yakin-jokowi-dukung-ganjar-capres#> diakses pada 15 September 2023, pukul 15:15 WIB.



pemberitaannya<sup>69</sup>. Analisis framing awal muncul pada tahun 1955 yang dipelopori oleh Beterson mendefinisikan framing adalah rangka yang mempunyai fungsi atau elemen pengakuan untuk mengatur pada pemikiran tentang kebijakan, politik maupun wacana serta memberikan pilihan – pilihan dasar sebagai penafsiran realitas. Kemudian oleh Goffman di tahun 1974 dikembangkan lagi menjadi *strips of behavior* atau merupakan sebuah bagian dari perilaku yang menuntun audiens dalam melihat kenyataan.<sup>70</sup>

Pada umumnya teori bingkai atau framing ialah metode yang dipergunakan untuk melihat *story telling* (bercerita) seorang wartawan terhadap realita.<sup>71</sup> Upaya cerita tersebut terlihat pada kepekaan melihat kejadian yang dibuat menjadi berita. Analisis bingkai merupakan analisa yang digunakan untuk melihat media mengkonstruksi sebuah peristiwa menjadi bahan pemberitaan. Sebuah fenomena dapat dimaknai berbeda – beda oleh perusahaan media. Teori framing telah banyak dimanfaatkan dalam literatur bidang komunikasi untuk penggambaran proses pemilihan dan penonjolan pada kategori tertentu dari sebuah peristiwa oleh media.

Contoh berita mengenai pembelian tiket pertandingan persahabatan antara tim nasional Indonesia melawan tim Argentina. Pada media okezone lebih menyoroti waktu habisnya tiket terjual, sedangkan dalam saluran viva lebih fokus terhadap keluhan masyarakat yang menyindir PSSI terhadap penjualan tiket tersebut. Terdapat 2 inti penting dari pembingkaiian berita tersebut yaitu, 1. pemilihan mana yang layak diliput dan tidak dimasukkan dalam berita (bagaimana kejadian diartikan), 2. Faktor pemilihan kata, gambar serta kalimat (bagaimana informasi dituliskan).

---

<sup>69</sup> Alex Sobur, "Analisis Teks Media : Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing", (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012), 162.

<sup>70</sup> Alex Sobur, "Analisis Teks Media : Suatu Pengantar..."

<sup>71</sup> Eriyanto, "Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media", (Yogyakarta : LKiS), 2002, 10.

Analisis framing termasuk dalam teori analisis teks yang memiliki ciri khas tidak sama dengan analisa isi kuantitatif.<sup>72</sup> Perbedaannya ialah pada analisis isi kuantitatif lebih menekankan konten (isi) dari suatu naskah atau pesan komunikasi. Sedangkan dalam metode framing yang menjadi titik fokus ialah bagaimana teks maupun pesan itu dibentuk. Sehingga, teori bingkai ini lebih memandang pembentukan maupun pengkonstruksian suatu relitas yang akan disuguhkan kepada audiens oleh wartawan dan organisasi media.

## **2. Ciri Khas Penelitian Framing : Paham Konstruksionis**

Analisa bingkai termasuk dalam paham konstruksionis. Paham ini dipromosikan oleh tokoh sosiolog interpretatif bernama Thomas Luckman beserta Peter L. Berger. Menurut Margaret M. Poloma,<sup>73</sup> Berger memandang peristiwa yang terjadi sehari – hari mempunyai aspek yang bersifat rasional dan individual. Manusia ialah perangkat yang berperan dalam membentuk realitas sosial. Dimana berbentuk faktual atau objektif yaitu, berdasarkan proses yang berasal dari luar dirinya (eksternalisasi) dan bersifat perorangan yang terjadi akibat proses yang ada dalam diri yang membentuk pemikiran subjektif.

Contoh kasus pada saat interaksi sosial ditemukan adanya tesis, antitesis dan sintesis. Berger memperhatikan penduduk (masyarakat) merupakan pembentukan dari kumpulan individu. Individu berfungsi sebagai penerapan dari masyarakat. Dimana antar keduanya saling berdialektika. Penduduk bukan merupakan hasil akhir melainkan sebagai proses reaksi yang sedang terwujud.

Dalam pemikiran kontrusionis, berita dimaknai sebagai bukan kejadian yang sebenarnya. Dimana kenyataan langsung dipindah dan dibuat sebagai pemberitaan. Namun informasi terbentuk karena adanya hubungan

---

<sup>72</sup> Eriyanto, “*Analisis Framing : Konstruksi ...*”

<sup>73</sup> Eriyanto, “*Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*”, (Yogyakarta : LKiS), 2002, 15.

dari wartawan dan fakta yang terjadi dilapangan. Antara keduanya saling berkolaborasi dan menjadi materi pemberitaan yang disebarluaskan.

### 3. Bingkai dan Ideologi Media

Dalam kaca mata riset media, masyarakat (audiens) dalam pemanfaatan saluran pemberitaan untuk memenuhi kebutuhannya terbagi menjadi 2 sifat. Pertama, audiens aktif ialah masyarakat yang secara aktif mencerna pesan yang diberikan oleh media. Mereka dengan selektif mencermati informasi apa yang dipelukan serta kurang dibutuhkan sehingga pengaruh media terhadap pengguna aktif menjadi terbatas. Kedua, audiens pasif, ialah khalayak yang bersikap statis (diam) dalam mengamati informasi. Audiens ini langsung mempercayai berita yang dihadirkan oleh media. Sehingga mereka mudah terpengaruh dengan apa yang terbit dimedia serta memiliki pengaruh besar dalam kehidupannya<sup>74</sup>.

Proses pembuatan berita sangat erat dengan aktivitas yang terjadi di ruang produksi pemberitaan yang menetapkan bagaimana wartawan diawasi serta didikte untuk menberitakan sebuah kejadian dalam sudut pandang tertentu. Selain itu terdapat satu pokok lain yang juga penting yang berkaitan dengan bagaimana informasi sebuah peristiwa ditempatkan dalam teks pemberitaan, yaitu bagaimana informasi tersebut dapat bermanfaat dan bermakna bagi audiens. Menurut Stuart Hall beserta kawan-kawannya memandang ini sebagai konstruksi media.

Media bertugas menafsirkan suatu kejadian nyata itu dijelaskan dengan gaya tertentu serta bagaimana realita itu dapat mudah dimengerti oleh khalayak. Penafsirannya bukan hanya pada kejadiannya saja melainkan turut mengatur siapa saja yang berperan dalam peristiwa tersebut (pelaku sosial). Adapun fungsi ideologi media dalam menafsirkan realitas yaitu media berguna sebagai mekanisme integrasi sosial<sup>75</sup>. Disini

---

<sup>74</sup> Rakhmat Kriyantono, “*Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*”, (Jakarta : Kencana), 2006, 200-201.

<sup>75</sup> Eriyanto, “*Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*”, (Yogyakarta : LKiS), 2002, 145.

media berkerja untuk menjaga dan mengawasi nilai – nilai dalam masyarakat dapat berjalan. Salah satu kuncinya adalah dalam bidang serta batasan budaya. Untuk dapat mempersatukan khalayak dalam tatanan yang sama, maka sebuah kejadian atau nilai tersebut harus dimaknai sesuai dengan perilaku dan apa yang diyakini dari kelompok untuk dapat diterima serya dipercayai keberadaanya.

Ideologi juga berkaitan dengan kepentingan pemilik media. Gurevitch dan Curran memandang bahwa hegemoni ideologi media dapat berpengaruh pada informasi yang disampaikan dan berdampak pada audiens<sup>76</sup>. Tidak hanya pada pesan, sang penguasa juga turut mengintervensi isi konten yang akan ditayangkan sesuai dengan kehendaknya. Dalam hal ini, maka dapat dimaknai bahwa khalayak sebenarnya telah diatur maupun digiring dalam pemilihan informasi atau pemberitaan.

#### **4. Konstruksi Realitas dan Peta Ideologi**

Peta ideologi berfungsi menggambarkan bagaimana kejadian dipandang dan didudukkan pada tempat – tempat tertentu. Sesuai dengan pandangan Matthew Kieren, yaitu berita tidaklah dibentuk dalam ruang hampa. Berita dihasilkan dari pemikiran (ideologi) yang mendominasi pada suatu wilayah kewenangan. Penegasan tersebut menolong untuk menerangkan bagaimana dunia disusun dan diberi tahu dalam sisi tertentu dalam realitas. Ideologi disini tidak hanya diartikan pada gagasan – gagasan besar saja namun juga dapat berupa pemaksaan maupun politik penandaan. Bagaiman melihat realitas dengan cara pandang tertentu, karena dalam prosesnya kita mempergunakan titik tertentu. Titik tersebut melukiskan bagaimana realitas diterangkan dalam kerangka berpikir tertentu.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Leonarda Johanes R.S, “Analisis Framing Pemberitaan Konflik Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Harian Media Indonesia Dan Koran Sindo”, *Jurnal E- Komunikasi* Vol. 1, No. 2, 2013, 85.

<sup>77</sup> Eriyanto, “*Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*”, (Yogyakarta : LKiS), 2002, 154.

John Hartley berpendapat bahwa teks berita memiliki kemiripan dengan karangan fiksi yaitu novel. Dimana terdapat dua penokohan yaitu penjahat dan pahlawan. Menurut Hartley dalam narasi pemberitaan memunculkan 2 pelaku. Media senantiasa mempunyai kecenderungan untuk menghadirkan dua sisi berbeda kemudian dipertentangkan. Mengapa dua sisi? Karena laporan yang baik ialah peliputan yang menunjukkan tanggapan dari dua orang yang berlawanan dan bersifat kontras. Disini bukan untuk menampilkan kedua komentar tersebut sama benarnya tetapi untuk merujuk pada dua sisi tersebut. Contoh kasus, adanya usulan untuk mengeluarkan Dekrit Presiden, pasti terdapat argumentasi yang pro dan kontra. Muncul dua sisi tidak hanya berhubungan dengan objektivitas tetapi juga secara luas memperlihatkan peta ideologi dan bagaimana suatu kejadian dipandang. Dua sisi tersebut bila dijabarkan dalam table ialah sebagai berikut :<sup>78</sup>

Table 2.2  
Gambaran 2 sisi dalam berita

Kami	Mereka
Baik	Buruk
Pahlawan	Penjahat
Stabil	Rusuh

(dikutip dari buku Eriyanto, Analisis Framing : Konstruksi Ideologi dan Politik Media, hlm 155)

Selanjutnya, bagaimana cara berpikir (ideologi) dapat dipandang dalam narasi berita? Kita dapat melihat politik penandaan yang dilakukan oleh media serta bagaimana penempatan diri dan penampilan sisi – sisi yang ada kedalam pemberitaan. Contoh berita peristiwa kemarahan Warga NU (Nahdhatul Ulama) Pasuruan mendapat kabar akan adanya usaha menurunkan pemerintahan Presiden Abdurahaman Wahid (Gus Dur) oleh parlemen di Jakarta.

<sup>78</sup> Eriyanto, “*Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*”, (Yogyakarta : LKiS), 2002, 154-155.

Mendengar informasi tersebut masyarakat Pasuruan menggelar aksi penebangan pohon yang berada disisi jalan. Berakibat pada lau lintas lumpuh total pada jalan utama di Pasuruan yang akan mengarah ke Bali. Media memiliki kacamata berbeda dalam memaknai peristiwa tersebut. ada yang beranggapan perbuatan masyarakat NU ini merupakan bentuk deomntrasi atau penrnnyataan ketidakadilan. Karena mereka tidak dapat bersuara secara langsung ke Jakarta, maka yang dapat dilakukan sebagai warga desa dan bodoh ialah melakukan tindakan tersebut di daerah.

Selain itu, ada juga media yang membungkus peristiwa itu dengan berbeda. Sikap masyarakat nahdliyin di Pasuruan menunjukkan tindakan anarkis yang tidak dapat ditoleransi. Proses politik telah berlangsung, sebgai warga negara yang baik seyogyanya dapat menghormati konstitusi yang ada di parlemen. Tindakan tersebut dapat ditafsir menjadi usaha pengancaman yang menakut – nakuti dengan aksi massa. Framing yang ditunjuk di media menampilkan ideologi apa yang mereka terapkan. Dua sisi jika dilampirkan dalam tabel ialah :<sup>79</sup>

Tabel 2.3

Gambaran 2 sisi bingkai cara pandang 1

<b>Masyarakat Nahdliyin Pasuruan</b>	<b>DPR</b>
Lugu	Pintar
Jujur	Culas
Tidak berpendidikan	Berpendidikan
Kami	Mereka

(dikutip dari buku Eriyanto, Analisis Framing : Konstruksi Ideologi dan Politik Media, hlm 156-157

<sup>79</sup> Eriyanto, “Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media”, (Yogyakarta : LKiS), 2002, 156-157.

Tabel 2.4  
Gambaran 2 sisi bingkai cara pandang 2

<b>Masyarakat Nahdliyin Pasuruan</b>	<b>DPR</b>
Tidak konstitusional Semaunya, memaksakan kehendak Memakai cara kekerasan Mereka	Konstitusional Sesuai aturan Tertib Kami

(dikutip dari buku Eriyanto, Analisis Framing : Konstruksi Ideologi dan Politik Media, hlm 156-157)

Tabel membuktikan adanya kontruksi yang bertolak belakang mengenai aksi masyarakat NU di Pasuruan. Konstruksi realitas membetuk penampilan yang kontras dari warga Pasuruan.<sup>80</sup>Sikap tersebut dinilai sebagai aksi yang spontan, lugu dan jujur. Namun juga dipandang sebagai perilaku yang tidak beraturan, anarkisme dan memaksakan kehendak. Adapun perlakuan anggota DPR daimaknai sebuah tindakan yang curang, sok pintar (*kminter*), tetapi juga dianggap bersikap menaati peraturan.

Menjadi pembahasan ialah bagaimana media memosisikan diri dalam perbedaan tersebut? dapat dilihat dari penempatan kata kami bertentangan dengan mereka itu diletakkan dalam narasi berita. Dari dua pihak yakni masyarakat Nahdliyin Pasuruan dan anggota DPR, mana yang dilihat sebagai sisi kami dan mana yang menjadi mereka oleh media?

Penempatan media berada diantara posisi tersebut dapat bermakna ganda. Pertama, bagaimana letak teks media dalam konstruksi relaitas. Kedua, bagaimana audiens dikonstruksi oleh media. Media hidup dalam aturannya yaitu ada penyimpangan dan consensus. Dari *mapping* (pemetaan) tersebut, diterangkan sikap yang baik, wajar dan layak serta tindakan yang kurang baik. Melalui pembagian itu, realitas dibuat berarti dalam warna pemberitaan. dalam pengkonstruksian realitas tersebut maka

<sup>80</sup> Eriyanto, "Analisis Framing : Konstruksi, ...

orientasi media tidak hanya dari sisi kejadiannya saja melainkan juga memperhitungkan penerimaan dari khalayak, karena kembali lagi bahwa berita bukanlah ruang yang kosong, tetapi ia seperti cerita yang menyapa dan mengajak berdialog para pembaca.

Berita bukanlah informasi yang berdialog untuk dirinya sendiri (wartawan), melainkan ia mengajak audiens untuk dapat berdialog. Proses dialog dan penyapaan ini secara tersirat menempatkan khalayak pada peta ideologi tertentu. Wartawan ketika melaporkan sebuah peristiwa, ia bukan hanya membuat kejadian itu bisa dipahami tetapi juga harus memperhatikan audiens yang akan menjadi pembaca narasi tersebut. Sehingga, ketika berita dikonstruksi bukan hanya kejadiannya saja yang ditegaskan dalam peta ideologi melainkan audiens juga terletak dalam ideologi tertentu tersebut<sup>81</sup>. misalnya dalam laporan kekerasan seksual. Media tidak hanya menerangkan kejadian kekerasannya saja, tetapi khalayak juga dilibatkan untuk menyetujui atau tidak tindakan kekerasan seksual tersebut.

## 5. Efek Framing

Analisis bingkai berhubungan erat dengan bagaimana sebuah media memframe sebuah informasi yang akan disajikan kepada khalayak. Dimana realita sosial yang bersifat mempunyai banyak dimensi, tidak beraturan serta kompleks dapat disusun menjadi pemberitaan yang sederhana, mudah dimengerti, logis dan tertata rapi. Framing membantu audiens untuk dapat memahami informasi yang tersaji dengan mengkategorikan atau mencitrakan yang dikenal oleh publik.<sup>82</sup> Sehingga audiens bukan mengambil pemberitaan yang rumit melainkan yang kontekstual, berarti, tinggal ambil dan sudah diketahui dalam benak mereka. Dari penjelasan ini saja sedikit tergambar efek apa yang akan muncul dari adanya framing.

---

<sup>81</sup> Eriyanto, "Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media", (Yogyakarta : LKiS), 2002,157-158.

<sup>82</sup> Eriyanto, "Analisis Framing : Konstruksi, ...



Dalam buku yang berjudul *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Eriyanto menjelaskan terdapat 4 efek yang timbul dari framing diantaranya adalah :<sup>83</sup>

- a. **Menonjolkan aspek tertentu** – Mengaburkan aspek lain. Baik secara sadar maupun tidak informasi yang diperoleh oleh masyarakat akan mengarahkan kepada fokus tertentu. Sehingga dapat berakibat adanya informasi yang sangat menonjol serta fakta lain yang kurang mendapat perhatian mengalami pengaburan. Contoh saja dalam berita politik pasti yang dibahas adalah kepentingan, koalisi, dan partai, dalam hal lain mengabaikan aspek seperti sosial, politik dan lain – lain.
- b. **Mendefinisikan realitas tertentu** – Melupakan definisi lain atas realitas. Framing menolong khalayak dapat menafsirkan realitas yang kompleks dan dinamis menjadi informasi yang mudah dipahami, tinggal ambil serta beraturan. Ini merupakan konstruksi dimana media memandang suatu kejadian dengan kaca mata tertentu, kemudian ditafsirkan ke dalam informasi yang dikenal oleh masyarakat.
- c. **Menampilkan sisi tertentu** – Melupakan sisi lain. Dalam hal ini framing media memilih menampilkan sisi yang lebih banyak menarik perhatian sehingga menanggalkan sisi lain. Misalnya dalam peliputan dalam peristiwa demonstrasi mahasiswa, pasti yang menjadi fokus adalah anarkisme yang terjadi seperti adanya aksi saling dorong, pengrusakan fasilitas publik dan lain sebagainya. Melupakan sisi lain diantaranya adanya kemacetan akibat penutupan jalan, akses publik yang dikurangi atau bahkan tuntutan yang diberikan tidak menjadi sorotan perhatian.<sup>84</sup>
- d. **Menampilkan aktor tertentu** – Menyembunyikan aktor lain. Acap kali dalam pemberitaan dijumpai pemusatan informasi pada salah satu narasumber, dan menyembukan informan lain yang relevan dengan

---

<sup>83</sup> Eriyanto, “*Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*”, (Yogyakarta : LKiS), 2002, 167 -168.

<sup>84</sup> Eriyanto, “*Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan ...*

topik yang sedang dibahas. Contoh kasus berita pembunuhan polisi oleh polisi. Aktor yang selalu menjadi sorotan adalah sang pemimpin (Ferdinand Sambo) dan eksekutor (Briptu Richad Eliezer) sedangkan aktor yang lain seperti Ibu Putri, Bripka Riki Rizal, serta Kuat Maruf hanya menjadi informasi tambahan pada kasus tersebut.

## 6. Analisis Framing Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki

Pan dan Kosicki dalam karya mereka yakni "*Framing Analysis : An Approach to News Discourse*" menerapkan 4 unit struktural dari teks berita sebagai elemen framing yaitu retorik, skrip, sintaksis dan tematik. Teori ini beranggapan bahwa setiap informasi atau pemberitaan memiliki bingkai yang berfungsi untuk pusat organisasi ide. Model ini juga merupakan transformasi dari analisis wacana milik Van Dijk.

Menurut Pan dan Kosicki terdapat 4 perangkat yang digunakan dalam menganalisis data, diantaranya :

### 1) Perangkat Sintaksis

Sintaksis menunjukkan pada pengertian susunan dari bagian berita seperti *headline*, *lead*, latar informasi, sumber, kutipan sumber, dan penutup dalam satu kesatuan teks berita secara keseluruhan. Bagian itu tersusun dalam bentuk tetap dan teratur sehingga membentuk rancangan yang menjadi pedoman bagaimana fakta hendak disusun. Bentuk sintaksis yang paling populer adalah struktur piramida terbalik. Dimana peletakan informasi penting berada pada awal berita serta yang kurang penting ada pada bagian akhir pemberitaan. Adapun rangkaian dari aspek sintaksis adalah sebagai berikut :

- a. *Headline* atau biasa dikenal dengan judul berita merupakan aspek awal dalam melihat informasi. Dari headline dapat menjadi penekanan tertinggi yang akan ditunjukkan dalam berita. Khalayak lebih banyak memandang judul dibandingkan *body* maupun isi dari berita<sup>85</sup>. Secara fungsi headline memiliki peranan yang penting dalam

---

<sup>85</sup> Eriyanto, "*Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*", (Yogyakarta : LKiS), 2002,296-297.

*freaming*. Berawal dari judul akan membawa bagaimana seorang wartawan akan membentuk suatu peristiwa untuk diinformasikan kepada audiens.

- b. *Lead* maupun teras berita merupakan *point of view* dari wartawan mengenai kejadian yang terjadi serta dituliskan dalam paragraf awal beritanya. Pada umumnya menyajikan unsur berita 5w + 1h.
- c. Latar informasi ialah sisi berita yang memiliki fungsi berpengaruh pada penafsiran yang ingin dituliskan oleh wartawan. Saat membuat berita wartawan akan menyajikan latar belakang atas kejadian yang ada. Latar akan menunjukkan akan dibawa kemana sudut pandang audien akan digiring.
- d. pengutipan sumber berita adalah bagian yang menampilkan pernyataan dari narasumber yang memiliki kewenangan atau kompetensi atas informasi yang diberitakan. Sehingga semakin memperkuat fakta dan tidak omong kosong. Ini menandakan bahwa berita yang dipublikasikan memiliki objektivitas dimana bukan hanya pendapat dari wartawan saja serta menerapkan prinsip *balance* (keseimbangan).

## 2) Perangkat Skrip

Bentuk umum dari struktur skrip ialah 5W + 1H yang merupakan unsur pertanyaan yang ada dalam berita (*who, what, where, why, when* dan *how*). Meskipun pola ini tidak selalu dapat dijumpai dalam setiap berita yang ditampilk, kategori informasi ini diharapkan diambil oleh wartawan untuk dilaporkan karena menjadi penanda bingkai yang penting. Skrip merupakan salah satu taktik wartawan dalam bertutur maupun menceritakan peristiwa yang terjadi.

## 3) Perangkat Tematik

Struktur tematik dapat diamati dari bagaimana kejadian itu diungkapkan atau dibuat oleh wartawan. Jika struktur sintaktis berhubungan dengan pernyataan bagaimana informasi yang diambil oleh wartawan akan ditempatkan pada rancangan atau bagian berita, maka

tematik berkaitan dengan bagaimana fakta itu ditulis, bagaimana kalimat yang dipakai, bagaimana menempatkan dan menulis sumber ke dalam berita secara keseluruhan. Perangkat tematik juga berkaitan dengan gaya wartawan dalam mengungkapkan perspektifnya atas kejadian yang terjadi dalam bentuk kalimat, proposisi, pertalian antar kalimat yang membentuk teks berita secara keseluruhan,

#### 4) Perangkat Retoris

Aspek retorik menggambarkan pilihan gaya atau kata yang diseleksi oleh wartawan untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan. Struktur retorik dari wacana berita juga menunjukkan kecenderungan bahwa apa yang disampaikan merupakan kebenaran. Elemen retorik meninjau penggunaan idiom, grafik, pilihan kata, dan gambar untuk memberikan penekanan pada makna tertentu.<sup>86</sup>

Tabel 2.5

#### 4 Susunan Perangkat Besar Teori Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.<sup>87</sup>

Susunan Perangkat	Perangkat	Hal Yang Diamati
<b>Sintaksis</b> (Bagaimana Wartawan Menyusun Fakta)	a. Kerangka Berita	<i>Headline</i> , kutipan sumber, <i>lead</i> , latar informasi, penutup.
<b>Skrip</b> (Bagaimana Wartawan Menceritakan Fakta)	b. Kelengkapan Berita	5 W + 1 H ( <i>what, where, who, when, why</i> dan <i>how</i> ).
<b>Tematik</b> (bagaimana Wartawan Menuliskan Fakta)	c. Detail d. Hubungan antar bagian	Proposisi, paragraf, hubungan antar kalimat, kalimat.

<sup>86</sup> Alex Sobur, "Analisis Teks Media (Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, ...

<sup>87</sup> Eriyanto, "Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media", (Yogyakarta : LKiS), 2002, 256.

	berita / Koherensi e. Bentuk kalimat f. Kata ganti	
<b>Retoris</b> (Bagaimana Wartawan Menonjolkan Fakta)	g. Leksikon h. Grafik i. Metafora	Kata, idiom, grafik, gambar atau foto.



## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan pengkajian terpenting dalam sebuah penelitian, yang dipergunakan sebagai alat untuk menggali data – data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ialah proses penelitian untuk memahami peristiwa – peristiwa sosial dengan mendeskripsikan maupun menggambarkan secara menyeluruh dan kompleks yang ditampilkan dalam bentuk ungkapan terinci yang diperoleh dari narasumber, kata – kata, serta dilakukan dalam latar yang natural atau alamiah.<sup>88</sup> Adapun tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk dapat memahami dengan mudah sebuah fenomena maupun fakta dan memungkinkan untuk dapat menghasilkan hipotesis baru.<sup>89</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini penulis akan menyajikan dalam bentuk kualitatif deskriptif yang dapat dimaknai sebagai prosedur data berbentuk lisan atau tertulis dari hasil penelusuran suatu objek yang dapat diamati dan pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menggambarkan maupun mendeskripsikan. Data yang disajikan berupa fakta sebenarnya dari suatu yang diteliti. Peneliti mencatat dengan cermat data yang berupa wacana, kata – kata, kalimat dan lainnya. Pengumpulan data pun berupa teknik dokumentasi yang berasal dari berita mengenai keikutsertaan Presiden Joko Widodo dalam pengurusan bakal capres 2024 pada saluran Medcom.id dan Kompas.com.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam studi kepustakaan sehingga lokasi pengamatan adalah perpustakaan serta media Medcom.id dan Kompas.com.

---

<sup>88</sup> Walidin, W., Saefullah, & Tabrani, “*Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*”, FTK Ar-Raniry Press, 2015.

<sup>89</sup> Hutter, Bailey, A & Hennink M., “*Qualitative Research Methods*”, Sage Pub, 2020.

Dengan kurun waktu yang dipergunakan untuk penelitian yaitu berjalan dari bulan Mei – Desember 2023.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek yang akan diteliti ialah berita berjenis *straight news* mengenai pemberitaan politik Presiden Joko Widodo yang turut intervensi permasalahan bakal calon presiden untuk pemilihan umum 2024. Dimana objek penelitiannya merupakan bingkai pemberitaan terhadap hal tersebut yang telah dipublikasikan dalam kanal berita *online* oleh Medcom.id serta Kompas.com dengan kurun waktu 2 minggu (4 – 17 Mei 2023). Dalam pemantauan dengan durasi tersebut diperoleh kurang lebih 22 berita langsung, kemudian dari masing – masing saluran media tersebut dipihih 5 informasi yang akan diteliti.

### D. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer didefinisikan oleh Umi Narimawati adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau asli<sup>90</sup>. Data primer dapat berasal kelompok fokus. Internet, dan responden individu. Dalam hal ini, data primer yang digunakan ialah teks berita yang telah diterbitkan oleh media online Kompas.com dan Medcom.id yang akan dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan model framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Proses pencarian data dilakukan dengan mengakses situs *internet* pada kanal berita Medcom.id dan Kompas.com, kemudian mengklasifikasi teks yang termasuk dalam berita *staright news* politik Presiden Jokowi dalam pengurusan bakal calon presiden 2024 menjadi satu berkas.

#### 2. Data Skunder

Merupakan data yang diperoleh dari dokumen – dokumen grafis (table, catatan, notulen, rapat dan lain-lain), foto, film, rekaman, video,

---

<sup>90</sup> Umi Narimawati, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi*”, Bandung : Agung Mulia 9., 2018, 98.

benda dan lain sebagainya yang memperkaya data primer<sup>91</sup>. Bahan Skunder penelitian ini ialah bersumber dari artikel, jurnal, buku – buku maupun skripsi pendahulu yang masih memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis akan melakukan teknik pengumpulan data yaitu berupa studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini dilakukan untuk menghimpun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pengumpulan ini juga bertujuan untuk mendapatkan data primer dan skunder yang dijadikan tinjauan pustaka serta bahan analisa.

Pengumpulan data dalam riset ini dilakukan dengan membuka laman *website* Medcom.id dan kompas.com serta mencari topik berita penelitian. Dalam hal ini, peneliti fokus mengulas tentang berita politik presiden Jokowi yang turut melakukan intervensi dalam penentuan bakal calon presiden. Selanjutnya, melakukan pembacaan terhadap analisis framing milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki secara berulang – ulang, untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisa. Kemudian dilakukan penghimpunan berita yang akan diteliti menjadi satu *file* dan mencatat poin – poin yang relevan antara framing media mengenai berita yang dipublikasikan dengan permasalahan yang diamati.

#### **F. Analisis Data**

Kegiatan penganalisaan data merupakan proses pengolahan, pengumpulan, serta pengorganisasian dari data yang telah diperoleh untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. Analisis data yang akan digunakan dalam penelusuran ini ialah analisa teks media berupa teori bingkai milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

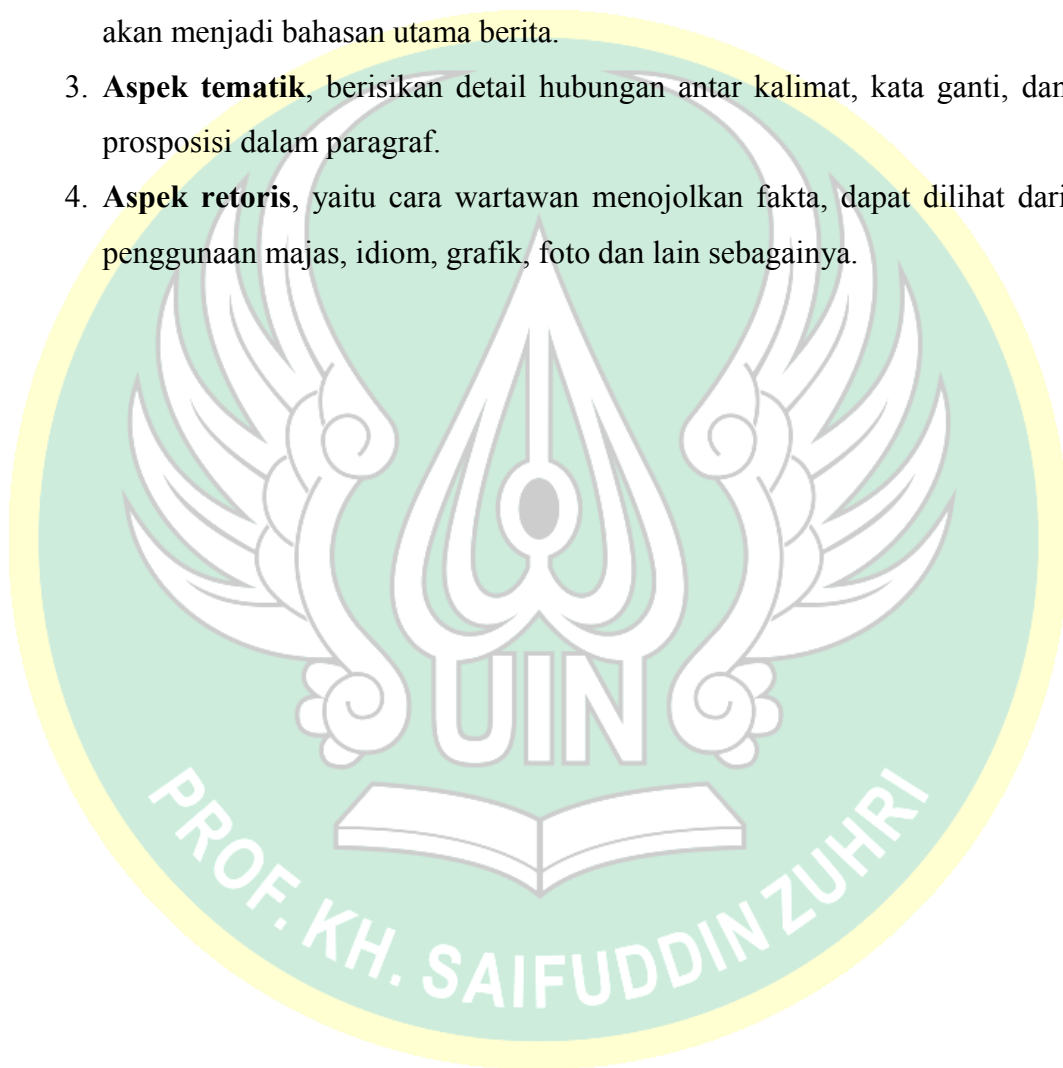
---

<sup>91</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015, 28.



Dalam analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki ini, terdapat 4 aspek yang akan diteliti dalam satu pemberitaan diantaranya<sup>92</sup> :

1. **Aspek sintaksis**, yaitu menjelaskan rangka berita mulai dari judul, teras berita (*lead*), petikan sumber, latar informasi , pernyataan hingga penutup.
2. **Aspek skrip**, ialah yang akan mendeskripsikan bagaimana seorang wartawan menceritakan fakta, sehingga terjadi pemilihan informasi yang akan menjadi bahasan utama berita.
3. **Aspek tematik**, berisikan detail hubungan antar kalimat, kata ganti, dan prosposisi dalam paragraf.
4. **Aspek retorik**, yaitu cara wartawan menojolkan fakta, dapat dilihat dari penggunaan majas, idiom, grafik, foto dan lain sebagainya.



---

<sup>92</sup> Eriyanto, “*Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*”, (Yogyakarta : LKiS), 2002, 256.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Medcom.id

#### 1. Sejarah Berdiri dan Logo Medcom.id

Medcom.id ialah portal media daring yang terfokus dalam informasi maupun pemberitaan yang sedang hangat diperbincangkan oleh khalayak ramai. Mulai terbit pada 25 November 2017 dan diresmikan langsung oleh Surya Paloh sebagai Pemimpin Perusahaan Media Group, Medcom. Id juga merupakan turunan dari Metro Tv. Menampilkan diri sebagai *News Video Portal* medcom.id hadir bukan hanya menyediakan gambar dan juga teks, namun juga audio, videografis, video serta grafis yang berwujud sebagai multimedia konten.<sup>93</sup>

Melalui sajian visual yang terisi padat dari naskah – naskah yang diulas secara intens dan laporan investigasi yang disajikan dengan kerangka yang menyeluruh serta bahasa yang mudah dipahami, diharapkan audiens dapat menerima informasi yang melimpah, serta menginspirasi. Selain itu, publik juga diinginkan bisa dengan mudah memahami persoalan yang rumit serta dapat menjadi pilihan sebagai jembatan referensi dalam menentukan sesuatu.

Dalam website Medcom.id tersaji pemberitaan *soft* dan *hard news* dalam berbagai layanan seperti pada kolom *lifestyle* berisi tentang poperti, gaya, teknologi, hiburan dan otomotif. Pada bagian *news* tertera informasi yang mengulas tentang pendidikan, olahraga, ekonomi maupun berita dari dalam maupun luar negeri. Tersedia pula kabar yang tengah hangat dan banyak menyedot perhatian dalam layanan *hype & viral*. Serta rubrik lain seperti cek fakta, foto, *video*, grafis, pilar dan juga fitur menonton siaran langsung (*streaming*) milik Media Group diantaranya Metro Tv, BN Channel, Magna Channel, serta MetroGlobe.

---

<sup>93</sup> Tentang kami Medcom.id <https://www.medcom.id/tentangkami> diakses pada tanggal 04 Agustus 2023 pukul 10:00 WIB.



Gambar 4.1

Logo Medcom.id

## 2. Visi Misi

Medcom.id memiliki visi untuk dapat menjadi pintu gerbang pemberitaan berbasis video (*news video portal*) yang dipilih oleh publik sebagai bahan rujukan melalui informasi yang tersaji, konten yang interaktif serta lekat dengan masyarakat. Sehingga audiens dapat terinspirasi dan juga tercerahkan.

Selain visi medcom. Id juga mempunyai misi diantaranya, ialah :<sup>94</sup>

- a. Membagikan informasi lewat naskah yang mendalam, teliti, menyeluruh dengan konteks dan aktual serta faktual yang disajikan secara renyah.
- b. Menghadirkan pencitraan yang memikat dan mudah dimengerti oleh khalayak sebagai bahan edukasi yang bermanfaat.
- c. Menayangkan konten - konten yang inspiratif dan juga interaktif bagi masyarakat.
- d. Sebagai pangkal landasan publik untuk memperoleh informasi terbaru.
- e. Sebagai media digital yang mempublikasikan berita dengan cepat namun tetap mempertahankan kaidah kejournalistikan.
- f. Mempersembahkan program – program yang edukatif, inspiratif dan juga bermanfaat.

## 3. Konten Medcom.id

- a. OSC (Online Scholarship Competition) ialah invitasi beasiswa berbasis daring yang telah ada sejak tahun 2015 dan juga merupakan pionir penyelenggara scholarship yang dibentuk oleh Surya Edukasi Bangsa Foundation berkolaborasi dengan saluran berita Medcom.id. *Online Scholarship Competition* (OSC) menampakkan diri sebagai alternatif

---

<sup>94</sup> Sasa Laras Supriyatin, “Strategi Divisi Cek Fakta Medcom.id Melawan Hoaks Isu Agama Dalam Dakwah Ramzi”, Skripsi, Jakarta, 2020.

bagi putra putri bangsa agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi yaitu S1 dan S2 ke kampus impian di Indonesia.

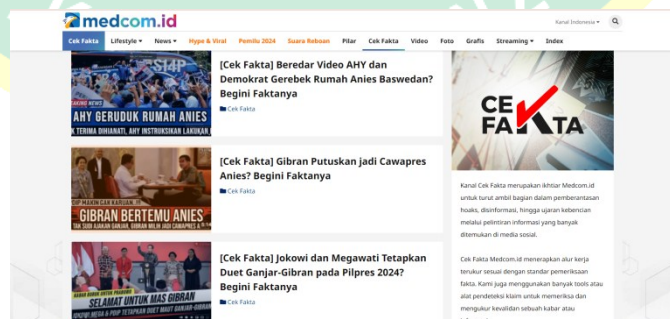
Medcom.id berkerja sama dengan kurang lebih 21 universitas swasta unggulan di Indonesia yang tersebar di 8 kota besar yakni Yogyakarta, Malang, Bandung, Jakarta, Bali, Makassar, Surabaya dan Semarang diharapkan dapat mendorong para siswa dan siswi yang berprestasi dari beragam lapisan masyarakat agar dapat mengenyam pendidikan tinggi serta untuk mendukung program Indonesia maju dengan sumber daya manusia yang unggul melalui adanya pemerataan pendidikan.



Gambar 4.2

Format Konten OSC<sup>95</sup>

- b. Cek Fakta ialah kolom pemberitaan yang fokus untuk meminimalisir derasnya informasi yang terjadi karena dimudahkan oleh teknologi, medcom.Id berupaya untuk membasmi adanya disinformasi, *hate speech* dan pemberitaan palsu.

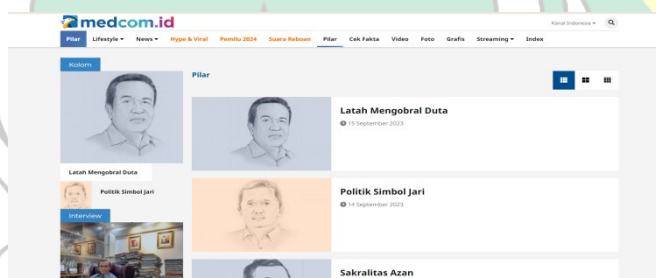


Gambar 4.3

<sup>95</sup> Program Medcom.id <https://osc.medcom.id/beasiswa> diakses pada tanggal 16 September 2023 pukul 05:00 WIB.

Format konten Cek Fakta<sup>96</sup>

- c. *Pilar* adalah kolom berita editorial berupa opini bebas tentang peristiwa yang sedang banyak diperbicarakan masyarakat menggunakan standar bahasa yang khas serta istilah yang tersirat seperti contoh dalam judul *Latah Mengobrol Duta* menjelaskan fenomena pelabelan pada *publik figure* maupun tokoh terpandang yang tengah tersandung kasus namun dinegri ini malah dijadikan sebagai agen promosi dari persoalan tersebut. Misalnya, Zaskia Gotik yang menghina lambang Garuda sebagai bebek nungging menjadi duta Pancasila, dan kasus terbaru Wulan Guritno yang akan dijadikan duta judi *online*.



Gambar 4.4

Format Konten *Pilar*

3. *Lifestyle* yaitu rubrik pemberitaan yang berisi tentang gaya hidup diantaranya otomotif, *fashion*, teknologi, *entertainment*, dan juga properti.



Gambar 4.5

Format Konten *Lifestyle*

- d. *News* merupakan kolom berita yang memuat informasi baik dari dalam negeri, internasional maupun membahas topik yang menarik perhatian audiens seperti olahraga, pendidikan maupun tentang ekonomi.

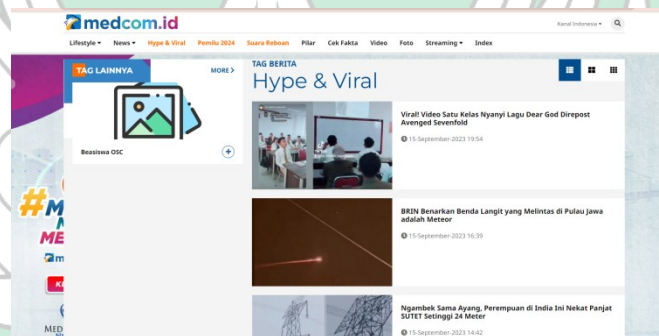
<sup>96</sup> Program Medcom.id <https://www.medcom.id/cekfakta/> diakses pada tanggal 16 September 2023 pukul 05:30 WIB.



Gambar 4.6

Format Konten *News*<sup>97</sup>

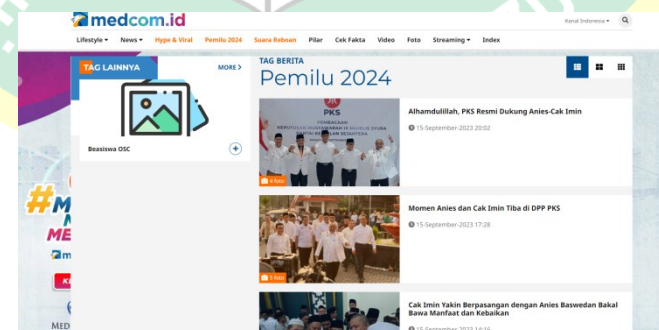
e. *Hype & Viral* adalah konten berita yang membahas topik yang sedang berkembang serta populer di masyarakat. Biasanya mengangkat pemberitaan yang aneh, belum pernah terjadi sebelumnya, dan menarik perhatian.



Gambar 4.7

Format Konten *Hype & Viral*

f. *Pemilu 2024* ialah pemberitaan yang fokus membahas seputar peristiwa yang terjadi menjelang, saat maupun setelah pemilu 2024.

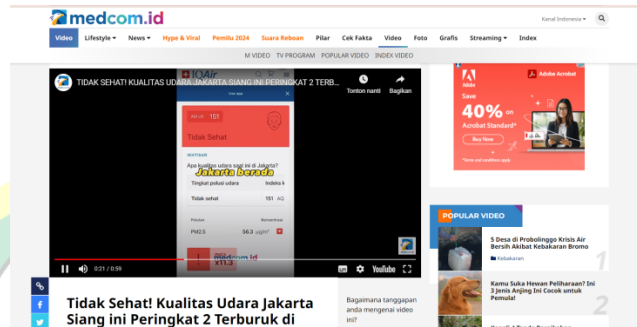


Gambar 4.8

<sup>97</sup> Program Medcom.id <https://www.medcom.id/nasional/> diakses pada tanggal 16 September 2023 pukul 05:45 WIB.

Format Konten Pemilu 2024<sup>98</sup>

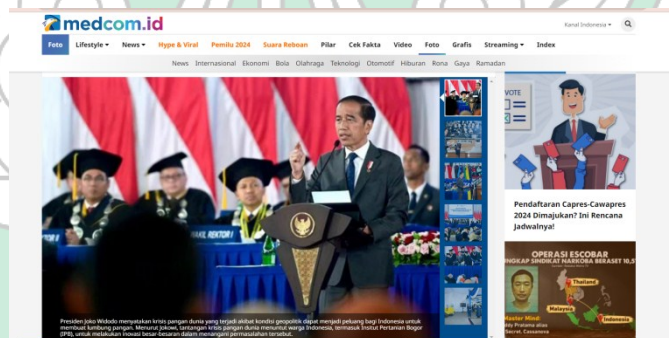
- g. Video adalah format tampilan informasi yang berbeda dimana tidak hanya berisikan teks tetapi disisipi juga dengan video untuk mendukung peristiwa yang menjadi pembahasan.



Gambar 4.9

## Format Konten Video

- h. Foto yaitu bentuk penyajian berita dengan menambahkan foto jurnalistik untuk menguatkan pesan informasi yang akan disampaikan.



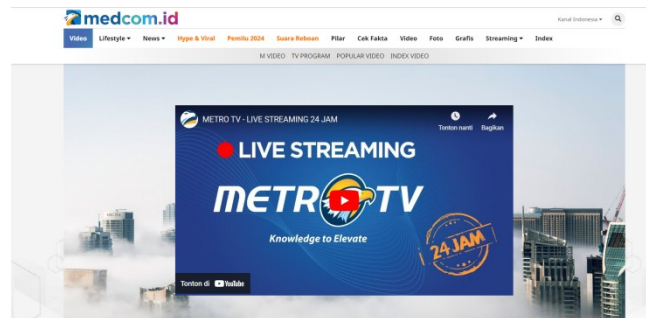
Gambar 4.10

Format Konten foto<sup>99</sup>

- i. *Streaming* merupakan kolom penyedia siaran langsung dari media yang masih terafiliasi dengan medcom.id diantaranya Metro Tv, Magna Channel, MetroGlobe, dan BN Channel.

<sup>98</sup> Program Medcom.id <https://www.medcom.id/tag/16179/pemilu-2024> diakses pada tanggal 16 September 2023 pukul 05:50 WIB.

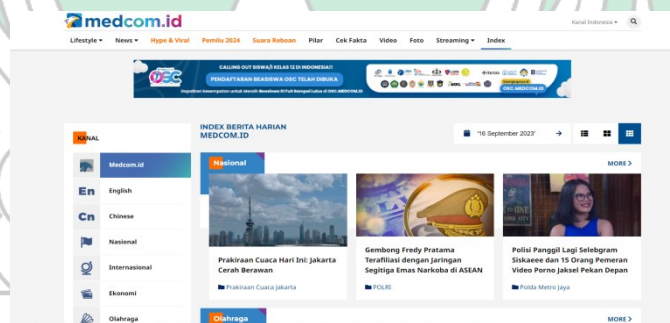
<sup>99</sup> Program Medcom.id <https://www.medcom.id/foto/> diakses pada tanggal 16 September 2023 pukul 06:00 WIB.



Gambar 4.11

Format Konten *Streaming*

- j. Index merupakan program yang menampilkan daftar berita yang menjadi sorotan dihari itu disajikan beserta menjadi ringkasan kanal – kanal yang dibutuhkan seperti kanal English, Chinese, ekonomi, olahraga, Internasional, nasional dan lain sebagainya.



Gambar 4.12

Format Konten Index<sup>100</sup>

### 3. Struktur Tim Medcom.id

No.	Posisi	Nama
1.	<i>Editor in Chief</i>	Indra maulana.
2.	<i>Content Manager</i>	Wandi Yusuf, Githa Farahdina, Achmad Firdaus, Win Muhammad Adab.
3.	<i>Head Desk</i>	Agustinus Shindu Alpito, M. Mamduh, Misbahol Munir,

<sup>100</sup> Program Medcom.id <https://www.medcom.id/index/>, diakses pada tanggal 16 September 2023 pukul 06:00 WIB.



		Ade Hapsari, Rosa Anggreti, Fajar Nugraha, Al Abrar, Citra Larasati, Alfa Mandalika, Yatin Suleha, Surya Perkasa dan Wanda Indana.
4.	<i>Assignment Editor</i>	Fauzan Hilal, Ahmad Garuda, dan Al Abrar.
5.	<i>Head of Sales &amp; Marketing</i>	Rio Dasanof
6.	<i>Head of Corcomm</i>	Herfindo Satria Gading <sup>101</sup>

## B. Gambaran Umum Kompas.com

### 1. Sejarah Berdiri dan Logo Kompas.com

Memulai karir sebagai pemrakarsa media yang berbasis daring pertama di Indonesia pada 14 September 1995, Kompas.com tampil dengan nama perdana yakni *Kompas Online*.<sup>102</sup> Dengan *address* laman Kompas.co.id, KOL ( *Kompas Online*) kala itu menghadirkan duplikat dari pemberitaan dalam surat kabar Harian Kompas. Layanan internet ini memiliki *purpose* agar masyarakat yang kurang terjamah oleh layanan distribusi Kompas karena akses terbatas dapat membaca informasi dengan cepat tanpa harus menunggu lama khususnya bagi khalayak di Indonesia bagian timur serta dunia Internasional.

Pada quartal awal tahun 1996, untuk penyajian yang lebih baik Kompas *Online* mengubah domain menjadi [www.kompas.com](http://www.kompas.com) yang membuat namanya menjadi harum hingga ke mancanegara. Ditinjau dari peluang bisnis digital yang cukup menjajikan, membawa Kompas *Online* turut bergabung dengan perusahaan PT Kompas Cyber Media (KCM)

<sup>101</sup> Struktur tim redaksi Medcom.id <https://www.medcom.id/redaksi> diakses pada 04 Agustus 2023, pukul 11:15 WIB.

<sup>102</sup> About Us Kompas.com <https://inside.kompas.com/about-us> diakses pada 13 September 2023 pada pukul 11:00 WIB.

tertanggal 6 Agustus 1998. Berangkat dari percampuran tersebut KOL semakin akrab dengan sebutan KCM. Hingga saat ini, KCM terus berkembang dengan isi pemberitaan yang tak hanya duplikat dari Harian Kompas saja namun juga terdapat pembaruan informasi yang terjadi sehari – hari.

Pertumbuhan teknologi yang tak dapat lepas dari kehidupan masyarakat, berdampak pada penambahan jumlah *viewers* pada laman KCM. Dengan kemudahan koneksi inilah membuat KCM mulai memperbaiki diri agar tidak tergerus dengan pesatnya perubahan dalam dunia digital. Puncaknya pada 29 Mei 2008, terjadi perubahan strategi dimana menghasilkan perubahan nama brand dari Kompas *Online* beralih menjadi Kompas.com. Ini mengacu pada *trademark* Kompas yang populer memunculkan jurnalis yang profesional dan bermanfaat bagi publik. Produksi dalam pemberitaan terus dioptimalkan dengan pemunculan rubrik – rubrik yang aktual, faktual, dan menarik bagi pembaca. Proses perubahan *trademark* ini menandakan saluran Kompas.com berupaya ada dalam masyarakat untuk menjadi referensi kejournalistikan ditengah banyaknya informasi yang tidak jelas arahnya.



Gambar 4.13

Logo Kompas.com

## 2. Program Kompas.com

- a. *Brandzview* merupakan program untuk mengiklankan produk yang bersifat *softselling* dan edukatif yang dikemas dengan bahasa serta kriteria jurnalistik dari Kompas.

- b. Advertorial ialah pemasaran produk yang memiliki daya jual tinggi (*hardselling*) bertujuan untuk mempromosikan barang, jasa maupun merek tertentu dengan cara khas dari Kompas.
- c. Kilas adalah program yang masih berkaitan dengan *brandzview*, tetapi terdapat perbedaan dimana kilas menampilkan kesuksesan kinerja dari lembaga milik pemerintah (BUMN), kementerian maupun kesanggupan kerja dari pemerintah daerah.
- d. Jixie yaitu kolom berita yang merekomendasikan informasi yang telah diselaraskan dengan kegemaran serta perhatian dari khalayak.
- e. Sorot yakni konten yang masih berhubungan dengan pemasaran yang berwujud menumbuhkan keunggulan bisnis dalam hal jasa maupun barang dari berbagai bidang perusahaan.<sup>103</sup>

### 3. Struktur Tim Kompas.com

No.	Posisi	Nama
1.	Pemimpin Redaksi	Wisnu Nugroho
2.	Redaktur Pelaksana	Amir Sodikin, Laksono Hari Wiwoho, Johannes Heru Margianto
3.	Asisten Redaktur Pelaksana	Ana Shofiana Syatiri, Charoline Sondang Andhikayani Damanik, Inggried Dwi Wedhaswary, Ni Luh Made Pratiwi F.
4.	Sekretaris dan Administrasi	Ira fauziah, Suci Primadona, Nafisa Maulida Putri, Fadilah Adlina Putri Ghaisani
5.	Editor	Diamanty Meiliana, Sabrina Asril, Novianti Setuningsih, Icha Rastika, Dani Prabowo,

<sup>103</sup> About Us Kompas.com <https://inside.kompas.com/about-us> diakses pada 20 September 2023 pada pukul 13:00 WIB.

		<p>Bagus Santosa, Fitria Chusna Farisa, Aryo Putranto Saptohutomo, Jessi Carina, Irfan Maullana, Nursita Sari, Kristina Erdianto, Ivany Atina Arbi, Ambaranie Nadia Kemanala Movanita, Ihsanuddin, Rakhmat Nur Hakim, Larissa Huda, David Oliver Purba.</p>
6.	Reporter	<p>Nicholas Ryan Aditya, Ardhito Ramadahan Dhanesworo, Dian Erika Nugraheny, Achmad Nasrudin Yahya, Irfan Kamil, Robertus Tatang Guritno Doonny Kuma, Rahel Narda Chatrine, Vitorio Mantalean, Adhyasta Dirgantara, Fika Nurul Ulya, Singgih Wiryono, Syakirun Ni'am, Muhamad Isa Bustomi, Tria Sutrisa, Nirmala Mulana Achmad, Muhammad Naufal, Mita Amalia Hapsari, Annisa Rahmadani Siregar, M. Chaerul Halim.</p>
7.	Video	<p>Sherly Puspita, Oky Ivan Setiawan, Lusia Kus Anna, Oik Yusuf, Sendy Darlis Alditya P, Aditya Nugraha, Abba Gabrillin, Adesari Aviningtyas,</p>

		Elizabeth Prillia Yahya Carvallo, Khairun Alfi Syahri MJ, Okky Mahdi, Rose Komala Dewi, Ira Gita Natalia Sibiring, Adisty Safitri, Adil Pradipta Huwa, Abdul Azis, Bernad Hermanto Siahaan, Alfiyan Oktora Atmajaya.
8.	Sosial Media	Pamela Djajasaputra, Roderick Adrian M, Nibras Nada Nailufar, Dian Reinis Kumampung, Yuna Fikry Adi Pratama, Ari Prasetyo.
9.	Kontributor	Ari Widodo, Slamet Riyatin, Ika Fitriana, Despriani Y. Zamzami, Maskur Makur, Achmad Faizal, Taufiqurrahman, Ahmad Faisol, Moh. Agus Fauzul Hakim, Junaedi, Abdul Haq Yahya Maulana T., Rahmat Rahman Patty, Hendra Cipto, Sigiranus Marutho Bere, Suddin Syamsuddin, Erna Dwi Lidiawati. <sup>104</sup>

Tabel 4.1

Struktur Tim Kompas.com

<sup>104</sup> Struktur tim redaksi Kompas.com <https://inside.kompas.com/about-us> diakses pada 12 September 2023, pukul 09:00 WIB.

## C. Framing Berita Politik Presiden Jokowi

### 1. Gambaran Umum Berita Politik Presiden Jokowi Turut Intervensi Bakal Calon Presiden 2024

Memasuki tahun politik menuju pemilihan presiden 2024, pemberitaan mengenai bakal calon presiden dan wakil yang akan melenggang pada kontestasi tersebut menjadi topik hangat yang banyak diberitakan oleh berbagai media. Termasuk didalamnya kanal berita *online* Kompas.com dan Medcom.id turut serta dalam mempublikasikan informasi mengenai pemilu. Serba – serbi mulai dari pertemuan antar aktor politik, penggabungan partai membuat koalisi, hingga aktivitas presiden mengawal pesta demokrasi pada tahun mendatang pun jadi pusat perhatian. Apalagi adanya diskusi yang diselenggarakan Presiden Joko Widodo pada 2 Mei lalu, mengajak 6 ketua partai ke Istana Merdeka menjadi titik awal munculnya isu mengenai intervensi kepala negara dalam mengurus calon – calon kadidat untuk pemilihan umum 2024.

Pro dan kontra muncul dari berbagai kalangan pegiat politik, baik dari partai oposisi dan juga para pendukung Jokowi mengomentari momen tersebut dan menjadi *headline* yang menarik untuk media dapat ikut campur memberitakan informasinya secara masif.

### 2. Penyajian Data Berita

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam laman berita Medcom.id dan Kompas.com selama 2 minggu, periode 4 Mei – 17 Mei 2023 telah ditemukan masing – masing 22 *straight news* (berita langsung) yang membahas tentang informasi Presiden Joko Widodo turut intervensi bakal calon presiden 2024. Kemudian, peneliti menimbang dan menyaring berita yang akan dipilih sebagai bahan analisa berjumlah 10 dengan pembagian setiap portal berita ialah 5 buah karena dari *headline* yang ditampilkan memiliki keterkaitan dengan tema dari penelitian ini, mencerminkan cara media menggambarkan isu yang diteliti, serta memiliki

relevansi dengan teori atau konsep yang dipergunakan dalam penelitian. Berikut merupakan berita yang ditemukan:

**a. Medcom.id**

No	Judul	Tabel	Keterangan
1.	Ini Alasan Jokowi Tak Undang NasDem ke Istana	Tabel 4	Berita 1
2.	Kumpulkan Ketum Parpol di Istana, Jokowi Ogah Disebut Cawe-Cawe Urusan Capres	Tabel 5	Berita 2
3.	Istana Negara Dipakai Bepolitik, Presiden Dianggap Tinggalkan Sejarah Buruk Demokrasi	Tabel 6	Berita 3
4.	Kriteria Pemimpin Arahkan Jokowi : Bukan Hanya Duduk di Istana	Tabel 7	Berita 4
5.	Tak Cuma Cawe-Cawe, Heboh Jokowi Jadi Pembisik Nama Capres dan Cawapres	Tabel 8	Berita 5

Tabel 4.2

Rincian *Straight News* Medcom.id

**b. Kompas.com**

No	Judul	Tabel	Keterangan
1.	Panggil 6 Ketum Parpol ke Istana, Jokowi : Saya Bukan “Cawe-Cawe”.	Tabel 9	Berita 6
2.	Blak-blakan Jokowi soal Nasdem : Tak Diundang karena Sudah Punya Koalisi Sendiri.	Tabel 10	Berita 7

3.	PKS Nilai Wajar Jokowi Dianggap “Cawe-cawe” karena Pilih kasih Undang Ketum Partai ke Istana	Tabel 11	Berita 8
4.	Denny Indrayana Sikap Jokowi Intervensi Urusan Pilpres Sangat Nyata	Tabel 12	Berita 9
5.	Soal Hasil Musra, PDI-P Yakin Jokowi Dukung Ganjar Capres	Tabel 13	Berita 10

Tabel 4.3

Rincian *Straight News* Kompas.com

### 3. Analisis Hasil Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

Analisis framing ini dilakukan terhadap berita politik terkait Presiden Joko Widodo turut intervensi bakal calon presiden 2024 dalam kanal pemberitaan Medcom.id dan Kompas.com. Adapun penyajian data ditampilkan secara kronologis berdasarkan waktu publikasi berita yakni dari tanggal 4 - 17 Mei 2023 (2 minggu). Dengan menggunakan metode bingkai milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang meliputi 4 perangkat diantaranya sintaksis, skrip, tematik dan retorik, penelitian ini berupaya menelaah bagaimana pembingkai dari pemberitaan politik intervensi presiden Jokowi tersebut.

#### a. Medcom.id

Berita 1

Judul : Ini Alasan Jokowi Tak Undang Nasdem ke Istana

Penulis : Indriyani Astuti

Edisi : 04 Mei 2023, 19:42 wib.<sup>105</sup>

<sup>105</sup> Indriyani Astuti, “Ini Alasan Jokowi Tak Undang Nasdem Ke Istana” [ Berita Online Medcom.id 04 Mei 2023 19:42 WIB], tersedia di situs : <https://www.medcom.id/nasional/politik/MkMQDqvk-ini-alasan-jokowi-tak-undang-nasdem-ke-istana> diakses pada 14 September 2023, pukul 09:15 WIB.



Analisisnya :

### 1. Sintaksis

Berita tersebut membahas mengenai latar belakang tidak diikutsertakannya Nasdem dalam rapat tertutup yang diadakan oleh Presiden Joko Widodo bersama 6 ketua partai pendukung pemerintah di Istana pada 2 Mei 2023 malam. Informasi tersebut juga merupakan pemberitaan *straight news* yang diterbitkan pertama oleh Medcom.id yang membahas mengenai cawe – cawe Presiden Jokowi.

Pada perangkat sintaksis, ditemukan *headline* berita yaitu “Ini Alasan Jokowi Tak Undang Nasdem ke Istana”. Dengan memperhatikan judul tersebut pembaca pasti ingin mengetahui apa yang menjadi dasar presiden tidak mengajak Nasdem? mengapa itu terjadi ? dan lain sebagainya. Kemudian dalam teras berita (*lead*) diterangkan bahwa Jokowi beralasan Nasdem telah memiliki kerjasama politik sendiri jadi tidak diundang dalam acara tersebut.

*Jakarta: Presiden Joko Widodo ([Jokowi](#)) mengakui sengaja tak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan pimpinan partai politik pendukung pemerintah. Jokowi menyebut NasDem sudah punya koalisi sendiri.*

Latar informasi berupa wartawan ingin menginformasikan alasan tidak dipanggilnya partai Nasdem dalam diskusi di Istana Negara. Dalam berita itu, terdapat narasumber yakni Presiden Jokowi dengan beberapa pernyataan diantaranya Jokowi menganggap Nasdem telah memiliki kerjasama politik tersendiri, dan pertemuan tersebut ingin membentuk kolaborasi politik yang baik sehingga pihak lain tidak perlu mengetahui strategi apa yang terbentuk, kemudian Presiden juga menjelaskan bahwa dirinya tidak hanya sebagai pegawai masyarakat, namun ia juga sebagai pegawai politik sehingga natural saja untuk membahas perpolitikan di Istana.

Adapun kutipan sumber dalam berita tersebut berasal dari Presiden Joko Widodo dengan poin isi pernyataan sebagai berikut :

Jokowi mebenarkan bahwa Nasdem memang tidak diundang karena telah memiliki koliasi partai tersendiri dan para ketua partai yang diundang juga ingin berkolaborasi dalam politik secara baik. (tertuang dalam Paragraf 2)

Jokowi beranggapan dalam politik kejadian seperti ini sudah normal terjadi serta mempunyai strategi rahasia yang tidak bisa diungkapkan. (Paragraf 4)

Jokowi juga memberikan *statement*, menjadi seorang presiden selain bertugas sebagai pegawai publik ia juga berperan sebagai pegawai politik. Sehingga menjadi hal yang lumrah dan diperbolehkan apabila berbincang persoalan politik. (Paragraf 6).

Berita diakhiri dengan narasi Presiden mengumpulkan 6 ketua umum partai pendukung pemerintah pada 2 Mei 2023 di Istana negara Jakarta. Adapun yang diundang diantaranya PAN, PDI-P, PPP, Gerindra, PKB dan Golkar. (Paragraf 7).

Hal tersebut pun dikuatkan dengan pemberitaan dari Republika.co.id dengan judul Jokowi Ungkap Alasan tak Undang Surya Paloh di Pertemuan Ketum Parpol yang ditulis oleh reporter Dessy Suciati pada 04 Mei 2023 pukul 19:20 WIB. Pada awal informasi dibuka dengan jawaban tegas presiden yang menyatakan bahwa partai dengan corak biru kuning tersebut memang tidak diundang. Jokowi juga memaparkan bahwa partai Nasdem telah memiliki kordinasi politik sendiri sehingga kurang etis jika mengetahui strategi yang akan dibangun oleh partai politik yang berkumpul. Ini dibuktikan dengan kutipan langsung dari presiden Joko Widodo sebagai berikut :

*“Nasdem itu ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain,”* ujar Jokowi.

“Mestinya inikan memiliki strategi besarnya apa, ya masak yang disini tahu strateginya. Kan mestinya seperti itu,” tambah dia.<sup>106</sup>

## 2. Skrip

Dalam perangkat skrip penulis merangkai cukup lengkap, diantaranya terdapat unsur : (*who*) merujuk pada Presiden Joko Widodo dan ketua umum Nasdem surya Paloh. lokasi (*where*) berada di Istana Negara, Jakarta, (*when*) pada 2 Mei 2023 terjadi pertemuan. Apa yang menjadi topik utama dalam pemeritaan itu yaitu latar belakang Presiden Jokowi tidak mengundang NasDem dalam pertemuan bersama 6 ketua partai pendukung pemerintah di Istana, dengan (*why*) karena NasDem telah memiliki kolisi partai sendiri serta Jokowi pun ingin membentuk kerja sama politik yang baik dengan beberapa parta yang hadir. Unsur bagaimana (*how*) dalam informasi tersebut ialah Presiden mengajak beberapa ketua umum untuk berrdialog di Istana negara membahas strategi politik untuk menghadapi pemilihan umum di tahun 2024.

## 3. Tematik

Perangkat tematik, berita ditulis secara singkat serta padat. Dari awal hingga akhir paragraf berisi narasi penulis diikuti pernyataan langsung dari presiden Joko Widodo. Dengan menampilkan satu informan, berita hanya memiliki satu sudut pandang sehingga informasi yang diberikan kurang berimbang.

## 4. Retoris

Pada elemen retoris, terdapat perbedaan penulisan pada kata Jokowi serta pemilu 2024. Dimana dalam kata tersebut dicetak dengan warna biru, dan dalam kata pemilu 2024, huruf P ditulis

<sup>106</sup> Dessy Suciati, “Jokowi Ungkap Alasan tak Undang Surya paloh di Pertemuan Ketum Parpol” [Berita Online Republika.co.id 04 Mei 2023 19:20 WIB], tersedia di situs : <https://news.republika.co.id/berita/ru4vmv409/jokowi-ungkap-alasan-tak-undang-surya-paloh-di-pertemuan-ketum-parpol> diakses pada 07 Januari 2024, pukul 14:05 WIB.

besar padahal berada diakhir kalimat yakni pada paragraf 3 dan 5 berita.

Kata pejabat publik dan pejabat politik dapat menggiring penafsiran bahwa tugas presiden tidak hanya melayani rakyat sebagai orang memiliki tanggung jawab penting dan tinggi dipemerintahan tetapi juga bekerja untuk partai politiknya. Gambar yang ditampilkan dalam berita lebih difokuskan pada aktor utama dalam informasi yakni Presiden Joko Widodo.

Berita 2

Judul : Kumpulkan Ketum Parpol di Istana, Jokowi Ogah Disebut Cawe – Cawe Urusan Capres

Penulis : Indriyani Astuti

Edisi : 04 Mei 2023, 20:02 wib.<sup>107</sup>

Analisisnya :

### 1. Sintaksis

Pada perangkat sintaksis ditemukan bahwa judul dari informasi tersebut ialah “*Kumpulkan Ketum Parpol di istana, Jokowi Ogah Disebut Cawe – Cawe urusan Capres*”. Dengan membaca *highlight* tersebut khalayak digiring untuk bertanya apa itu cawe – cawe? Apa yang dilakukan presiden Jokowi? serta Mengapa presiden membantah narasi tentang beliau telah melakukan cawe – cawe dan lain sebagainya. Dalam *lead* diterangkan bahwa Jokowi membantah tuduhan telah melakukan cawe – cawe usai dirinya mengadakan perkumpulan dengan 6 ketua umum partai pendukung pemerintah.

*Jakarta: Presiden Joko Widodo ([Jokowi](#)) menepis tuduhan cawe-cawe dalam menentukan calon presiden dan calon wakil*

---

<sup>107</sup> Indriyani Astuti, “Kumpulkan Ketum Parpol di Istana, Jokowi Ogah Disebut Cawe – Cawe Urusan Capres” [ Berita Online Medcom.id 04 Mei 2023 20:02 WIB], tersedia di situs : <https://www.medcom.id/nasional/politik/xkE2ZXMK-kumpulkan-ketum-parpol-di-istana-jokowi-ogah-disebut-cawe-cawe-urusan-capres> diakses pada 14 September 2023, pukul 09:15 WIB.

*presiden (capres-cawapres) 2024. Penilaian itu mencuat setelah Jokowi mengumpulkan enam ketua umum partai politik (parpol) pendukung pemerintah di Istana.*

Hal ini pun senada dengan, latar informasi, dimana wartawan menginformasikan penolakan Jokowi atas tuduhan intervensi persoalan calon presiden dan wakil presiden 2024.

Sumber dari informasi juga hanya menampilkan satu informan yakni, mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dengan kutipan sumber berupa : Pernyataan bantahan Presiden Jokowi yang menganggap pertemuan di Istana hanya sekedar diskusi bukan cawe – cawe. (Paragraf 2)

Joko Widodo juga beropini sudah berluangkali ia sampaikan, bahwa masalah calon presiden dan wakil presiden merupakan tanggung jawab dari partai politik serta koalisinya. Presiden juga menyampaikan meski sebagai pejabat politik tetapi ia tidak bermaksud untuk cawe – cawe. (Paragraf 4)

Presiden mengungkapkan mengajak bertemu ketua partai merupakan hal yang diperbolehkan dan tidak ada aturan yang dilanggar akibat kejadian itu. Ia juga menambahkan untuk saling mengerti, Jokowi juga seorang politisi sekaligus pejabat publik. (Paragraf 6)

Sebagai penutup wartawan membubuhkan pesan yang kontras dengan pembuka berita, yaitu Jokowi tidak menangkis adanya dialog mengenai pemilihan umum 2024 pada pertemuan yang terlaksana selama kurang lebih 3 jam itu.

Pemberitaan itu terlihat menggiring opini dan kontras dengan informasi yang diterbitkan oleh Bisnis.com pada 2 Mei 2023 pukul 23:21 WIB ber- *title* Jokowi Bertemu 6 Ketum Parpol di Istana Hingga 2,5 jam, Bahas Apa?.<sup>108</sup> Isi berita dimulai dengan narasi mengenai waktu kedatangan dan kepulangan para ketua umum yang diundang dalam perkumpulan tersebut. Kemudian dilanjutkan

---

<sup>108</sup> Akbar Evandio, “Jokowi Bertemu 6 Ketum Parpol di Istana Hingga 2,5 jam, Bahas Apa?” [ Berita Online Bisnis.com 02 Mei 2023 23:21 WIB], tersedia di situs : <https://kabar24.bisnis.com/read/20230502/15/1652105/jokowi-bertemu-6-ketum-parpol-di-istana-hingga-25-jam-bahas-apa> diakses pada 06 Januari 2024, pukul 09:15 WIB.

dengan tanggapan dari Prabowo Subianto berseloroh yang dibahas didalam ialah hal – hal yang baik dan memiliki pokok tentang lebaran. Ia juga memanmbahkan diskusi tersebut berbicara mengenai *world bank*, *international monetary fund* (IMF), prediksi semua negara, sektor ekonomi serta kekuatan Indonesia untuk dapat bergabung menjadi negara maju. Prabowo melanjutkan isu tentang politik tidak detail diperbinangkan namun terdapat petuah dari presiden untuk tetap kompak dan rukun demi kepentingan negara serta bangsa.

Dari partai persatuan pembangunan (PPP) Mardiono memberikan *statement* bahwa yang dibahas dalam pertemuan tadi lebih fokus pada bagaimana langkah Indonesia kedepan menghadapi bonus demografi. Sehingga harus dimanfaatkan secara baik momentum tersebut dalam kurun waktu kurang lebih 13 tahun kedepan.

Ketua umum Golkar Airlangga Hartarto juga berargumen bahwa percakapan tadi banyak membahas mengenai konteks pembangunan Indonesia termasuk didalamnya dari ekonomi yakni *middle income trap*, stunting dan juga silaturahmi pasca lebaran. Airlangga juga menambahkan persoalan politik tidak dibicarakan secara spesifik karena itu masalah internal partai pungkasnya.

## 2. Skrip

Struktur skrip dalam pemberitaan 2 ini memuat semua unsur pemberitaan 5w + 1h sebagai berikut : apa peristiwa yang ada diberita adalah bantahan isu intervensi akibat perkumpulan yang diadakan oleh Presiden Jokowi, dengan (how) mengundang 6 ketua umum partai pendukung pemerintah diantaranya Zulkifli Hasan dari PAN, Prabowo Subianto dari Gerindra, PDI-P dengan Megawati Soekarnoputri, Airlangga Hartarto dari Golkar, PKB dengan Muhaimin Iskandar serta Mardiono dari PPP itu hanya diskusi. Adapun *where* dan *When* ialah di Istana pada 2 Mei 2023, dengan

alasan (*why*) diadakannya perjamuan tersebut ialah untuk berbincang mengenai banyak hal termasuk didalamnya mengenai kontestasi pemilu 2024.

### 3. Tematik

Elemen tematik dalam teks berita tersebut jika ditelusuri dari paragraf pertama sampai akhir hanya mengambil satu tema yaitu pertemuan presiden yang menimbulkan isu cawe – cawe. Narasumber yang ditampilkan juga hanya Presiden Joko Widodo yang diiringi dengan kalimat penjelas dari wartawan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa Medcom.id ingin menggiring opini dengan fokus pada satu aktor saja dan kurangnya keberimbangan karena tidak ada pernyataan dari pihak lain.

### 4. Retoris

Pada struktur retorik terdapat perbedaan penulisan pada kata Jokowi dan pemilu 2024, yang dicetak dengan warna biru yang menjadi *keyword* (kata kunci) yang terhubung dengan tautan informasi terkait topik tersebut. Huruf P dalam kata pemilu juga diketik dengan huruf besar padahal terletak dalam akhir kalimat. Pada foto berita menunjukkan Jokowi tengah berpidato yang dapat diartikan sebagai presiden memberikan pernyataan secara tegas terhadap tuduhan isu intervensi tersebut.

Berita 3

Judul : Istana Negara Dipakai Berpolitik, Presiden Dianggap Tinggalkan Sejarah Buruk Demokrasi

Penulis : Kautsar Widya Prabowo

Edisi : 07 Mei 2023, 23:15 wib.<sup>109</sup>

<sup>109</sup> Kautsar Widya Prabowo, “Istana Negara Dipakai Berpolitik, Presiden Dianggap Tinggalkan Sejarah Buruk Demokrasi” [ Berita Online Medcom.id 07 Mei 2023 23:15 WIB], tersedia di situs : <https://www.medcom.id/nasional/politik/OKv0o6wb-istana-negara-dipakai-berpolitik-presiden-dianggap-tinggalkan-sejarah-buruk-demokrasi> diakses pada 14 September 2023, pukul 10:15 WIB.

Analisisnya :

### 1. Sintaksis

Dari perangkat sintaksis berita ini mengambil latar informasi, partai Demokrat memberikan komentar terhadap presiden akibat adanya sikap tebang pilih mengundang partai politik ke Istana untuk berdiskusi. Pertemuan tersebut Demokrat juga menilai Jokowi tidak netral serta mencederai demokrasi. Dengan latar tersebut wartawan memberi tajuk “Istana Dipakai Berpolitik, Presiden Dianggap Tinggalkan Sejarah Buruk Demokrasi”.

Dalam teras berita (*lead*), dituliskan bahwa Jokowi telah mewariskan kenangan buruk bagi demokrasi di Indonesia setelah adakan perkumpulan di Istana Negara. *Jakarta: [Partai Demokrat](#) menilai Presiden Joko Widodo ([Jokowi](#)) telah meninggalkan sejarah buruk demokrasi di ujung kepemimpinannya. Sebab, Presiden telah bersikap tidak netral jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.*

Dengan latar informasi Partai Demokrat memberikan kritik terhadap presiden Jokowi mengenai sikap ketidaknetralan beliau imbas dari pertemuannya dengan beberapa partai di istana. Demokrat berargumen Jokowi telah mencederai demokrasi serta tidak etis membuat kerja sama politik di Istana Negara, yang sepatutnya hanya diperuntukkan untuk membahas kepentingan negara bukan kepentingan golongan saja. Ia (Demokrat) juga menyarankan presiden untuk meneladani pemimpin sebelumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang seorang negarawan sejati serta tetap menghormati demokrasi dinegri ini.

Informan dari pemberitaan tersebut ialah Kamhar Lakumani selaku Badan Pemenangan Pemilu, DPP Partai Demokrat yang memberikan pernyataan diantaranya :

Kamhag Lakumani selaku Deputy Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat memberikan tanggapan bahwa



peristiwa pertemuan presiden dan 6 ketua partai politik di Istana akan meninggalkan warisan buruk bagi sejarah demokrasi Indonesia setelah reformasi

(Paragraf 3)

Kemhar menyatakan Presiden dirasa tidak beretika dan melukai demokrasi Indonesia. Dimana ia (presiden) berperan dalam terbentuknya koalisi partai serta dengan jelas menyokong salah satu calon presiden dalam setiap kegitannya.

(Paragraf 5)

Pada akhir pernyataan Kamhar membandingkan sosok presiden Jokowi dengan Presiden SBY yang tetap menjaga demokrasi serta seorang negarwan sejati.

(Paragraf 7)

Narasi ditutup dengan saran dari Kamhar untuk Joko Widodo agar meneladai sosok pemimpin sebelumnya yang tetap memegang teguh demokrasi.

Berita tersebut dikaitkan dengan opini dari detik.com yang ditulis oleh Masykurdin Hafidz Inisiator akademi pemilu dan demokrasi pada senin, 17 Juli 2023 (14:10 Wib) dengan judul Medudukkan “cawe – cawe” Presiden dalam Pemilu.<sup>110</sup> Dalam informasi itu, dijabarkan tindakan wajar ikut campur presiden dalam pengurusan pemilihan umum berdasarkan undang - undang. Dimulai dari pembentukan anggota komisi pemilihan umum (KPU), pembentukan DKPP (Dewan kehormatan penyelenggara pemilu), memberikan surat izin kepada Gubernur, Bupati, walikota beserta wakilnya apabila akan mendaftar sebagai calon legislatif maupun calon eksekutif.

Namun dalam berita tersebut juga dipaparkan hal yang patut menjadi perhatian yakni apabila presiden melakukan cawe – cawe dengan memepergunakan kewenangan sebagai kepala negara untuk berkampanye. Fasilitas yang dapat digunakan hanya sebatas staf pengamanan dan harus mengambil cuti diluar jadwal tugasnya.

<sup>110</sup> Masykurdin Hafidz, “Mendudukkan ‘cawe-cawe’ Presiden dalam Pemilu” [ Berita Online Detik.com 17 Julii 2023 14:10 WIB], tersedia di situs : <https://news.detik.com/kolom/d-6827090/mendudukkan-cawe-cawe-presiden-dalam-pemilu> diakses pada 06 Januari 2023, pukul 10:15 WIB.

Presiden pula harus menjadi *role model* bagi staf dalam pemerintahan maupun aparaturnegara untuk tidak bersikap condong kepada salah satu pasangan calon. Kegiatan tersebut diantaranya ajakan, seruan, pertemuan ataupun gratifikasi untuk masyarakat, keluarga kariawan dalam unit pekerjaanya.

## 2. Skrip

Aspek Skrip dalam data berita 3 juga tersusun dengan lengkap, yaitu : (*what*) pemakian Istana Negara sebagai tempat berpolitik membuat Presiden Jokowi dinilai telah bersikap kurang beretika serta mencoreng demokrasi. (*when*) Penerbitan berita tersebut diadakan pada tanggal 7 Mei 2023 sedangkan tempat (*where*) di Istana Presiden, Jakarta Indonesia. Pihak yang terlibat adalah Kamhar Lakumani, Partai Demokrat serta Presiden Joko Widodo. Adapun alasan (*why*) Demokrat menilai presiden telah bersikap tidak nertal karena mempergunakan Istana sebagai lokasi perkumpulan dan mendukung salah satu calon presiden. (*How*) Jokowi secara jelas tidak mengajak Nasdem dalam diskusi dengan partai pendukung pemerintah di istana dan membantu terbentuknya kerja sama politik antar 6 partai yang hadir.

## 3. Tematik

Secara tematik dilihat dari paragraf awal hingga penutup hanya berisikan teks narasi dari wartawan serta kalimat langsung dari narasumber yakni Kamhar Lakumani. Ini memandakan hanya ada satu pandangan maupun opini dalam pemberitaan yang diterbitkan Medcom.id.

## 4. Retoris

Dalam perangkat retorik terdapat pencetakan warna berbeda pada kata Partai Demorkat, Jokowi dan Pilpres 2024 yang diberi pewarnaan biru. Hal ini memandakan aktor dan tema yang sedang dibahas dalam berita tersebut. Gambar dari berita tersebut menghadirkan Istana Merdeka Jakarta sebagai simbol demokrasi dan

tempat terselenggaranya pertemuan antara Presiden dengan ketua partai.

Berita 4

Judul : Kriteria Pemimpin Arahkan Jokowi : Bukan Hanya Duduk di Istana

Penulis : Kautsar Widya Prabowo

Edisi : 14 Mei 2023, 16:08 wib.<sup>111</sup>

Analisisnya :

### 1. Sintaksis

Secara sintaksis ditemukan bahwa *headline* dari pemberitaan diatas adalah “Kriteria Pemimpin Arahkan Jokowi : Bukan Hanya Duduk di Istana” dari tajuk tersebut pembaca akan timbul pertanyaan sosok seperti apa yang diinginkan jokowi? Idealnya seperti apa? Mengapa bukan hanya duduk diistana? mengapa Jokowi memberi pegarahan? Dan lain sebagainya. Dalam *Lead* berita disebutkan Jokowi memberikan saran kriteria pemimpin yang baik ialah dapat memajukan negara dari sektor penjuru mana saja.

*Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah arahan kepada relawannya dalam menentukan kriteria calon presiden (capres) pada 2024. Salah satunya ialah pemimpin yang memiliki sosok yang mampu memajukan Indonesia dari sisi mana saja.*

Latar informasi berisikan Presiden Jokowi memberikan petunjuk ciri - ciri pemimpin yang sebaiknya dipilih pada pemilu 2024 kepada para pendukungnya. Sumber berasal dari presiden Jokowi dengan isi pernyataan diantaranya :

<sup>111</sup> Kautsar Widya Prabowo, “Kriteria Pemimpin Arahkan Jokowi : Bukan Hanya Duduk di Istana” [Berita Online Medcom.id 14 Mei 2023 16:08 WIB], tersedia di situs : <https://www.medcom.id/nasional/politik/5b2rr8eb-kriteria-pemimpin-arahan-jokowi-bukan-hanya-duduk-di-istana> diakses pada 14 September 2023, pukul 11:00 WIB.

Menurut Jokowi seorang pemimpin itu kerjanya bukan cuma tanda tangan, melakukan kegiatan sehari - hari dan duduk di Istana. Namun ia juga harus bisa membuat taktik yang baik dalam segala bidang contohnya ekonomi, politik maupun negara (Paragraf 2)

Pemimpin juga sebaiknya tahu dan mengerti kekuatan serta kelebihan apa yang dimiliki oleh negara Indonesia (Paragraf 5)

Jokowi memberi himbauan kepada relawan agar tepat serta benar dalam memilih sosok pemimpin karena akan menentukan nasib Indonesia kedepannya (Paragraf 7).

Berita ditutup dengan pernyataan presiden agar para relawan tidak asal pilih serta harus bijak untuk pemilihan umum 2024 nanti.

Informasi tersebut berlainan dengan *headline* yang dipublikasikan media [Republika.co.id](https://republika.co.id) oleh reporter Hafidz Mubarak pada Ahad 14 Mei 2023 (18:09) Wib dengan judul Jokowi Hadiri Acara Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia.<sup>112</sup> Dalam naskah dijelaskan Jokowi memeberikan pengarahannya kepada relawan pro dirinya untuk tetap teguh serta solid agar tidak dipandang remeh. Presiden pula memberikan izin kepada para menteri dikabinetnya yang ingin mencaonkan diri dengan syarat tidak mengganggu tanggung jawab tugasnya.

## 2. Skrip

Pada elemen skrip terdapat unsur berita 5w + 1h, dan jika diruntut (*what*) sosok pemimpin idaman Presiden Jokowi untuk pemilihan umum 2024. (*Where*) Istora Senayan Jakarta pada Minggu, 14 Mei 2023 (*when*). (*Who*) Presiden Joko Widodo, (*why*) Indonesia saat ini tengah berada di masa genting untuk berganti status menjadi negara maju sehingga Jokowi membimbing massa supaya memilih pemimpin yang pas untuk keberhasilan tersebut. (*How*) Jokowi memberi pernyataan bahwa pemimpin mendatang sebaiknya tahu dan paham kekuatan, potensi, dan strategi apa yang seseuai untuk memajukan Indonesia.

---

<sup>112</sup> Hafidz Mubarak, "Jokowi Hadiri Acara Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia" [Berita Online [Republika.co.id](https://republika.co.id) 14 Mei 2023 18:09 WIB], tersedia di situs : <https://visual.republika.co.id/berita/run8d9314/jokowi-hadiri-acara-musyawah-rakyat-musra-indonesia> diakses pada 07 Januari 2023, pukul 11:15 WIB.

### 3. Tematik

Secara tematik, kalimat yang dipilih wartawan menunjukkan kriteria sosok yang disukai oleh Jokowi. Dari paragraf awal dan akhir berita hanya ada satu informan yaitu presiden yang diikuti dengan narasi membangun dari konstruksi wartawan.

### 4. Retoris

Dalam perangkat retorik, kata Jokowi dicetak dengan warna biru menandakan pihak yang ada di berita. Serta kata krusial dapat dimaknai sebagai masa yang penting dan menjadi penentu kesuksesan alih status negara tersebut, sehingga diperlukan strategi yang baik serta matang. Foto jurnalistik menunjukkan Jokowi tengah hadir dan dikrumuni massa dalam acara Musra yang digagas oleh relawan Jokowi.

Berita 5

Judul : Tak Cuma Cawe – Cawe, Heboh Jokowi Jadi Pembisik Nama Capres Cawapres

Penulis : Adri Prima

Edisi : 16 Mei 2023, 00:21 wib.<sup>113</sup>

Analisisnya :

#### 1. Sintaksis

Secara sintaksis tajuk dari berita langsung tersebut ialah “Tak Cuma Cawe – Cawe, Heboh Jokowi Jadi Pembisik Nama Capres dan Cawapres”. Dengan teras berita berisi kritik terhadap isu cawe - cawe presiden Jokowi tengah menjadi perbincangan khalayak belakangan ini. Presiden semakin menunjukkan ketertarikannya pada

<sup>113</sup> Adri Prima, “Tak Cuma Cawe – Cawe, Heboh Jokowi Jadi Pembisik Nama Capres dan Cawapres” [Berita Online Medcom.id 16 Mei 2023 00:21 WIB], tersedia di situs : <https://www.medcom.id/nasional/politik/yNL3349K-tak-cuma-cawe-cawe-heboh-jokowi-jadi-pembisik-nama-capres-dan-cawapres> diakses pada 14 September 2023, pukul 13:15 WIB.

pemilihan presiden 2024 dengan menghadiri acara Musyawarah rakyat yang diadakan oleh relawan Pro Jokowi (Projo).

Adapun latar informasi dari berita tersebut hadirnya presiden dalam acara Musra (Musyawarah rakyat) menunjukkan sikap bahwa ia siap menyalurkan nama – nama calon presiden dan wakil presiden yang telah disampaikan para relawan kepada para ketua partai koalisinya. Hal tersebut membuat perdebatan antara pihak yang pro serta kontra. Pihak oposisi Demokrat menyatakan bahwa sebaiknya presiden lebih fokus dalam mengurus persolan rakyat jelang akhir masa akif jabatannya, dibanding mencari penerus. Sedangkan dari pihak yang mendukung Jokowi, Budi Arie berpendapat Jokowi bukan sedang cawe – cawe melainkan tengah meneruskan tanggung jawab demokrasi dan politik yang baik. Serta dari pandangan analis politik beranggapan bahwa sikap tersebut telah membuat presiden masuk terlalu jauh kedalam ranah yang bukan wewenang tugasnya.

Sumber kutipan berasal dari Herzaki Mahendra Putra (Juru Bicara Partai Demokrat, Budi Arie Setiadi (Ketua Umum relawan Jokowi) dan Ahmad Khoirul Umam (Analis politik Indostrategic). Isi kutipan dari masing – masing sumber sebagai berikut :

- a. Herzaki Mahendra Putra : Presiden pada masa akhir jabatan, sebaiknya lebih serius dalam menangani persoalan rakyat. Bukannya malah sibuk mencari siapa penggantinya.
- b. Budi Arie Setiadi : Presiden Jokowi bukan sedang cawe – cawe itu hanya framing yang dibentuk oleh media. Menurut relawan Jokowi tengah melakukan tugas menyampaikan aspirasi suara dari partisipan kepada ketua partai dan itu sangat diperlukan dalam demokrasi. Jokowi juga dipandang bertanggung jawab dalam proses berjalannya politik serta demokrasi.
- c. Ahmad Khoirul Umam : permasalahannya sekarang Presiden Joko Widodo telah masuk dalam ruang yang sebenarnya bukan kewajiban dari dirinya. Ini menunjukkan bahwa presiden masih

memiliki supermasi tinggi dalam pembentukan penerus setelah dirinya (*King Maker*). Presiden sebagai ikon negara seyogyanya dapat merangkul seluruh lapisan dari bangsa ini, hal itu selaras dengan dasar pemilu yakni jujur, adil, terbuka dan penguasa yang netral. Apabila terjadi sebaliknya jika presiden bersikap tebang pilih akan berdampak pada aktivitas politisasi yang kurang diharapkan oleh rakyat,

Penutup dari teks berita berisi pernyataan Ahmad Khoirul Umam yang menyebut jika presiden menunjukkan keberpihakannya maka akan menyebabkan pertarungan politik yang kurang demokratis.

## 2. Skrip

Elemen skrip, terdapat kekurangan dimana lokasi tidak disebutkan dalam narasi berita. Peristiwa yang terjadi ialah (*what*) Presiden Joko Widodo dianggap menjadi pembisik nama – nama calon presiden dan wakil presiden kepada para ketua partai politik. (*When*) waktu menunjukkan tanggal publikasi berita pada 16 mei 2023. (*Who*) pihak yang terlibat adalah Presiden, analis politik Ahmad Khoirul Umam, relawan Jokowi, ketua umum relawan Jokowi Budi Arie Setiadi, partai Demokrat, serta Juru bicara partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Alasan presiden menjadi pembisik (*why*) Jokowi ingin mencari pengganti dirinya. (*How*) bagaimana caranya ialah Jokowi menyatakan kesipannya untuk menyampaikan nama – nama yang dihasilkan oleh relawan, kemudain ia distribusikan kepada para ketua partai. Ia juga berencana mengadakan pertemuan dengan para ketua partai tersebut sesegera mungkin setelah menghadiri acara musyawarah tersebut.

## 3. Tematik

Pada perangkat tematik terdapat satu ide utama yang menjadi topik pembahasa yakni Jokowi siap menjadi agen distribusi nama – nama calon presiden dan wakilnya kepada ketua partai politik.

Dengan 2 sub judul yang menyatakan pro dan kontra akan tindakan tersebut. Opini muncul dari pihak yang mendukung yakni dari ketua umum relawan Jokowi sedangkan yang mengkritik datang dari analis politik Ahmad Khoirul Umam dan Herzaki Mahendra Putra selaku juru bicara partai Demokrat. Pernyataan narasumber juga dikuatkan dengan konstruksi dalam teks pendukung yang dibuat oleh wartawan seolah menggiring opini bahwa Jokowi memang melakukan intervensi untuk kontestasi pemilu 2024.

#### 4. Retoris

Dalam struktur retoris, terdapat penekanan dan pewarnaan berbeda pada kata pilpres dan Jokowi yakni dicetak dengan warna biru sedangkan kata yang lain diketik dalam warna hitam. Istilah *King maker* yang dinyatakan oleh Khoirul Umam dapat dimaknai presiden sebagai penguasa tertinggi dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memilih calon penerus pengganti dirinya. Foto jurnalistik menampilkan Joko Widodo sebagai tokoh yang menjadi gagasan utama topik berita.

#### b. Kompas.com

Berita 6

Judul : Panggil 6 Ketum Parpol ke Istana, Jokowi : Saya Bukan “Cawe – Cawe”

Penulis : Dian Erika Nugraheny

Edisi : 04 Mei 2023, 18:48 wib.<sup>114</sup>

Analisisnya :

<sup>114</sup> Dian Erika Nugraheny, “Panggil 6 Ketum Parpol Ke Istana, Jokowi Saya Bukan “Cawe-Cawe” [ Berita Online Kompas.com 04 Mei 2023 18:48 WIB], tersedia di situs : <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/04/18484061/panggil-6-ketum-parpol-ke-istana-jokowi-saya-bukan-cawe-cawe> diakses pada 15 September 2023, pukul 10:15 WIB.



## 1. Sintaksis

Berita tersebut merupakan informasi yang membahas cawe – cawe pertama yang diunggah Kompas.com, terlihat susunan piramida terbalik sebagaimana ciri khas dari berita *straight news*. Pada elemen sintaksis, *headline* berita yang tersaji ialah “Panggil 6 Ketum Parpol Ke Istana, Jokowi : Saya Bukan Cawe – Cawe”. Dari judul tersebut pasti khalayak akan membuat pertanyaan mengapa presiden mengundang para ketua umum partai? Kenapa hanya 6 ketua yang dipanggil dan apa yang dibahas disana menjadi soal yang harus dijelaskan. Dalam *lead* diterangkan bahwa presiden menjawab mengenai persoalan dirinya dianggap telah melakukan cawe – cawe calon presiden dan wakil presiden.

*JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal anggapan bahwa dirinya cawe-cawe atau ikut-ikutan dalam persoalan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.*

Latar informasi juga berisi Penepisan isu cawe – cawe oleh Presiden Jokowi usai adakan pertemuan dengan 6 ketua umum partai pendukung pemerintah di Istana Negara..

Narasumber dari berita tersebut adalah Presdien Jokowi dan ketua umum Gerindra yaitu Prabowo Subianto. Berikut adalah pernyataan dari kedua informan :

a. Joko Widodo : Presiden memberikan statement bahwa pertemuan diistana bukanlah cawe – cawe melainkan hanya sekedar diskusi. Ia juga beranggapan bahwa termasuk dalam pejabat politik tetapi tidak sedang cawe – cawe. (Paragraf 3)

Jokowi juga menegaskan secara berulang bahwa urusan bakal calon presiden dan wakilnya merupakan tanggung jawab partai dan koalisi partai. Kemudian Jokowi mengundang ketua umum itu hal yang biasa saja, serta itu terjadi sebaliknya jika partai mengundang dirinya. (Paragraf 5)

Jokowi juga menambahkan peraturan apa yang dilanggar jika mengadakan pertemuan diistana, tidak ada. Ia juga meminta untuk dimengerti bahwa presiden tidak hanya bertugas sebagai pelayan publik tapi juga sebagai pelayan politik. (Paragraf 8)

b. Prabowo Subianto : Pak Jokowi menyatakan bahwa Indonesia saat ini berada pada masa penentuan dan strategis. Sehingga jika pemimpin mendatang cerdas memanfaatkan suasana, kompak dan rukun maka bangsa ini akan menjadi negara maju dan makmur. (Paragraf 13).

Penutup dari berita ialah ulasan tambahan dari Prabowo yakni Jokowi menghimbau untuk para ketua umum tetap menghormati siapa pun pemimpin yang terpilih pada kontestasi 2024.

Informasi diatas senada dengan pemberitaan oleh Republika.co.id, penulis Dessy Suciati Saputri pada 04 Mei 2023 (20:45 Wib) yang berjudul Jokowi Sebut Pertemuan Ketum Parpol Bukan ‘cawe-cawe’ tapi Sekedar Diskusi. Teras berita diisi dengan penolakan presiden Joko widodo tetang tudingan intervensi pasca bertemu 6 ketu partai di istana.

“*Cawe – cawe. Bukan cawe – cawe. Wong diskusi saja kok (disebut) cawe – cawe. Diskusi,*”<sup>115</sup> ungkap Jokowi sembari tertawa.

Jokowi juga menjelaskan bahwa dirinya juga termasuk pelayan masyarakat dan pelayan politik serta persoalan soal calon presiden dan wakil presiden ialah tanggung jawab kolaisi maupun partai politik. Perbedaan terlihat dalam narasumber yang disajikan dalam Republika.co.id menampilkan informan ke 2 dari kalangan akdemis yakni ketua Badan eksekutif mahasiswa Univeritas Indonesia Melki Sedek yang berkomentar tentang sikap interevensi presiden.

Melki beropini bahwa presiden Joko Widodo bersikap kurang elok dengan bersedia menanggalkan kenetralitasannya untuk menyokong salah satu paslon. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Jokowi dalam acara pengumuman calon presiden dari partai PDI-Perjuangan yaitu Ganjar pranowo. Sebagai kepala negara dan

---

<sup>115</sup> Dessy Suciati Saputri, “Jokowi Sebut Pertemuan Ketum Parpol Bukan ‘cawe-cawe’ Tapi Sekedar Diskusi” [Berita Online Republika.co.id 04 Mei 2023 20:45 WIB], tersedia di situs : <https://news.republika.co.id/berita/ru4zjd409/jokowi-sebut-pertemuan-ketum-parpol-bukan-cawecawe-tapi-sekedar-diskusi> diakses pada 06 Januari 2024, pukul 11:00 WIB.

pemerintahan sepatutnya presiden menjunjung tinggi kedaulatan demokrasi dengan tidak mengurus peserta kontestasi.

## 2. Skrip

Secara skrip, dinarasikan secara lengkap dalam informasi yaitu : (*what*) presiden mengundang beberapa ketua partai, (*when*) pertemuan pada 2 Mei dan perilisan berita 4 Mei 2023 di Istana Negara (*where*). Pihak yang terlibat Megawati Soekarnoputri, Airlangga Hartarto, Muhammad Mardiono, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto serta Presiden Jokowi. (*why*) diskusi tersebut untuk membahas strategi pemilu 2024 dan dinamika politik yang sedang terjadi. (*how*) Presiden mengundang perwakilan ketua umum partai ke istana untuk berbincang serta memberi saran agar pemilu mendatang dapat berjalan dengan gembira dan damai.

## 3. Tematik

Pada struktur tematik dari paragraf awal hingga akhir berisi narasi wartawan serta pernyataan langsung dari 2 narasumber yaitu Presiden Jokowi selaku yang mengadakan pertemuan dan Prabowo Subianto sebagai perwakilan yang hadir. Penyajian ini memperlihatkan bahwa bingkai yang ditampilkan sedikit *soft*, tidak terlalu menonjol untuk menggiring opini serta opini seimbang karena menyediakan 2 informan yang terlibat dalam acara tersebut.

## 4. Retoris

Perangkat retorik terdapat penekatan pada kata Jokowi, Pemilu, partai, pemilu 2024, partai dan pemilu dengan dicetak dengan tinta biru. Ini menandakan singkatan kata, pihak yang terlibat serta topik fokus yang dibahas. Misalnya pada kata partai terdapat 2 pewarnaan, yang pertama merujuk pada informasi partai yang diundang, sedangkan kata partai kedua memberi pengertian asal partai dari Prabowo Subianto. Kata pejabat publik dan pejabat politik digunakan presiden sebagai penegas bahwa selain mengurus kepentingan rakyat, ia juga termasuk sebagai orang yang berkerja di politik.

Berita 7

Judul : Blak – blakan Jokowi Soal Nasdem : Tak Diundang karena  
Sudah Punya Koalisi Sendiri

Penulis : Dian Erika Nugraheny

Edisi : 05 Mei 2023, 06:14 wib.<sup>116</sup>

Analisisnya :

### 1. Sintaksis

Kompas.com pada 5 Mei 2023 kembali memberitakan soal cawe – cawe yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo. Jika ditelusuri secara sintaksis tajuk dari pemberitaan tersebut ialah “Blak – blakan Jokowi soal Nasdem : Tak Diundang Karena Sudah Punya Koalisi Sendiri”. Dalam hal ini, Kompas ingin meyoroti tidak hadirnya Nasdem pada pertemuan yang diadakan presiden Jokowi di Istana Negara dengan mengundang 6 ketua umum partai pendukung pemerintah.

*Lead* yang dipergunakan pada berita ini merupakan jenis *what lead* dimana lebih menonjolkan peristiwa apa yang terjadi yaitu presiden akhirnya memberikan *statement*-nya mengenai absennya Nasdem dalam pertemuan di Istana. *JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal absennya Partai Nasdem dalam pertemuan enam ketua umum (ketum) parpol dengan dirinya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (2/5/2023).*

Latar informasi pun memberi perhatian pada apa yang menjadi penyebab tidak hadirnya Nasdem dalam pertemuan tersebut.

Adapun informan yang diwawancarai dalam berita itu yaitu Presiden Jokowi, Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Jhonny G. Plate, dan ketua bidang media dan komunikasi politik

<sup>116</sup> Dian Erika Nugraheny, “Blak – blakan Jokowi Soal Nasdem : Tak Diundang Karena Sudah Punya Koalisi Sendiri” [ Berita Online Kompas.com 05 Mei 2023 06:14 WIB], tersedia di situs : <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/05/06143091/blak-blakan-jokowi-soal-nasdem-tak-diundang-karena-sudah-punya-koalisi> diakses pada 15 September 2023, pukul 11:15 WIB.

DPP Partai Nasdem Charles Meikyansah. Berikut adalah pernyataan yang disampaikan dari ketiga narasumber tersebut :

a. Presiden Joko Widodo : Presiden membernarkan bahwa Nasdem memang tidak diundang (Paragraf 3)  
Menurutnya Nadem telah memiliki kerja sama politik sendiri. Dan partai yang berkumpul kemarin juga sedang membentuk koalisi politik yang baru. (Paragraf 5)

Jokowi juga menambahkan pihak yang telah berkoalisi tidak perlu mengetahui taktik yang direncanakan oleh gabungan politik baru tersebut. (Paragraf 7)

Dalam kegiatan politik itu biasa dilakukan, dan diperbolehkan. (Paragraf 9)

Jokowi memandang pertemuan diistana sebagai ajang diskusi bukan untuk intervensi calon presiden dan wakil presiden. (Paragraf 20)

Ia juga mengaskan permasalahan capres dan cawapres adalah kewenangan dari partai dan gabungan partai. Dan presdien menyatakan bahwa tindakan presdien mengundang beberapa ketua umum partai adalah aktivitas yang tidak dilarang. (Paragraf 23)

Jokowi bersikeras tidak ada konstitusi yang ia langgar serta mengungkapkan bahwa ia bertugas dipolitik sekaligus mengurus negara. (Paragraf 24)

Sebagai pegawai politik, presiden menyatakan wajar saja jika ia berbincang persoalan politik diistana. (Paragraf 28)

Membahas soal publik juga dapat dilakukan karena termasuk kewenangannya. (Paragraf 29)

Jokowi akan berhenti intervensi apabila telah ada pernyataan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai bakal calon preiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024. (Paragraf 31)

Presiden juga mengungkapkan banyak pembahasan yang diperbincangkan pada pertemuan selama kurang lebih 3 jam tersebut. Meski tidak secara detail menggambarkan apa yang terjadi, tetapi terdapat 3 poin yang dikatakan oleh Jokowi yakni tentang dinamika politik, tantangan yang dihadapi negara serta pemimpin yang dibutuhkan pada masa mendatang.

b. Jhonny G. Plate : menanggapi isu yang berkembang mengenai Nasdem yang sudah tidak menjadi bagian partai pendukung pemerintah. Plate selaku sekretaris jenderal partai Nasdem mengatakan bahwa anggapan tersebut merupakan hal yang wajar terjadi di politik namun partainya tetap teguh untuk tetap setia pada kekuasaan Jokowi. Ia juga menambahkan Nasdem berkomitmen membantu Jokowi sampai habis masa jabatannya pada tahun 2024, selanjutnya akan lain lagi. Plate juga menegaskan tidak mengetahui apakah partainya diundang atau tidak oleh presiden karena tengah fokus pada perencanaan acara KTT ASEAN di Labuan Bajo.

c. Charles Meikyansah : menyatakan Surya Paloh menghormati segala pertemuan yang dilakukan untuk membahas persoalan negara. Mengingat banyaknya masalah yang harus diskusikan serta diselesaikan secara bersama – sama. Sehingga ketua Nasdem tetap mendukung pertemuan di Istana tersebut meski tanpa dirinya.

Pada *closing* pemberitaan diterangkan bahwa Surya Paloh tengah berada di luar negeri saat pertemuan berlangsung dan ia menghormati segala keputusan yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo.

Tanggapan presiden Joko Widodo tentang tidak mengundang Nasdem dalam pertemuan dengan 6 ketua umum partai pendukung pemerintah selaras dengan pernyataan dari Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto. Ia mengungkapkan partai yang di nahkodai oleh

Surya Paloh tersebut tidak diajak karena telah diusungnya Anies Baswedan sebagai bakal presiden 2024 dari partai tersebut.

*“Dan Kemudian mengapa dari bapak Surya Paloh tidak diundang, sangat jelas penjelasan dari bapak presiden Jokowi, karena memang dari rekam jejak yang disampaikan oleh bapak Anies Baswedan, itu kan menunjukkan hal – hal yang sifatnya berbeda,”* kata Hasto Senin (08/05).<sup>117</sup> Hal ini tertera dalam berita [Republika.co.id](https://news.republika.co.id/berita/rudbnh377/hasto-paloh-tak-diundang-karena-rekam-jejak-anies) dengan tajuk Hasto : Paloh tak Diundang Karena Rekam Jejak Anies dipublikasikan pada 09 Mei 2023 (08:47 Wib) oleh Teguh Firmansyah.

Ungkapan Jokowi mengenai pejabat publik dan pejabat politik serta akan berhenti setelah pengumuman resmi dari komisi pemilihan Umum (KPU) diperkuat dengan informasi dari [Republika.co.id](https://news.republika.co.id/berita/rudbnh377/hasto-paloh-tak-diundang-karena-rekam-jejak-anies) yang ditulis oleh Teguh Firmansyah pada 05 Mei 2023 (09:08 WIB) dengan judul Pertemuan Parpol di Istana Negara, Jokowi : Saya ini Pejabat Publik dan Pejabat Politik. Dalam narasinya presiden mempertegas bahwa dalam politik merupakan hal yang lumrah apabila dirinya memperbincangkan isu politik karena sebagai pemimpin negara ia juga bertugas sebagai kader partai politik. Presiden Joko Widodo juga melanjutkan akan berhenti apabila telah keluar keterangan resmi dari komisi pemilu.

*“Yak kan memang ini tugas, tugas seorang presiden. Hanya kalau memang sudah ada ketetapan KPU saya .....”* ujar Jokowi menunjukkan gesture mengangkat kedua tangannya.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Teguh Firmansyah, “Hasto : Paloh Tak Diundang karena Rekam Jejak Anies” [Berita Online [Republika.co.id](https://news.republika.co.id) 09 Mei 2023 08:47 WIB], tersedia di situs <https://news.republika.co.id/berita/rudbnh377/hasto-paloh-tak-diundang-karena-rekam-jejak-anies> diakses pada 07 Januari 2024, pukul 09:00 WIB.

<sup>118</sup> Teguh Firmansyah, “Pertemuan Parpol di Istana, Jokowi : Saya ini Petugas Publik dan Pejabat Politik” [Berita Online [Republika.co.id](https://news.republika.co.id) 05 Mei 2023 09:08 WIB], tersedia di situs <https://news.republika.co.id/berita/rudbnh377/hasto-paloh-tak-diundang-karena-rekam-jejak-anies> diakses pada 06 Januari 2024, pukul 013:00 WIB.

## 2. Skrip

Secara skrip, kelengkapan berita 5W+1H yang disajikan adalah sebagai berikut : (*what*) pengungkapan penyebab Nasdem tidak diikutkan pada pertemuan diistana. (*when*) pertemuan dilaksanakan pada 2 Mei dan pernyataan presiden disampaikan pada tanggal 4 Mei 2023. (*where*) Istana Merdeka Jakarta, Indonesia. (*who*) Jhonny G. Plate, Charles Meikyansah dan mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. (*why*) Jokowi dan 6 partai yang berkumpul ingin membentuk kerja sama politik sehingga Nasdem tidak diperkenankan hadir. (*how*) Jokowi menyatakan tidak sepatutnya strategi yang di buat oleh koalisi baru tersebut diketahui oleh pihak lain (Nasdem).

## 3. Tematik

Pada perangkat tematik, dari paragraf awal hingga akhir tertulis secara runtut, dimana terdapat 4 sub judul yang mendukung tema utama mengenai latar belakang tidak diikutkannya partai Nasdem pada pertemuan di istana. Sub judul tersebut diantaranya ialah pesan dari Surya Paloh, Nasdem tegaskan tetap dukung Jokowi, isi pertemuan dengan 6 ketua umum partai politik serta pertemuan enam ketua parpol bukan cawe – cawe. Dalam hal ini Kompas, secara halus menggiring opini mengenai intervensi Presiden Jokowi, karena pada narasi yang dikonstruksi wartawan disisipi fakta – fakta sebagai intermeso seperti contoh: Nasdem diketahui menjadi partai penyongsong Jokowi pada 2 periode pemilihannya, yakni 2014 dan 2019. Catatan Kompas menyatakan pernyataan yang dilayangkan Jokowi pada Kamis tersebut menjadi keterangan pertama usai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan maju pada kontestasi pemilihan umum 2024.

## 4. Retoris

Pada elemen retoris, penegasan pejabat politik dan pejabat publik menafsirkan bahwa presiden tidak hanya berwenang sebagai kepala negara yang mengurus soal kepentingan rakyat saja, namun



ia juga dapat bertindak sebagai pelayan politik karena termasuk didalamnya.

Berita 8

Judul : PKS Nilai Wajar Jokowi Dianggap “Cawe – Cawe” karena Pilih Kasih Undang Ketum Partai ke Istana

Penulis : Vitorio Mantalean

Edisi : 08 Mei 2023, 15:02 wib.<sup>119</sup>

Analisisnya :

### 1. Sintaksis

Perangkat sintaksis berita diatas menyajikan headline berita yaitu “ PKS Nilai Wajar Jokowi Dianggap “Cawe – Cawe” karena Pilih Kasih Undang Ketum Partai Ke Istana”. Jika dilihat dari tajuk tersebut maka isi pemberitaan berisikan komentar dari pihak PKS mengenai pertemuan Jokowi dengan beberapa ketua partai di Istana Negara menimbulkan isu adanya cawe – cawe. Dalam teras berita dinarasikan partai keadilan sejahtera (PKS) menganggap lumrah apabila Jokowi dipandang ikut campur persoalan pemilu 2024 karena adakan pertemuan dan hanya mengundang ketua umum pendukung pemerintah ke Istana tanpa Nasdem.

*JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat lumrah dianggap mengintervensi politik jelang pemilu karena tebang-pilih mengundang partai politik ke Istana Merdeka pada Selasa (2/5/2023) lalu.*

---

<sup>119</sup> Vitorio Mantalean, “PKS Nilai Wajar Jokowi Dianggap “Cawe – Cawe” Karena Pilih Kasih Undang Ketum Partai ke Istana” [ Berita Online Kompas.com 08 Mei 2023 15:02 WIB], tersedia di situs : <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/08/15022501/pks-nilai-wajar-jokowi-dianggap-cawe-cawe-karena-pilih-kasih-undang-ketum> diakses pada 15 September 2023, pukul 13:15 WIB.

Latar informasi dan sumber berita berupa komentar dari Mardani Ali Sera (pihak PKS) dan Jusuf Kalla mengenai intervensi Jokowi. Berikut adalah pernyataan dari kedua narasumber ;

a. Mardani Ali Sera : menurut Mardani pertemuan di istana secara kontitusi memang tidak ada yang dilanggar, tetapi secara etika Jokowi sebaiknya dapat memilah perannya dengan bijak sebagai presiden dan diri pribadi. Ia juga menambahkan apabila pertemuan diistana tersebut membahas permasalahan negara maka sebaiknya semua partai diundang termasuk Nasdem dan PKS, tidak hanya 6 perwakilan partai saja. Mardani juga menuturkan jika ada persoalan penting lain yang dibahas maka silahkan menggunakan tempat yang lain jangan diistana. Ia juga beropini bahwa jika partai besar bergabung dan membentuk koalisi baru diistana maka akan tercipta hanya 2 pasang calon presiden dan wakilnya, ini mejadi tanda Jokowi ikut mengurus pencalonan tersebut.

b. Jusuf Kalla : menyatakan Presiden Jokowi sebaiknya meledani presiden sebelumnya yaitu Megawai dan SBY. Yang mana pada masa akhir khidmatnya, tidak menunjukkan sikap mencampuri dunia politik agar lebih demokratis. (Paragraf 14)

JK juga beropini apabila pertemuan yang diadakan berdialog soal pembangunan negara, maka semestinya Nasdem diikutkan. Jika tidak artinya ada perbincangan yang membahas tentang politik. (Paragraf 16)

JK membandingkan Indonesia dengan Amerika yang hanya memiliki dua partai maka wajar jika calon yang berkopetisi ada 2 pasang. Namun Indonesia ini partainya banyak, untuk menyajikan demokrasi yang baik sebaiknya pasangan calon lebih dari dua. (Paragraf 18).

Informasi diakhiri dengan pernyataan dari wartawan yang menafsirkan bahwa Partai Nasdem seperti kurang diperhatikan meski hingga kini mereka tetap mendukung pemerintahan Jokowi sampai saat ini.

## 2. Skrip

Secara skrip tersusun kelengkapan berita 5W+1H sebagai berikut : (*what*) PKS komentari adanya intervensi presiden Jokowi usai adakan pertemuan dengan beberapa ketua umum partai diistana, (*who*) partai keadilan sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, Jusuf Kalla, anggota komisi II DPR RI, dan Nasdem. (*where*) Istana Merdeka (*when*) peretmuan diadakan pada 2 Mei sedangkan publikasi berita pada 4 Mei 2023. (*why*) PKS mengungkapkan pemakaian fasilitas negara (istana) seyogyanya digunakan untuk kepentingan umum, serta Jokowi dinilai pilih kasih dalam mengundang partai untuk diskusi diistana tersebut. (*how*) presiden melalukan tebang pilih dan tidak mengajak Nasdem dalam pertemuan diistana. Dalam pertemuan tersebut juga Jokowi turut berperan dalam pengusungan koalisi partai yang baru.

## 3. Tematik

Pada struktur tematik, artikel tersebut memberikan satu ide besar yakni cawe – cawe presiden Jokowi namun juga dibahas mengenai tidak diundangnya Nasdem serta penggunaan istana sebagai lokasi pertemuan. Dalam paragraf berita berisikan pernyataan dari narasumber yakni mahdani Ali Sera dan Jusuf Kalla yang diiringi dengan paragraf penjelas dari wartawan.

## 4. Retoris

Struktur retoris , ditemukan penulisan yang berbeda pada kata Jokowi, PKS, pemilu 2024 dan Jusuf Kalla. Hal ini menandakan tentang topik yang sedang diperbincangkan yakni mengenai pemilu 2024 dan pihak yang terlibat dalam informasi tersebut.

Berita 9

Judul : Denny Indarayana Sikap Jokowi Intervensi Urusan Pilpres Sangat Nyata

Penulis : Aryo Putranto Saptohutomo

Edisi : 09 Mei 2023, 23:53 wib.<sup>120</sup>

Analisisnya :

### 1. Sintaksis

Pada unsur sintaksis, ditemukan bahwa *headline* berita *straight news* tersebut adalah “Denny Indrayana Sikap Jokowi Intervensi Urusan Pilpres Sangat Nyata”. Lead berisikan penilaian Denny tentang tindakan intervensi presiden Jokowi memang benar adanya. Latar informasi menunjukkan bukti keterlibatan Jokowi dalam penentuan calon presiden dan wakil presiden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menilai sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diduga ikut campur menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang sudah sangat jelas terlihat.

Latar informasi berisikan pernyataan Denny Indrayana mengenai sikap Jokowi turut mengurus bakal calon presiden sangat terlihat jelas.

Informan dari berita tersebut adalah Denny Indrayana dengan kutipan : Denny mengungkapkan jika ingin mengetahui adanya ikut campur Jokowi maka tanyakan pada beliau (presiden) mengenai permasalahan Moeldoko. (Paragraf 4)

Denny juga mengamanatkan kepada wartawan untuk dapat menanyakan pertanyaan mengapa presiden membiarkan tindakan Kepala Stafnya, Moeldoko yang ingin mengmabil alih partai Demokrat. (Paragraf 5)

Ia menambahkan jika itu merupakan bukti nyata cawe –cawe presiden Jokowi. (Paragraf 8)

Menurut Denny Jokowi tidak paham tahapan pemilihan presiden, jika menunggu penetapan dari KPU. Karen langkah tersebut telah berjalan selama kurang lebih satu tahun lalu. (Paragraf 12).

---

<sup>120</sup> Aryo Putro Saptohutomo, “Denny Indrayana Sikapi Jokowi Intervensi Urusan Pilpres Sangat Nyata” [ Berita Online Kompas.com 09 Mei 2023 23:53 WIB], tersedia di situs : <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/09/23535251/denny-indrayana-sikap-jokowi-intervensi-urusan-pilpres-sangat-nyata> diakses pada 15 September 2023, pukul 14:15 WIB.

Denny menambahkan apabila presiden turut serta dalam pengusungan calon dan taktik koalisi itu berarti telah keluar dari koridornya sebagai kepala negara yang sebaiknya dalam pemilihan umum harus netral serta adil. (Paragraf 13).

Penutup artikel ialah kalimat penjelas yang dilayangkan wartawan mengenai hubungan antara Surya paloh dan Presiden Joko Widodo.

## 2. Skrip

Berikut perangkat skrip 5W+1H berita : (what) kontar Denny Indrayana mengenai cawe – cawe presiden Jokowi. (when) perilsan berita pada 9 Mei 2023, (where) tidak dijelaskan secara rinci lokasi dalam artikel tersebut. Siapa yang ada dalam berita (who) Denny Indrayana, Presiden Joko Widodo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (why) Denny memandang sikap Jokowi yang tidak melarang Moeldoko mengakusisi partai Demokrat, hal itu juga memunculkan isu kurang demokratisnya Presiden. (how) argumentasi tersebut disampaikan oleh Denny dalam acara diskusi pada *channel youtube Paramadina Public Police Instute* pada 9 Mei 2023.

## 3. Tematik

Struktur tematik berita tersebut dari awal hingga akhir paragraf menyatakan pernyataan dari pakar hukum tata negara Denny Indrayana diikuti kalimat penjelas wartawan mengkonstruksi fakta intervensi presiden Jokowi. Artikel terlihat kurang berimbang karena hanya satu sudut pandang dan sedang memprovokasi bahwa benar adanya Jokowi ikut capur tangan persoalan calon presiden dan wakil presiden.

## 4. Retoris

Elemen retoris, terlihat kata Presiden Joko Widodo, Denny Indrayana dan Pilpres ditulis dengan tinta biru muda. Ini dapat ditasirkan sebagai pihak yang menjadi topik utama dalam berita serta

apa yang dibahas. Penulisan huruf P juga dengan huruf besar sedangkan kata tersebut terletak ditengah kalimat.

Berita 10

Judul : Soal Hasil Musra, PDI-P Yakin Jokowi Dukung Ganjar Capres

Penulis : Nicholas Ryan Aditya

Edisi : 16 Mei 2023, 16:15 wib.<sup>121</sup>

Analisisnya :

### 1. Sintaksis

*Straight news* yang diterbitkan Kompas.com pada 17 mei 2023 tersebut dapat dianalisa unsur sintaksis sebagai berikut : *headline* “Soal Hasil Musra, PDI-P Yakin Jokowi Dukung Ganjar Capres”. Dari judul tersebut maka teras berita yang terbetuk ialah teks narasi yang mengungkapkan Said Abdullah selaku Dewan Pemenangan Partai PDI –P menyakini jika Jokowi mendukung Ganjar sebagai Calon presiden. *JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) 2024.*

Latar infomasi yang disajikan pun senanda dengan *lead* berita, yakni Kemantapan partai PDI – P tentang sikap Jokowi yang akan tetap mendukung Ganjar sebagai capres 2024.

Adapun kutipan yang ada bersumber dari Said Abdullah dan Jokowi yang berisi :

a. Said Abdulah : Menyatakan Jokowi hadir dalam acara di Batu tulis itu menandakan dukunganya kepada Ganjar. (Paragraf 4)

Said menyebutkan presiden menunjukan sikap waspada dan tetap konsisten dalam memilih siapa yang akan ia dukung. (Paragraf 7)

<sup>121</sup> Nicholas Ryan Aditya, “Soal Hasil Musra PDI-P Yakin Jokowi Dukung Ganjar Capres” [Berita Online Kompas.com 16 Mei 2023 16:15 WIB], tersedia di situs : <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/17/16155281/soal-hasil-musra-pdi-p-yakin-jokowi-dukung-ganjar-capres#> diakses pada 15 September 2023, pukul 15:15 WIB.

Tetapi sebagai kader moncong putih, Said optimis presiden akan memilih Ganjar. (Paragraf 8)

Said menambahkan tinggal menunggu waktu yang pas untuk memperlihatkan keberpihakannya karena pelunya banyak pertimbangan. (Paragraf 11)

b. Jokowi : Ia menyatakan massa untuk memberikan waktu pada ketua dan gabungan partai soal calon presiden dan wakil presiden. Jokowi juga bersedia menjadi penyakur aspirasi nama yang telah dihasilkan dalam acara Musra ke pada para ketua partai tersebut. Sehingga tidak perlu tergesa – gesa.

Sebagai *closing* wartawan membubuhkan pesan bahwa dalam acara Musyawarah rakyat tersebut berhasil memunculkan nama – nama calon presiden dan wakil presiden.

## 2. Skrip

Struktur skrip dari berita tersebut ialah : (*what*) partai PDI-Perjuangan menyakini Jokowi akan mendukung Ganjar dalam pemilu 2024. (*where*) Jakarta Indonesia. (*when*) berita dirilis pada 17 Mei 2023. (*who*) DPP Partai PDI Perjuangan Said Abdullah dan Presiden Jokowi. (*why*) PDI-P menilai presiden Jokowi benar akan memilih Ganjar sebagai calon presiden usia menghadiri acara deklarasi di Batu Tulis Bogor. (*how*) kedatangan presiden merupakan tanda kemandapan sikap untuk memilih Ganjar Pranowo.

## 3. Tematik

Unsur tematik dalam informasi tersebut adalah wartawan mengkonstruksi pada bagian depan hingga body dari berita berisikan pernyataan dari anggota PDI-P yaitu Said Abdullah mengenai kemandapan Presiden untuk mengusung Ganjar sebagai Calon presiden pilihanya. Pada akhir disajikan arahan Presiden dalam acara musyawarah rakyat yang diadakan oleh relawan pendukung Jokowi.

#### 4. Retoris

Pada perangkat retorik terdapat penulisan berbeda pada kata PDI-P, Jokowi, Ganjar dan Musra dengan menerapkan pewarna biru pada teks. Kata tersebut menandakan pihak yang terlibat dalam artikel berita tersebut dan kegiatan yang dilakukan.

#### 4. Pembahasan Berita Politik Jokowi turut Intervensi Bakal Calon Presiden 2024 di Medcom.id dan Kompas.com.

Berdasarkan penelusuran serta analisa yang dilakukan peneliti pada 10 berita yang diterbitkan oleh media Medcom.id dan Kompas.com, peneliti bermaksud memaparkan perangkat framing yang dipergunakan dalam konstruksi informasi dari media tersebut mengenai politik intervensi presiden Jokowi terhadap penentuan bakal calon presiden 2024 yang telah disebarluaskan kepada khalayak (masyarakat). Medcom.id merupakan kanal berita online dibawah naungan Media Group yang terafiliasi dengan Media Indonesia, Metro Tv, Lampung Post, partai Nasdem dan lain sebagainya. Partai Nasional demokrat atau nasdem yang memegang ideologi pancasila pada analisis framing milik medcom.id ialah dalam pengemas dan penyajian informasi berita yang dipublikasikan dapat menuai kontroversi. Dimana ditemukannya penggiringan opini dari berbagai pandangan dari narasumber didalam pemberitaan tersebut. Adapun argumentasi yang muncul disampaikan oleh narasumber yang masih memiliki perspektif yang sama dengan partai Nasdem yang terafiliasi dengan media Medcom.id. Diantaranya yang muncul dari kalangan partai oposisi pemerintah yang saat itu masih tergabung dalam koalisi perubahan yaitu dari partai Demokrat.

Sumber berita pada informasi dari Medcom.id berasal dari Presiden Joko Widodo, DPP Demokrat, ketua umum relawan pro Jokowi dan analisis politik. Dalam perangkat skrip ditemukan kurang lengkapnya penyajian unsur 5W + 1H dalam pemberitaan. Sehingga peneliti harus memprediksi sendiri makna dari unsur tersebut terutama dalam pemakaian unsur *why* dan *how*. Berita dalam Medcom.id pun ditulis secara singkat. Dimana dari awal



hingga akhir paragraf berisi narasi penjelas disertai satu informan. Seperti ditemukan dalam analisis berita 1- 4, sehingga hanya memiliki satu sudut pandang dan informasi yang diberikan terlihat kurang berimbang.

Medcom.id juga cenderung mendukung isu pemberitaan. Proses mendukung ini terlihat dari respon narasumber terhadap topik pembahasan mengenai presiden Jokowi intervensi bakal calon presiden 2024 sekaligus menggiring opini khalayak untuk mempercayai adanya tindakan ikut campur tersebut. Dibuktikan fokus utama Medcom.id mengenai ketidaknetralan presiden terdapat pada topik pertemuan 6 ketua partai pendukung pemerintah di Istana Merdeka, tidak diikutsertakannya Partai Nasional Demokrat (NasDem), pembentukan koalisi baru, hadirnya presiden dalam acara yang diadakan oleh relawan Pro Jokowi, serta bersedianya Presiden Joko Widodo untuk menjadi pembisik nama Calon presiden dan wakil presiden kepada ketua partai yang tergabung dalam koalisi politiknya.

Kompas.com merupakan pemekarsa media berbasis daring pertama di Indonesia yang memulai karir pada 14 september 1995. Kompas.com tampil dengan nama perdana Kompas online atau yang biasa disingkat dengan KOL. Kompas *online* turut tergabung dalam perusahaan PT. Kompas Cyber Media (KCM) tertanggal 6 Agustus 1998. Berbekal percampuran tersebut KOL semakin akrab dengan sebutan KCM. Hingga saat ini, Kompas.com terus berkembang dengan isi pemberitaan yang tidak hanya duplikat dari surat kabar Harian Kompas saja namun juga terdapat pembaruan informasi yang terjadi sehari – hari. Berita mengenai intervensi presiden Jokowi pertama kali muncul pada bulan Mei 2023, dimana telah memasuki tahun menjelang pemilihan umum dan menjadi salah satu alasan kenapa media menerbitkan informasi mengenai isu ini, sehingga terlihat menarik sekaligus sebagai bahan perbincangan oleh khalayak pada kuartal ke 2 di tahun 2023.

Berkaitan dengan pemberitaan mengenai topik keikutsertaan Presiden Jokowi dalam menentukan pemimpin selanjutnya, Kompas.com menerbitkan berita sebanyak 22 berita langsung yang didapat dari 4 Mei – 17 Mei 2023. Berbagai opini serta saran disampaikan narasumber dari

kalangan politisi partai mulai dari demokrat, pks, pdi- perjuangan, negarawan, maupun dari pakar hukum tata negara yang mampu memberikan penjelasan sekaligus informasi-informasi yang mendukung pemberitaan. Pemakaian unsur berita seperti *what, who, why, where, who* dan *how* dalam berita yang dipublikasikan Kompas.com cukup lengkap dan diletakan pada bagian awal yakni dalam teras berita.

Dalam struktur tematik pada berita Kompas.com pun dari paragraf awal hingga akhir meliputi teks penjelas dari wartawan serta dibubuhi 2 maupun lebih narasumber. Sehingga memperlihatkan bahwa framing yang dibawakan lebih *soft*, tidak terlalu menojolkan salah satu tokoh tertentu. Kompas.com lebih cenderung netral terhadap narasumber terkait isu campur tangan presiden dalam mengurus penerusnya meskipun beberapa redaksinya terdapat judul yang mendukung, namun Kompas.com bersifat netral agar tidak terlihat keberpihakannya.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan tentang pembingkaiian berita dengan menggunakan model framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang dilakukan terhadap media Medcom.id serta Kompas.com mengenai pemberitaan politik Presiden Jokowi turut intervensi bakal calon presiden 2024, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Bingkai pemberitaan yang dilakukan oleh media daring Medcom.id dan Kompas.com terdapat penekanan pada judul, narasumber, kutipan berita, serta foto jurnalistik yang mendukung informasi berita.
- Dari hasil analisa yang dilakuka peneliti dapat disimpulkan bahwa framing yang dilakukan pada media medcom.id lebih menggiring opini dan juga menyudutkan Presiden Jokowi. Dimana dibuktikan dengan setiap judul dan foto berita menonjolkalkan presiden sebagai aktor utama adanya tidakan intervensi. Kata yang dipergunakan seperti pejabat politik, tinggalkan sejarah buruk demokrasi, pembisik nama capres dan cawapres serta *king maker* juga dapat mendorong perspektif publik terhadap isu campur tangan tersebut.
- Pada konstruksi pemberitaan Medcom.id juga lebih condong pada politik kepentingan dan ideologi media yakni terafiliasi dengan partai Nasdem. Dapat dilihat dari pemilihan narasumber yang dijadikan informan masih memiliki pandangan yang sama dengan Medcom.id karena masih tergabung dalam koalisi Perubahan serta pada berita 1 dan 2 hanya menghadirkan narasi dari Presiden Joko Widodo menjadi tanda kurangnya keberimbangan informasi. Permasalahan yang menjadi fokus adanya intervensi presiden terletak pada topik pertemuan dengan 6 ketua partai politik di Istana Negara, Nasdem tidak diundang serta kesiapan presiden akan menyalurkan nama calon presiden dan wakilnya hasil dari pertemuan Musyawarah Rakyat yang diadakan oleh relawan Jokowi.

- Framing pada Kompas.com menekankan keberimbangan isi berita dimana dalam 1 artikel berita terdapat 2 sampai 3 narasumber. Narasi yang disajikan pun menggiring opini namun diringi dengan data fakta terkait. Contoh pada berita 2 terdapat narasi catatan Kompas.com pernyataan Jokowi soal Nasdem menjadi keterangan pertama yang diungkapkan presiden usai diusungnya Anies Baswedan sebagai calon presiden dari koalisi perubahan.
- Dari sisi judul dan isi, Kompas.com menunjukkan independesinya dimana berita tidak hanya cenderung pada perspektif dari presiden saja. Melainkan komentar atas isu intervensi dari berbagai pihak diantaranya dari partai oposisi yakni Demokrat dan PKS, tokoh Jusuf Kalla serta dari partai pendukung Jokowi ialah PDI – Perjuangan dimasukkan pada pemberitaan yang berbeda. Pokok fakta mengenai intervensi presiden Jokowi lebih beragam mulai dari pertemuan Presiden dengan ketua umum partai politik, tebang pilih partai yang diundang ke Istana, upaya Moeldoko merebut partai Demokrat, presiden siap menjadi penyalur suara aspirasi relawan kepada ketua umum partai koalisinya serta hadirnya Jokowi pada pengumuman ganjar sebagai calon presiden dari PDI- Perjuangan.

## **B. Saran**

1. Khalayak diharapkan dapat lebih kritis dan bersikap skeptis terhadap informasi yang tersebar dipublik ter khusus dari media daring. Karena kecepatan serta kemudahan dari media *online*, terkadang membuat masyarakat mudah tergiring menerima mentah – mentah pemberitaan tanpa mengecek ulang kebenarannya. Hal ini dapat berbahaya apabila, berita tersebut terdapat miskonsepsi maupun hoax yang disebarluaskan secara terus - menerus dan menjadi kebenaran. Karena tidak semua media dalam portal daring memberikan akurasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. Dalam publikasi pemberitaan Medcom.id sebagai media penyampai yang bertujuan untuk publik seyogyanya tidak terlalu condong pada politik kepentingan dan mendasarkan pemberitaan yang berpihak pada publik. Dimana dapat dilihat dalam judul berita Medcom.id lebih menggiring

opini untuk mempercayai adanya andil presiden dalam pengurusan bakal calon presiden dan wakil presiden serta informan pun berasal dari narasumber yang masih memiliki kepentingan yang relevan dengan media tersebut.

3. Bagi akademisi yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai analisis framing media baik dari *online* maupun cetak untuk dapat memperkuat topik yang dibahas dan pemilihan saluran serta berita yang diteliti karena akan berdampak pada hasil penelitian. Kemudian, dapat mempergunakan fenomena selain politik untuk diteliti pemingkaianya pada isu mengenai : agama, kriminalisasi, kebencanaan dan sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Nicholas Ryan. 2023. *Soal Hasil Musra PDI-P Yakin Jokowi Dukung Ganjar Capres* [Berita Online Kompas.com 16 Mei 2023 16:15 WIB], tersedia di situs : <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/17/16155281/soal-hasil-musra-pdi-p-yakin-jokowi-dukung-ganjar-capres#> diakses pada 15 September 2023, pukul 15:15 WIB.
- Andriyan, Dody Nur. 2018. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik (Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia)*. Yogyakarta : Deepublish.
- Ardiono, Icha. 2022. *Syarat Calon presiden dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Menurut Fiqih Siyashah*. Skripsi. Universitas Negeri Islam Ar - Raniry Banda Aceh.
- Astuti, Indriyani. 2023. *Ini Alasan Jokowi Tak Undang Nasdem Ke Istana* [Berita Online Medcom.id 04 Mei 2023 19:42 WIB], tersedia di situs : <https://www.medcom.id/nasional/politik/MkMQDqvk-ini-alasan-jokowi-tak-undang-nasdem-ke-istana> diakses pada 14 September 2023, pukul 09:15 WIB.
- Astuti, Indriyani. 2023. *Kumpulkan Ketum Parpol di Istana, Jokowi Ogah Disebut Cawe – Cawe Urusan Capres* [Berita Online Medcom.id 04 Mei 2023 20:02 WIB], tersedia di situs : <https://www.medcom.id/nasional/politik/xkE2ZXMK-kumpulkan-ketum-parpol-di-istana-jokowi-ogah-disebut-cawe-cawe-urusan-capres> diakses pada 14 September 2023, pukul 09:15 WIB.
- Bakal. 2016. *Pada KBBI Daring*. Diakses Pada 30 Mei 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bakal>.
- Baran, Stanley J. 2012. *Pengantar Komunikasi Massa Jilid 1 Edisi 5 : Melek Media & Budaya*. Jakarta : Erlangga.
- Barus, Sedia Willing. 2010. *Jurnalistik Petunjuk Teknis dan Menulis Berita*. Jakarta : Erlangga.
- Budiman, Kris. 2005. *Dasar – Dasar Jurnalistik : Makalah disampaikan dalam pelatihan Jurnalistik*. Info Jawa 12 – 15 Desember 2005.
- Chaidir, Ellydar. 2008. *Sistem Pemerintahan Negara republik Indonesia Pasca Perubahan Undang – Undang Dasar 1945*. Yogyakarta : Total Media.
- Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Darus Sunnah.

- Evandio, Akbar. 2023. *Jokowi Bertemu 6 Ketum Parpol di Istana Hingga 2,5 jam, Bahas Apa?* [Berita Online Bisnis.com 02 Mei 2023 23:21 WIB], tersedia di situs : <https://kabar24.bisnis.com/read/20230502/15/1652105/jokowi-bertemu-6-ketum-parpol-di-istana-hingga-25-jam-bahas-apa> diakses pada 06 Januari 2024, pukul 09:15 WIB.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta : LKiS.
- Fadilah, Ida. 2019. *Analisis Framing Berita Debat Pemilihan Predisen 2019 Pada Surat Kabar Jawa Pos*. Skripsi. Institute Agama Islam Negri Salatiga.
- Fauzi, Hepi. 2019. *Analisis Framing Model Pan dan Kosicki Berita Kampanye Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia 2019 Pada Media Cetak Harian Duta Masyarakat Rentang waktu 23 September – 30 November 2018*. Skripsi. Universitas Islam Negri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.
- Febriyanti, Zahra dan N.R Nadya Karina. 2021. *Konstruksi Berita CNN Indonesia Tentang Gibran Rakabuming Raka Pasca Pilkada Serentak Kota Solo 2020 : Analisis Framing Perspektif Zhongdang Pan – Gerald M. Kosicki*. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora* Vol. 2.
- Firmansyah, Teguh. 2023. *Hasto : Paloh Tak Diundang karena Rekam Jejak Anies* [Berita Online Republika.co.id 09 Mei 2023 08:47 WIB], tersedia di situs <https://news.republika.co.id/berita/rudbh377/hasto-paloh-tak-diundang-karena-rekam-jejak-anies> diakses pada 07 Januari 2024, pukul 09:00 WIB.
- Firmansyah, Teguh. 2023. *Pertemuan Parpol di Istana, Jokowi : Saya ini Petugas Publik dan Pejabat Politik* [Berita Online Republika.co.id 05 Mei 2023 09:08 WIB], tersedia di situs <https://news.republika.co.id/berita/rudbh377/hasto-paloh-tak-diundang-karena-rekam-jejak-anies> diakses pada 06 Januari 2024, pukul 013:00 WIB.
- Fitria, Sakarini Ashri . 2019. *Analisis Framming Pemberitaan Deklarasi Kampanye Damai pemilihan Presiden 2019 di Liputan6.com dan Tempo.co*. Skripsi. Universitas Islam Negri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.
- Fitriningsih, Catur Nugroho. 2021. *Analisis Framing Media Daring Tempo.co dan Kompas.com Terhadap Kecurangan Pilpres 2019. e-proceeding of management : Vol. 8, No. 5*.
- Hafidz, Masykurdin. 2023. *Mendudukkan ‘cawe-cawe’ Presiden dalam Pemilu* [Berita Online Detik.com 17 Julii 2023 14:10 WIB], tersedia di situs :

<https://news.detik.com/kolom/d-6827090/mendudukkan-cawe-cawe-presiden-dalam-pemilu> diakses pada 06 Januari 2023, pukul 10:15 WIB.

Hamidi, Jazim dan M. Husnu Abadi. 2021. *Intervensi Negara Terhadap Agama (Studi Konvergensi Atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama Di Indonesia)*. Yogyakarta : UII Press.

Handayani, Esti Sri, Ahmad Junaidi. 2018. *Pemberitaan kampanye Pemilihan Presiden 2019 Di Media Siber dan penerapan Elemen Jurnalisme ( Analisis Framing pada Okezone.com dan Suara.com)*. Koneksi Vol 2, No. 2.

Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Hasan , Supriyadi. 2018. *Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia*. Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Dekomrasi, 6 : 2.

Hennink M, Hutter, Bailey, A. 2020. *Qualitative Research Methods*. Sage Pub.

Intervensi. 2023. *Kata – kata bijak tentang intervensi*. <https://jagokata.com/kata-bijak/kata-intervensi.html> (diakses pada 30 November 2023 pukul 10:00 WIB).

Johanes, Leonarda. 2013. *Analisis Framing Pemberitaan Konflik Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Harian Media Indonesia Dan Koran Sindo*. Jurnal E- Komunikasi Vol. 1, No. 2.

Kompas.com. 2008. *About Us*. <https://inside.kompas.com/about-us> (Diakses tanggal 30 Mei 2023 pukul 11:00 WIB).

Kriyantono, Rakhmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta : Kencana.

Marlina, Rika. 2018. *Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 1.

Mantalean, Vitorio. 2023. *PKS Nilai Wajar Jokowi Dianggap “Cawe – Cawe” Karena Pilih Kasih Undang Ketum Partai ke Istana* [ Berita Online Kompas.com 08 Mei 2023 15:02 WIB], tersedia di situs : <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/08/15022501/pks-nilai-wajar-jokowi-dianggap-cawe-cawe-karena-pilih-kasih-undang-ketum> diakses pada 15 September 2023, pukul 13:15 WIB.

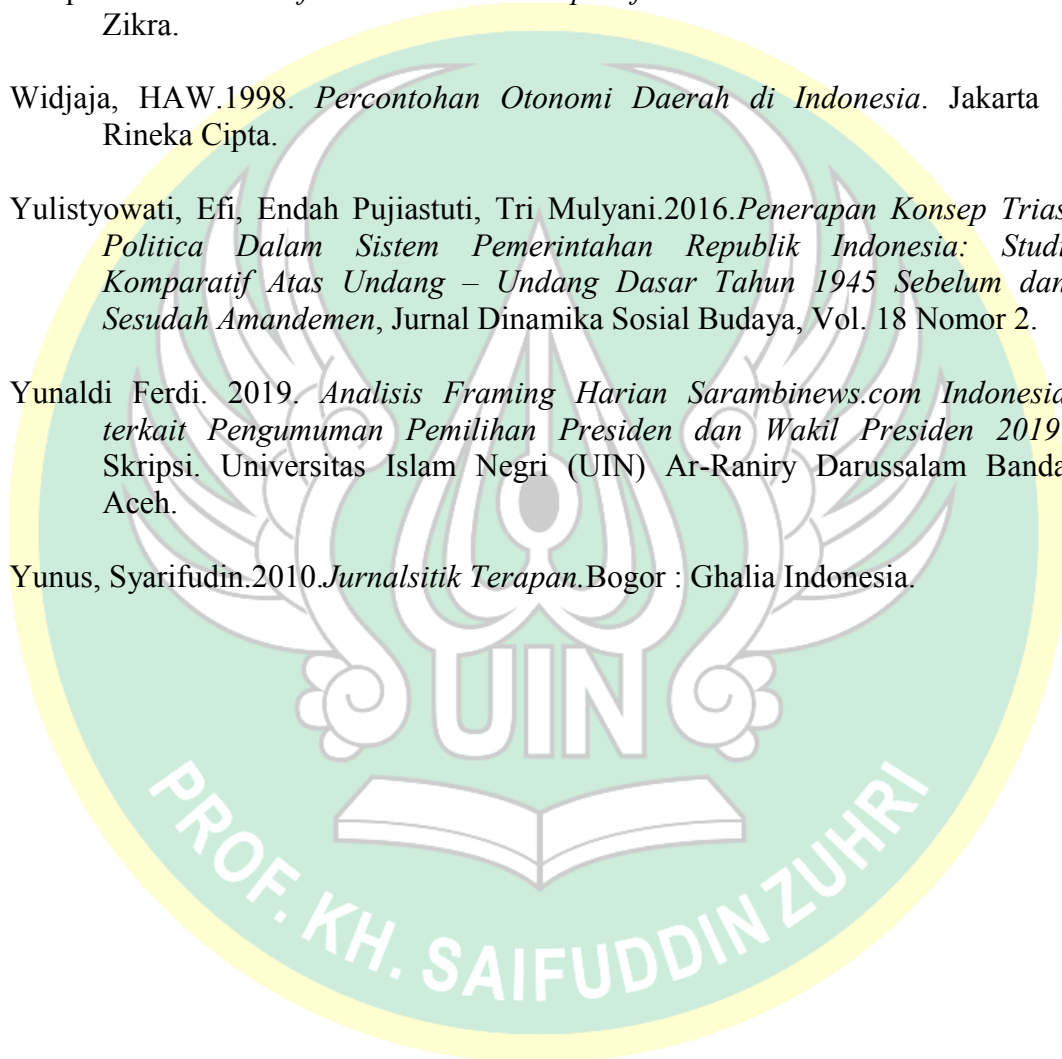


- Medcom.id. 2017. *Tentang Kami*. <https://www.medcom.id/tentangkami> ( Diakses Pada 19 Mei 2023 pukul 10:00 WIB).
- Medcom.id. 2017. *Cek Fakta*. <https://www.medcom.id/cekfakta/> (Diakses pada 16 September 2023 pukul 05:30 WIB).
- Medcom.id. 2017. *News Nasional*. <https://www.medcom.id/nasional/> (Diakses pada 16 September 2023 pukul 05:45 WIB).
- Medcom.id. 2017. *Pemilu 2024*. <https://www.medcom.id/tag/16179/pemilu-2024> (Diakses pada 16 September 2023 pukul 05:50 WIB).
- Medcom.id. 2017. *Foto*. <https://www.medcom.id/foto/> (Diakses pada 16 September 2023 pukul 06:00 WIB).
- Medcom.id. 2017. *Index*. <https://www.medcom.id/index/> (Diakses pada 16 September 2023 pukul 06:00 WIB).
- Medcom.id. 2017. *Redaksi*. <https://www.medcom.id/redaksi> (Diakses pada 14 Agustus 2023 pukul 11:15 WIB).
- Mubarak, Hafidz. 2023. *Jokowi Hadiri Acara Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia* [ Berita Online Republika.co.id 14 Mei 2023 18:09 WIB], tersedia di situs : <https://visual.republika.co.id/berita/run8d9314/jokowi-hadiri-acara-musyawah-rakyat-musra-indonesia> diakses pada 07 Januari 2023, pukul 11:15 WIB.
- Muhtadi, Asep Saeful. 2016. *Pengantar Ilmu Jurnalistik*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Namang, Raimundus Bulet. 2020. *Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol. 4 No. 2.
- Narimawati, Umi. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi*. Bandung : Agung Mulia 9.
- Nugraheny, Dian Erika. 2023. *Panggil 6 Ketum Parpol Ke Istana, Jokowi Saya Bukan “Cawe-Cawe”* [ Berita Online Kompas.com 04 Mei 2023 18:48 WIB], tersedia di situs : <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/04/18484061/panggil-6-ketum-parpol-ke-istana-jokowi-saya-bukan-cawe-cawe> diakses pada 15 September 2023, pukul 10:15 WIB.
- Nugraheny, Dian Erika. 2023. *Blak – blakan Jokowi Soal Nasdem : Tak Diundang Karena Sudah Punya Koalisi Sendiri* [ Berita Online Kompas.com 05 Mei

- 2023 06:14 WIB], tersedia di situs : <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/05/06143091/blak-blakan-jokowi-soal-nasdem-tak-diundang-karena-sudah-punya-koalisi> diakses pada 15 September 2023, pukul 11:15 WIB.
- Nurfaizi, Septiana Rizco. 2020. *Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasa Islam*. Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 18 No. 2.
- OSC. 2015. *Beasiswa OSC*. <https://osc.medcom.id/beasiswa> (Diakses pada 16 September 2023 pukul 05:00 WIB).
- Prabowo, Kautsar Widya. 2023. *Istana Negara Dipakai Berpolitik, Presiden Dianggap Tinggalkan Sejarah Buruk Demokrasi* [ Berita Online Medcom.id 07 Mei 2023 23:15 WIB], tersedia di situs : <https://www.medcom.id/nasional/politik/0Kv0o6wb-istana-negara-dipakai-berpolitik-presiden-dianggap-tinggalkan-sejarah-buruk-demokrasi> diakses pada 14 September 2023, pukul 10:15 WIB.
- Prabowo, Kautsar Widya. 2023. *Kriteria Pemimpin Arahkan Jokowi : Bukan Hanya Duduk di Istana* [Berita Online Medcom.id 14 Mei 2023 16:08 WIB], tersedia di situs : <https://www.medcom.id/nasional/politik/5b2rr8eb-kriteria-pemimpin-arahan-jokowi-bukan-hanya-duduk-di-istana> diakses pada 14 September 2023, pukul 11:00 WIB.
- Prima, Adri. 2023. *Tak Cuma Cawe – Cawe, Heboh Jokowi Jadi Pembisik Nama Capres dan Cawapres* [ Berita Online Medcom.id 16 Mei 2023 00:21 WIB], tersedia di situs : <https://www.medcom.id/nasional/politik/yNL3349K-tak-cuma-cawe-cawe-heboh-jokowi-jadi-pembisik-nama-capres-dan-cawapres> diakses pada 14 September 2023, pukul 13:15 WIB.
- Rahman, Moh Faiz Ubaidi. 2019. *Citra K.H. Ma'ruf Amin Dalam Pilpres 2019 (Studi Analisis Framing Media Daring Kumparan.com)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rakhmat, Jamaluddin. 2000. *Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan dan Media)*. Bandung : PT Remaja.
- Rakhmat, Jamaluddin. 2001. *Komunikasi Politik (Khalayak dan Efek)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Romli, Asep Syamsul M. 2020. *Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online*. Bandung : Nuansa Cendikia.

- Saptohutomo, Aryo Putro. 2023. *Denny Indrayana Sikapi Jokowi Intervensi Urusan Pilpres Sangat Nyata* [Berita Online Kompas.com 09 Mei 2023 23:53 WIB], tersedia di situs : <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/09/23535251/denny-indrayana-sikap-jokowi-intervensi-urusan-pilpres-sangat-nyata> diakses pada 15 September 2023, pukul 14:15 WIB.
- Santana K, Septiawan. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Saputri, Dessy Suciati. 2023. *Jokowi Sebut Pertemuan Ketum Parpol Bukan 'cawecawe' Tapi Sekedar Diskusi* [Berita Online Republika.co.id 04 Mei 2023 20:45 WIB], tersedia di situs : <https://news.republika.co.id/berita/ru4zjd409/jokowi-sebut-pertemuan-ketum-parpol-bukan-cawecawe-tapi-sekedar-diskusi> diakses pada 06 Januari 2024, pukul 11:00 WIB.
- Satnyoto, Andaru. 2017. *Justifikasi Intervensi Internasional Dalam Konflik Suatu Negara. Jurnal Asia Pasific Studies* Vol. 1.
- Siregar, Ashadi, dkk. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. (Yogyakarta : Kanisius).
- Siyoto, Sandu & M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing.
- Sobur, Alex. 2012. *Analisis Teks Media : Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya).
- Suciati, Dessy Suciati. 2023. *Jokowi Ungkap Alasan tak Undang Surya paloh di Pertemuan Ketum Parpol* [Berita Online Republika.co.id 04 Mei 2023 19:20 WIB], tersedia di situs : <https://news.republika.co.id/berita/ru4vmv409/jokowi-ungkap-alasan-tak-undang-surya-paloh-di-pertemuan-ketum-parpol> diakses pada 07 Januari 2024, pukul 14:05 WIB.
- Suhandang, Kustadi. 2004. *Pengantar Jurnalistik : Seputar organisasi, Produk, & Kode Etik*. (Bandung : Penerbit Nuansa).
- Supriyatin, Sasa Iaras. 2020. *Strategi Divisi Cek Fakta Medcom.id Melawan Hoaks Isu Agama Dalam Dakwah Ramzi*. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Tabrani, Walidin, & W., Saefullah. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. FTK Ar-Raniry Press.

- Verina, Atika, Nursyiwani Efendi, dan Aidinil Zetra. 2019. *Proses Intervensi Politik Pada Pengangkatan Sekretaris KPU Kota Padang*. NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol. 6 No. 2.
- Wahidin, Samsul. 2014. *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Waspada. 2017. *Profesi Jurnalistik Perspektif Hukum Islam*. Makassar : Al-Zikra.
- Widjaja, HAW.1998. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani.2016.*Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 18 Nomor 2.
- Yunaldi Ferdi. 2019. *Analisis Framing Harian Sarambinews.com Indonesia terkait Pengumuman Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019*. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Yunus, Syarifudin.2010.*Jurnalsitik Terapan*.Bogor : Ghalia Indonesia.



## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### A. Teks Berita Medcom.id

#### Ini Alasan Jokowi Tak Undang NasDem ke Istana



Indriyani Astuti • 04 Mei 2023 19:42

Jakarta: Presiden Joko Widodo ([Jokowi](#)) mengakui sengaja tak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan pimpinan partai politik pendukung pemerintah. Jokowi menyebut NasDem sudah punya koalisi sendiri.

"Ya memang tidak diundang. NasDem itu ya, kita bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang baik," ungkap Jokowi pada wartawan se usai mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Kamis, 4 Mei 2023.

Jokowi tak menampik banyak pembahasan soal politik dalam pertemuan di Istana. Khususnya, terkait strategi politik menghadapi [Pemilu 2024](#).

"Ini kan memiliki strategi besarnya apa. ya masa yang di sini tahu strateginya. Dalam politik itu wajar-wajar saja," ungkapnya.

Jokowi mengungkapkan pertemuan berlangsung sekitar tiga jam. Ia merasa tak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Kendati, banyak pihak menilai pertemuan tersebut tak elok dilakukan di Istana jika membahas soal [Pemilu 2024](#).

"Biasa, dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Berarti biasa kalau saya bicara politik, ya boleh dong, ya kan? Saya bicara berkaitan dengan itu

bisa dong. Kan itu tugasnya seorang presiden," ungkap Jokowi.

Jokowi mengumpulkan ketum partai politik pendukung pemerintah di Istana, Selasa, 2 Mei 2023. Pertemuan dihadiri enam ketua umum parpol pendukung pemerintah, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, dan PAN.



## Kumpulkan Ketum Parpol di Istana, Jokowi Ogah Disebut Cawe-Cawe Urusan Capres



Indriyani Astuti • 04 Mei 2023 20:02

Jakarta: Presiden Joko Widodo ([Jokowi](#)) menepis tuduhan cawe-cawe dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) 2024. Penilaian itu mencuat setelah Jokowi mengumpulkan enam ketua umum partai politik (parpol) pendukung pemerintah di Istana.

"Bukan cawe-cawe. Wong itu diskusi saja kok (disebut) cawe-cawe," ujar Jokowi usai mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Mei 2023.

Selain sebagai presiden, Jokowi menyebut dirinya juga pejabat politik. Jadi, ia menilai tak ada yang salah jika berdiskusi dengan para ketua umum parpol di Istana.

"Saya ini juga pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres, itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah bolak-balik saya sampaikan kan?" ucap Jokowi.

[Jokowi](#) merasa tak ada aturan konstitusi yang dilanggar dalam pertemuannya dengan para ketua umum parpol di Istana. Ia menilai wajar bila diundang atau mengundang para ketua umum parpol untuk berdiskusi.

"Tapi kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-

boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik," tutur dia.

Jokowi mengumpulkan enam ketua umum parpol di Istana, Selasa, 2 Mei 2023. Keenamnya yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ia tak menampik banyak hal dibahas dalam pertemuan selama tiga jam itu. Termasuk, urusan [Pemilu 2024](#).





## Istana Negara Dipakai Berpolitik, Presiden Dianggap Tinggalkan Sejarah Buruk Demokrasi



Kautsar Widya Prabowo • 07 Mei 2023 23:15

Jakarta: [Partai Demokrat](#) menilai Presiden Joko Widodo ([Jokowi](#)) telah meninggalkan sejarah buruk demokrasi di ujung kepemimpinannya. Sebab, Presiden telah bersikap tidak netral jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketidaknetralan Presiden Jokowi terlihat ketika menjadikan Istana Negara sebagai tempat konsolidasi politik untuk kontestasi [Pilpres 2024](#). Saat itu, Presiden Jokowi juga tak mengundang Partai NasDem yang dinilai memiliki calon presiden (capres) yang berbeda pandangan.

"Sejarah akan mencatat ini sebagai legacy yang buruk dalam perjalanan demokrasi bangsa kita pascareformasi," ujar Deputy Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada Medcom.id, Minggu, 7 Mei 2023.

Kamhar juga menyebut Presiden Jokowi bersikap aktif dalam terbentuknya koalisi baru. Bahkan beberapa kali secara terang-terangan mendukung salah satu calon presiden (capres).

"Tidak etis dan mencederai demokrasi," tuturnya.

Untuk itu, Kamhar menyarankan Presiden Jokowi belajar dari kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, SBY dianggap berhasil menjaga kualitas pemilu secara demokratis.

"Tercatat dengan tinta emas dalam sejarah sebagai seorang negarawan dan demokratis sejati," bebarnya.



## Kriteria Pemimpin Arahkan Jokowi: Bukan Hanya Duduk di Istana



Kautsar Widya Prabowo • 14 Mei 2023 16:08

Jakarta: Presiden Joko Widodo ([Jokowi](#)) memberikan sejumlahh arahan kepada relawannya dalam menentukan kriteria calon presiden (capres) pada 2024. Salah satunya ialah pemimpin yang memiliki sosok yang mampu memajukan Indonesia dari sisi mana saja.

"Bukan (pemimpin yang kerja) rutinitas, bukan hanya duduk di istana, bukan hanya rutinitas, dan tanda tangan, bukan itu. Dia harus tahu bagaimana membangun strategi negara, strategi ekonomi, strategi politik," ujar Presiden Jokowi dalam memberikan sambutan pada acara Musyawarah Rakyat (Musra), di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 14 Mei 2023.

Selain itu, ia meminta relawannya dapat memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat. Sehingga tau isi hati rakyat, kebutuhan rakyat, hingga bekerja keras untuk rakyat.

Sosok pemimpin Indonesia, kata [Jokowi](#) juga harus berani mengambil keputusan. Sehingga dapat memajukan Indonesia dengan baik ke depannya.

"Pemimpin itu, harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini kekuatan bangsa ini apa, dia harus ngerti dia harus tahu," bebernya.

[Jokowi](#) menekankan kompetensi itu dibutuhkan karena Indonesia berhadapan dengan negara-negara maju. Ia meyakini dalam 13 tahun lagi

Indonesia akan berada dalam jajaran negara maju.

"Oleh sebab itu sekali lagi, memilih pemimpin di tahun 2024 ini sangat krusial sangat penting sekali harus tepat dan benar," jelasnya.



## Tak Cuma Cawe-cawe, Heboh Jokowi Jadi Pembisik Nama Capres dan Cawapres



Adri Prima • 16 Mei 2023 00:21

Jakarta: Cawe-cawe urusan [Pilpres](#) melekat dengan Presiden [Jokowi](#) akhir-akhir ini. Terlepas dari kritikan tersebut, nyatanya presiden tetap menunjukkan antusiasnya dalam urusan Pilpres 2024 dengan menghadiri acara musyawarah rakyat (Musra) yang digelar Relawan Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyatakan dirinya akan membisiki partai-partai soal capres-cawapres usulan musra. Tidak cukup itu saja, Presiden Jokowi juga berniat kembali mengumpulkan ketua umum partai politik dalam waktu dekat usai menghadiri musra.

Juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra secara tegas mengkritik tindakan Jokowi. "(Presiden) seharusnya fokus mengurus rakyat di masa akhir jabatannya," kata Herzaki Mahendra Putra dikutip dari Metro TV, Senin, 15 Mei 2023.

Menurut Herzaki, bukan tugas Presiden untuk mencari penerusnya. Hal itu seharusnya tugas partai politik dan relawan.

Relawan bantah Jokowi cawe-cawe Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi tidak sepakat dengan istilah Presiden Jokowi melakukan cawe-cawe di Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu merupakan sebuah framing.

"Bagi kami Presiden Jokowi tidak cawe-cawe, tapi Presiden Jokowi ingin

bertanggung jawab terhadap keberlanjutan proses politik dan demokrasi," jelas Budi.

Ia menuturkan bahwa musra yang digelar oleh relawan Projo adalah suara rakyat bukan suara elite. "Itu merupakan bentuk tanggung jawab, bukan cawe-cawe. Musyawarah rakyat ini momentum partisipasi sehingga partisipasi sangat diperlukan pada demokrasi," kata Budi.

Relawan Projo mengaku hanya menyaring nama-nama yang terekam dalam proses musyawarah rakyat yang dilakukan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, hak pencalonan capres adalah wewenang partai politik atau gabungan partai politik.

Urusan capres dan cawapres bukan ranah Presiden. Di sisi lain, Analis Politik Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam menilai apa yang dilakukan Jokowi pada dasarnya bukan ranah seorang presiden.

"Problemnya adalah ketika presiden terlalu jauh masuk dalam ruang yang sebenarnya bukan wilayah dia. Kemudian dia berpotensi mencerna itu sebagai sebuah upaya presiden untuk menunjukkan beliau masih ingin menjadi 'king maker' sekaligus menentukan ranah yang sebenarnya yang bukan ranah beliau," jelas Umam.

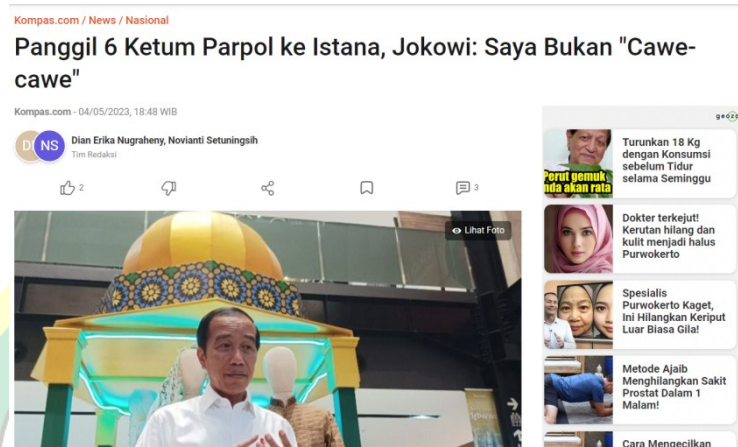
Umam menyebut seorang presiden adalah simbol negara. Suatu simbol negara harus memayungi semua elemen kekuatan negara.

"Rumus pemilu yang terbuka, adil, dan demokratis mensyaratkan hadirnya kekuasaan negara yang netral," ungkap Umam.

"Jika presiden menunjukkan keberpihakannya, maka hal itu berpotensi menyeret, mempolitisasi terjadinya proses yang tidak dikehendaki," pungkasnya.

B. Teks Berita Kompas.com  
Kompas.com / News / Nasional

## Panggil 6 Ketum Parpol ke Istana, Jokowi: Saya Bukan "Cawe-cawe"



Kompas.com - 04/05/2023, 18:48 WIB

Dian Erika Nugraheny, Novianti Setuningsih (Tim Redaksi)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal anggapan bahwa dirinya cawe-cawe atau ikut-ikutan dalam persoalan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal itu terkait pertemuan antara dirinya dengan enam orang ketua umum (ketum) partai politik (parpol) di Istana Merdeka pada Selasa (2/5/2023).

"Bukan cawe-cawe. Wong itu diskusi saja kok (disebut) cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Saya bukan cawe cawe," ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Jokowi kemudian menegaskan lagi bahwa urusan calon presiden (capres) ataupun calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024 sepenuhnya urusan parpol atau gabungan parpol.

"Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi, kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini juga menekankan tidak ada konstitusi yang dilanggar dari peristiwa mengundang ketum parpol ke Istana.

Oleh karenanya, Jokowi meminta publik mengerti bahwa selain pejabat publik, dirinya juga merupakan politikus.

"Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik," ujarnya.

Diketahui, pada Selasa malam, Presiden Jokowi memanggil enam ketum parpol ke Istana Merdeka.

Enam pimpinan partai politik yang hadir adalah Ketum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.

Prabowo yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, salah satu arahan yang disampaikan Presiden Jokowi kepada para ketum partai adalah terkait dinamika politik.

Menurutnya, Presiden Jokowi mengingatkan agar para ketum partai kompak dan selalu rukun.

"Ya kan sudah diberitahu bahwa kami diingatkan oleh Pak Jokowi, bangsa kita dalam posisi yang menentukan, kita sekarang dalam posisi yang sangat memungkinkan. Kalau kita pandai mengelola, kalau kita rukun, kalau pemimpin-pemimpinnya kompak kita bisa menjadi negara yang sangat maju, negara makmur," kata Prabowo dikutip dari TribunJogja.com.

Selain itu, Presiden Jokowi disebut mengingatkan agar pemilu mendatang digelar dengan sejuk dan gembira.

Prabowo juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin agar semua ketum partai mendukung siapa pun yang nantinya dipilih rakyat pada pilpres 2024.



Kompas.com / News / Nasional

## Blak-blakan Jokowi soal Nasdem: Tak Diundang karena Sudah Punya Koalisi Sendiri

Kompas.com / News / Nasional

### Blak-blakan Jokowi soal Nasdem: Tak Diundang karena Sudah Punya Koalisi Sendiri

Kompas.com - 05/05/2023, 06:14 WIB

Dian Erika Nugraheny, Bagus Santosa  
Tim Redaksi



Kompas.com - 05/05/2023, 06:14 WIB

Dian Erika Nugraheny, Bagus Santosa (Tim Redaksi)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal absennya Partai Nasdem dalam pertemuan enam ketua umum (ketum) parpol dengan dirinya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (2/5/2023).

Jokowi mengungkapkan, dirinya tidak mengundang Nasdem ke pertemuan itu.

"Ya memang (Nasdem) enggak diundang," ujar Jokowi saat memberikan keterangan kepada wartawan usai meninjau kegiatan perdagangan di pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Mendengar pernyataan Jokowi, para jurnalis lantas menanyakan penyebabnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menegaskan harus bicara apa adanya, bahwa Nasdem sudah memiliki koalisi sendiri untuk menghadapi Pemilu 2024. Di sisi lain, enam parpol lain juga ingin membentuk koalisi lain untuk hal yang sama.

"Nasdem itu, ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain," jelas Jokowi.

Dia menilai, enam parpol koalisi pendukung pemerintah tentu memiliki strategi besar untuk persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sehingga, sebagai parpol

yang telah memiliki koalisi sendiri, lanjut Jokowi, tidak pas jika Nasdem mengetahui strategi koalisi lain.

"Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang di sini tahu strateginya. Kan mestinya endak seperti itu," paparnya.

Kendati peta koalisi sudah berubah, tetapi Jokowi menegaskan kondisi itu biasa terjadi dalam dunia politik.

"Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa," tegasnya.

Pada Selasa, 2 Mei 2023, Jokowi mengadakan pertemuan dengan enam ketua parpol koalisi pendukung pemerintah di Istana Merdeka.

Pertemuan yang digelar malam hari itu diikuti oleh enam ketua umum. Mereka adalah Ketua PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono.

Sementara itu, Ketua Partai Nasdem Surya Paloh tidak hadir pada Selasa malam. Sejak saat itu, belum ada keterangan resmi dari Jokowi soal absennya Nasdem dalam pertemuan.

Ketua Gerindra, Prabowo Subianto saat usai pertemuan hanya mengatakan bahwa Surya Paloh sedang berada di luar negeri.

Hal yang sama juga disampaikan Plt Ketua PPP Muhammad Mardiono. Namun, keduanya tidak memberikan jawaban saat ditanya apakah Nasdem sebenarnya diundang atau tidak pada pertemuan Selasa malam.

Adapun, Nasdem merupakan parpol pendukung dan pengusung Jokowi dalam dua kali pemilu, yakni Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

Catatan Kompas.com, pernyataan Jokowi soal Nasdem pada Kamis ini pun menjadi keterangan pertama yang disampaikan usai partai tersebut resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024.

Sebab, selama ini, publik hanya menduga-duga soal seperti apa hubungannya Jokowi dengan Nasdem usai deklarasi terhadap Anies Baswedan Oktober 2022.

Terlebih parpol-parpol lain, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang bukan termasuk koalisi pendukung pemerintah akhirnya menyusul langkah Nasdem dalam mendukung Anies.

### **Pertemuan enam ketum parpol bukan cawe-cawe**

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa dirinya tidak cawe-cawe (ikut-ikutan memberikan pengaruhnya) kepada parpol koalisi untuk Pemilu 2024 sebagaimana disinggung sejumlah pihak baru-baru ini. Menurut Jokowi, pertemuannya dengan enam ketum parpol di Istana merupakan ajang diskusi.

"Cawe-cawe apa? Bukan cawe-cawe. Wong itu diskusi saja kok (disebut) cawe-cawe. Diskusi," kata Jokowi.

Dia pun mnyinggung soal perannya sebagai pemimpin negara yang juga merupakan pejabat politik. Menurutnya, urusan pencalonan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) menjadi urusan parpol dan gabungan parpol.

Akan tetapi, jika dirinya mendapat undangan dari parpol atau mengundang parpol tentu boleh dilakukan. Jokowi menilai hal itu tak melanggar konstitusi.

"Saya bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah bolak-balik saya sampaikan kan? Tapi kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja," jelasnya.

"Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita (saya) ini juga politisi, tapi juga pejabat publik," kata Jokowi.

Sebagai individu yang menjalankan kedua peran itu, Jokowi menganggap dirinya sah-sah saja jika berbicara politik dengan para Ketum parpol.

Hal yang sama juga berlaku saat dirinya membahas soal pelayanan publik.

Jokowi menegaskan, dua peran tersebut sama-sama menjadi tugas seorang Presiden.

"Saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Ya kan?" ungkapnya.

"Saya berbicara berkaitan dgn pelayanan publik juga bisa dong. Ya memang ini tugas, tugas seorang Presiden," katanya.

Namun demikian, lanjut Jokowi, apabila nanti sudah ada ketetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai capres maupun cawapres peserta Pemilu 2024 barulah dia tak akan ikut campur.

"Hanya memang kalau sudah ada ketetapan KPU saya itu," lanjutnya seraya mengisyaratkan angkat tangan.

### **Isi pertemuan dengan 6 ketum parpol**

Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan isi pertemuannya dengan enam ketum parpol di Istana Merdeka. Menurutnya, ada banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

Presiden tidak secara spesifik mengungkapkan apa saja yang dibahas. Hanya saja dia menegaskan, banyak sekali yang dibicarakan.

"Yang dibicarakan banyak sekali, (pertemuan) tiga jam lho. Banyak sekali," ujar Jokowi.

Ketika ditanya apakah pertemuan juga membahas kandidat calon wakil presiden (cawapres) untuk kandidat calon presiden (capres) Ganjar Pranowo, Jokowi pun tak menjawab secara spesifik. Begitu pula saat disinggung soal adanya pembahasan koalisi besar.

"Semuanya dibicarakan. Semua dibicarakan, tidak hanya itu saja. Utamanya yang berkaitan dengan politik negara ke depan akan seperti apa, tantangannya negara ini apa," tutur Jokowi.

"Dan itu dibutuhkan kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat, yang dipercaya oleh rakyat, yang dipercaya internasional," katanya.

### **Nasdem tegaskan tetap dukung Jokowi**

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate menilai tak masalah apabila partainya sudah tidak dianggap sebagai parpol pendukung Presiden Jokowi.

Anggapan itu muncul setelah Jokowi mengadakan pertemuan dengan enam ketua umum parpol pendukungnya tanpa kehadiran Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

"Kalau soal anggap-menganggap itu adalah dinamikanya politik, enggak ada masalah itu, yang penting kan komitmennya," kata Plate di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis siang.

Menteri Komunikasi dan Informatika itu menegaskan bahwa komitmen Nasdem untuk mendukung pemerintahan Jokowi hingga berakhirnya masa jabatan pada 2024 mendatang tidak tergoyahkan.

Ia lantas mengingatkan bahwa Nasdem adalah partai politik yang mendukung Jokowi dalam Pemilu 2014 dan 2019.

"Itu komitmen Nasdem, kita tidak akan geser dari situ. Setelah 2024 ke sana, itu kan lain lagi," katanya.

Lebih lanjut, Plate mengatakan, Surya Paloh tidak hadir dalam pertemuan Jokowi dengan enam ketua umum parpol karena sedang berada di luar negeri. Namun, ia mengaku tidak tahu apakah Surya Paloh diundang atau tidak ke pertemuan tersebut.

"Saya tidak cek. Saya kemarin juga ada di Labuan Bajo cek persiapan KTT ASEAN," ujar Johnny G Plate.

### **Pesan dari Surya Paloh**

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pesan terhadap pertemuan yang diadakan Presiden Jokowi dengan enam ketum parpol.

Dalam pesan yang disampaikan melalui Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem Charles Meikyansah, Surya Paloh menyatakan menghormati pertemuan tersebut.

"Segala pertemuan untuk kepentingan bangsa dan negara, harus selalu kita hargai dan hormati. Termasuk pertemuan tadi malam," kata Charles kepada wartawan, Rabu (3/5/2023).

Bukan tanpa sebab, menurut Charles, Surya Paloh melihat pertemuan tadi malam begitu penting, khususnya bagi bangsa dan negara.

Apalagi, Surya Paloh memandang banyak persoalan yang dihadapi bangsa dan negara saat ini.

"Karena banyak masalah kebangsaan yang sangat penting dibicarakan dan diselesaikan bersama-sama," ujar Charles.

Charles lantas menegaskan kembali bahwa Surya Paloh tidak hadir dalam pertemuan itu karena tidak diundang.

Di sisi lain, Surya Paloh memang tengah berada di luar negeri. Meski demikian, Surya Paloh tetap menghormati pertemuan itu meski tanpa dirinya.



Kompas.com / News / Nasional

## PKS Nilai Wajar Jokowi Dianggap "Cawe-cawe" karena Pilih Kasih Undang Ketum Partai ke Istana



Kompas.com - 08/05/2023, 15:02 WIB

Vitorio Mantalean, Novianti Setuningsih Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat lumrah dianggap mengintervensi politik jelang pemilu karena tebang-pilih mengundang partai politik ke Istana Merdeka pada Selasa (2/5/2023) lalu.

Penggunaan fasilitas negara dalam hal ini Istana Merdeka seharusnya dipakai untuk membahas masalah kenegaraan, dan jika membahas masalah kenegaraan seharusnya Jokowi tidak tebang-pilih.

"Secara hukum tidak ada yang dilanggar, tapi secara etika beliau mesti paham sosok (perbedaan) pribadi Jokowi dan presiden," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, ditemui di kantor KPU RI, Senin (8/5/2023).

Ia lantas menyoroti bagaimana Jokowi mengaku sengaja tak mengundang Partai Nasdem karena partai besutan Surya Paloh itu dianggap sudah membentuk koalisi sendiri.

Padahal, meski menyongsong Pemilu 2024 bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama PKS dan Demokrat yang merupakan partai oposisi, Nasdem belum secara resmi keluar sebagai partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi.

"Kalau (undangan Jokowi di Istana Merdeka sebagai) presiden, mestinya kumpulnya bahas tentang negara, Nasdem diundang saja. Kalau perlu, PKS diundang semua," kata anggota Komisi II DPR RI itu.

"Kalau mau bahas yang khusus, di tempat lain, jangan di Istana Negara," ujar Mardani melanjutkan.

Mardani juga menyoroti bagaimana Jokowi kerap menampilkan diri cawe-cawe dalam pembentukan Koalisi Besar jelang Pemilu 2024 dan menyampaikan preferensi politiknya terhadap kandidat penerusnya.

Menurutnya, presiden seharusnya membiarkan dinamika politik berkembang dengan sendirinya dan tak menutup kemungkinan munculnya tiga sampai empat poros politik.

Sebab, jika Koalisi Besar beranggotakan banyak partai politik jadi terbentuk, maka harapan munculnya ragam poros politik tak akan terwujud. Ia juga mengamini bahwa PKS berharap ada tiga sampai empat poros politik pada pemilu mendatang.

"Kalau Koalisi Besar (terbentuk), nanti pasangan calon (presiden-wakil presidennya) cuma dua, dan itu sangat bisa ditafsirkan negara intervensi, presiden dalam hal ini," kata Mardani.

Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) juga mengkritik Jokowi untuk masalah yang sama.

Ia menganggap Jokowi terlalu jauh cawe-cawe urusan elektoral, padahal masih berstatus sebagai Kepala Negara yang seharusnya bertindak independen.

"Menurut saya, presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY. Itu (ketika jabatan) akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," ujar JK.

Namun, ia mengatakan, sah-sah saja Jokowi mengundang pemimpin partai politik jika yang menjadi bahasan merupakan permasalahan bangsa dan negara.

"Tapi, kalau bicara pembangunan saja, mestinya Nasdem diundang. (Kalau tidak) Berarti ada pembicaraan politik," kata Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu.



Selain itu, JK juga menyinggung bahwa pemilu yang baik adalah pemilu yang diikuti lebih dari tiga pasangan calon.

“Kita bukan Amerika yang cuma dua, kita partainya banyak. Jadi kalau baik, tiga (paslon) wajar. Bukan soal jumlahnya tapi proses demokrasinya berjalan dengan baik,” ujar JK.

Kritik sejenis juga dilontarkan Partai Nasdem, partai yang secara terang-terangan tidak diundang Jokowi ke Istana pada Selasa lalu lantaran sudah dianggap punya koalisi sendiri.

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, sebelumnya mengaku partainya merasa dieksklusi oleh Jokowi padahal tak pernah secara resmi berpamitan dari status sebagai partai politik pendukung pemerintah.



Kompas.com / News / Nasional

Menuju Pemilu 2024

## Denny Indrayana Sikap Jokowi Intervensi Urusan Pilpres Sangat Nyata



Kompas.com - 09/05/2023, 23:53 WIB

Aryo Putranto Saptohutomo Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara [Denny Indrayana](#) menilai sikap [Presiden Joko Widodo](#) (Jokowi) yang [diduga](#) ikut campur menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang sudah sangat jelas terlihat.

Menurut mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, jika Presiden Jokowi memang berniat menjadikan Pemilu dan [Pilpres 2024](#) sebagai kontestasi politik yang demokratis maka seharusnya bersikap tegas kepada Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Denny mengatakan, Presiden Jokowi tidak mengambil langkah tegas terhadap Moeldoko ketika berkonflik dengan [kepengurusan Partai Demokrat](#) yang saat ini dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

"Menurut saya, kalau teman-teman masih berpikir Pak Jokowi tidak kok melakukan langkah cawe-cawe, sodorkan saja soal Moeldoko ini," kata Denny Indrayana dalam diskusi di kanal Youtube Paramadina Public Policy Institute pada Selasa (9/5/2023).

"Kalau saya menjadi wartawan, buat teman-teman wartawan yang hadir. Saya titip pertanyaan ke Presiden Jokowi. 'Bapak Presiden, kenapa Bapak mendiamkan

langkah Kepala Staf Presiden Bapak, Jenderal Moeldoko yang coba mengganggu kedaulatan Partai Demokrat?" sambung Denny.

Denny menyampaikan, jika Presiden Jokowi menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan itu adalah hak politik Moeldoko maka hal itu keliru.

Menurut Denny, mengambil hak orang lain secara paksa bukanlah hak politik melainkan pencurian.

"Saya betul-betul ingin bertanya kepada beliau kenapa presiden Jokowi membiarkan. Ini menurutnya, harusnya tidak terbantahkan sebagai bentuk cawe-cawe Presiden Jokowi," kata Denny.

Denny kemudian melanjutkan kembali, apabila nanti Presiden Jokowi menjawab terkait dengan penetapan KPU maka menurutnya Presiden perlu melihat kembali Undang-Undang Pemilu dan peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022.

Menurut Denny yang merupakan pakar hukum tata negara itu, dalam aturan tersebut dikatakan bahwa tahapan pemilu termasuk Pilpres dilaksanakan wajib paling lambat 20 bulan sebelum tanggal pencoblosan.

Dengan demikian, menurutnya apabila tanggal pencoblosannya 14 Februari 2024, maka tahapan pemilu sebenarnya sudah berjalan sejak 14 Juni 2022 atau hampir satu tahun yang lalu.

"Karena itu harusnya Presiden tidak bisa mengatakan baru akan diam setelah penetapan pasangan calon. Itu sama saja beliau tidak paham bahwa tahapan pilpres sudah berjalan sudah hampir satu tahun yang lalu," kata Denny.

"Apapun, kalau presiden kemudian ikut menentukan strategi koalisi, ikut menentukan strategi pasangan calon itu sudah keluar dari prinsip presiden sebagai wasit pilpres yang harusnya adil dan netral," ujar Denny.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan puja-puji kepada Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang diusung menjadi bakal capres oleh partainya dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Sikap Jokowi kepada kedua kandidat itu berbeda dengan perlakuannya kepada Anies Baswedan.

Anies diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sebagai bakal capres.

Sejak mendukung Anies sebagai bakal capres, hubungan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Jokowi terlihat merenggang. Jokowi bahkan tidak mengundang Paloh ke Istana bersama-sama dengan pimpinan partai koalisi pemerintahan beberapa waktu lalu.



Kompas.com / News / Nasional

## Soal Hasil Musra, PDI-P Yakin Jokowi Dukung Ganjar Capres



Kompas.com - 17/05/2023, 16:15 WIB

Nicholas Ryan Aditya, Novianti Setuningsih Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) 2024.

Ia pun mengungkit kehadiran Jokowi dalam deklarasi Ganjar sebagai capres oleh Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor pada 21 April 2023.

Hal ini disampaikannya ketika ditanya kemungkinan Jokowi tidak mendukung Ganjar terkait hasil Musyawarah Rakyat (Musra) relawan Jokowi.

"Saya tidak mengerti kalau Pak Jokowi tidak mendukung Pak Ganjar. Pak Jokowi hadir di Batu Tulis," kata Said Abdullah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Said justru mempertanyakan apabila kehadiran Jokowi di Batu Tulis dianggap tidak menjadi sinyal dukungan untuk Ganjar.

Kehadiran tersebut, menurut Said, memastikan dukungan Jokowi terhadap Ganjar.

Apalagi, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini mengatakan, Jokowi juga merupakan kader PDI-P.

"Kami melihatnya, Pak Presiden tidak condong ke A ke B, dia istiqomah dengan sikapnya yang hati-hati. Kalau saya melihatnya seperti itu," ujar Said.

"Tapi saya yakin, sebagai kader Moncong Putih, Presiden pasti tidak akan ke mana-mana juga," katanya lagi.

Lebih lanjut, Said menilai kehadiran Jokowi di Batu Tulis untuk mendukung Ganjar sudah diputuskan secara matang.

"Kan ini proses waktu saja. Timing yang tepat, Presiden (Jokowi) kan perlu memperhitungkan berbagai aspek. Itu pasti diperhitungkan Bapak Presiden," ujar Said.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyimpan nama-nama capres dan calon wakil presiden hasil (cawapres) dari Musra.

Selanjutnya, Jokowi akan memberikan bisikan kepada partai-partai terkait nama-nama capres atau cawapres tersebut.

"Jadi saya terus terang, ini harus kita berikan waktu kepada partai atau gabungan partai untuk menyelesaikan urusan capres-cawapres," kata Jokowi dalam acara Puncak Musra di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2023).

"Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Jadi, kalau saya ngomong sekarang untuk apa? Itu yang namanya strategi, ya itu. Jangan tergesa-gesa, jangan grusa-grusu," ujarnya lagi.

Dalam acara itu, nama capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 berdasarkan hasil Musra oleh sejumlah relawan diserahkan ke Jokowi.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

Nama : Irma Rizqi yani Solihah  
 NIM : 1917102142  
 Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 24 Agustus  
 Alamat : Desa Gunung Lurah Rt 04/ 01, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Agama : Islam  
 Nomor telepon : 0878-3713-2689  
 E-mail : [Irmarizqi3424@gmail.com](mailto:Irmarizqi3424@gmail.com)  
 Motto Hidup : *Dum Spero Spiro, Dum Spero Amo, Dum Amo Vivo.*

### RIWAYAT PENDIDIKAN

MI : MI Ma'arif Nu 1 Gunung Lurah  
 MTS : Mts Ma'arif Nu 2 Penembangan  
 SMK/Sederajat : SMK Ma'arif Nu 2 Ajibarang  
 Strata 1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

### PENGALAMAN

1. Lembaga Pers Mahasiswa Obsesi : Pemimpin redaksi (2022-2023)
2. iNews.id : *SEO Content Writer* (2022)
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam : Bendahara (2021)

Purwokerto, 11 Januari 2024  
Penulis,



**Irma Rizqi Yani Solihah**  
NIM. 1917102142